



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI IX DPR RI**

- Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : II
Rapat ke- : 15
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Dengan : Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 10 Februari 2020
Waktu : Pukul 13.35 s.d 17.55 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. 1
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Emanuel Melkiades Laka Lena/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Acara : 1. Progress Kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI);
2. Langkah Strategis BPJS Ketenagakerjaan dalam Menghadapi Perkembangan Revolusi Industri 4.0, dan Digitalisasi terhadap Upaya Perlindungan Pekerja;
3. Kebijakan BPJS Ketenagakerjaan dalam Mendukung Program Pelatihan Vokasi bagi Peningkatan Kualitas SDM
- Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto, S.H.
Hadir : **A. Anggota DPR RI:**
... dari 51 orang Anggota dengan rincian:
1. **Fraksi PDI Perjuangan**
1. Dra. SRI RAHAYU
2. Dra. ELVA HARTATI, S.I.P., M.M.
3. Dr. RIBKA TJIPTANING
4. Dr. H. EDY WURYANTO, S.KP., M.Kep.
5. H. IMAM SUROSO, S.H., S.Sos.
6. RAHMAD HANDOYO, S.Pi., M.M.
7. MUCHAMAD NABIL HAROEN, S.Pd., M.Hum.
8. Dr. DEWI ARYANI, M.Si.
9. KRISDAYANTI
10. H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H.
11. I KETUT KARIYASA ADNYANA, S.P.

2. **Fraksi Partai Golongan Karya**
1. EMANUEL MELKIADES LAKA LENA
2. DELIA PRATIWI SITEPU, S.H.
3. Drs. H. DARUL SISKI

4. Hj. SANIATUL LATIVA, S.E.
 5. Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H.
 6. Dra. WENNY HARYANTO, S.H.
 7. M. YAHYA ZAINI, S.H.
3. **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya**
1. dr. H. SUIR SYAM, M.Kes., MMR.
 2. Ir. H.A.R. SUTAN ADIL HENDRA, M.M.
 3. Ir. SRI MELIYANA
 4. Ir. H. NUROJI
 5. OBON TABRONI
 6. ADE REZKI PRATAMA, S.E., M.M.
 7. drg. PUTIH SARI
 8. Dra. Hj. RUSKATI ALI BAAL
4. **Fraksi Partai Nasionalis Demokrat**
1. FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E.
 2. Hj. SRI KUSTINA
 3. Drs. FADHOLI
 4. RATU NGADU BONU WULLA, S.T.
 5. drg. Hj. HASNAH SYAM, MARS.
5. **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa**
1. Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A.
 2. Hj. NUR NADLIFAH, S.Ag., M.M.
 3. ARZETI BILBINA, S.E., M.A.P.
 4. ANGGIA ERMA RINI, M.K.N.
 5. H. HARUNA, M.A., M.B.A.
6. **Fraksi Partai Demokrat**
1. Drs. H. ZULFIKAR ACHMAD
 2. Dra. LUCY KURNIASARI
 3. ANWAR HAFID
 4. Hj. ALIYAH MUSTIKA ILHAM, S.E.
 5. MUHAMMAD DHEVY BIJAK
7. **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**
1. H. ANSORY SIREGAR
 2. Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.
 3. dr. H. ADANG SUDRAJAT, M.M., Av.
 4. Dr. Hj., NETTY PRASETIYANI, M.Si.
 5. H. ALIFUDDIN, S.E., M.E.
8. **Fraksi Partai Amanat Nasional**
1. Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag. M.Hum., M.A.
 2. Hj. INTAN FAUZI, S.H., LLM.
 3. Drs. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag.
 4. MESA KH MIRIN, S.K.M.
9. **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**
1. Sy. ANAS THAHIR

KETUA RAPAT (EMANUEL MELKIADES LAKA LENA):

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.
Om Swastiastu, Namo Budaya, Shalom.

Yang terhormat, Saudara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan beserta jajaran;
Yang saya hormati, Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI: serta
Hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melimpahkan rahmat dan hdayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir pada Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan beserta jajaran.

Sebelum rapat ini kita mulai alangkah baiknya kita berdo'a menurut keyakinan kita masing-masing.

Berdo'a mulai.

(BERDOA BERSAMA)

Berdoa selesai.

Pada saat ini daftar hadir telah ditandatangani oleh 13 orang dari 6 fraksi, maka sesuai dengan Pasal 251 Peraturan Tata Tertib rapat kami nyatakan kita skors sebentar sambil menunggu peserta atau teman-teman dari daftar hadir ini bisa hadir memenuhi jumlah anggota dan fraksi.

Rapat saya skors 10 menit, setelah itu kita akan buka dan kita mulai lagi.

(RAPAT DIBUKA UNTUK DISKORS PUKULWIB)

Sesuai dengan Tatib Pasal 251, setelah kita menskors sidang, apabila belum mencapai korum juga kita tetap lakukan atau lanjutkan rapat. Nanti pada saat pengambilan keputusan baru kita cek lagi korum anggota dan fraksi. Untuk itu saya nyatakan bahwa rapat dinyatakan korum dan terbuka untuk umum.

(SKORS DICABUT PUKUL 13.35 WIB)

Mengenai waktu rapat saya tawarkan. Kita mulai sekarang Jam 13.35 sampai dengan Jam 15.00 atau jam tiga sore. Setuju ya. Kalau nanti ada perpanjangan nanti kita tambah lagi.

(RAPAT: SETUJU)

Adapun agenda rapat atau acara rapat kita hari ini adalah:

1. Progres kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan kementerian serta lembaga terkait lain, baik di dalam maupun di luar negeri, guna memberikan perlindungan jaminan sosial dan perlindungan asuransi di luar negeri bagi pekerja migran di Indonesia, termasuk pelaut, awak kapal, dan pelaut perikanan yang bekerja melalui BP2MI dan Pekerja Migran Indonesia Mandiri;
2. Langkah strategis BPJS Ketenagakerjaan dalam menghadapi perkembangan Revolusi Industri 4.0, dan digitalisasi terhadap upaya perlindungan pekerja;
3. Kebijakan BPJS Ketenagakerjaan dalam mendukung program pelatihan vokasi bagi peningkatan kualitas SDM;

4. Monitoring dan evaluasi investasi BPJS Ketenagakerjaan pada surat-surat berharga.

Untuk itu kami persilakan kepada Saudara Dirut BPJS Ketenagakerjaan untuk menyampaikan paparannya. Kepada Pak Dirut BPJS Ketenagakerjaan kami persilakan.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (AGUS SUSANTO):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan Bapak/Ibu semua Anggota Komisi IX DPR RI,

Selamat siang,

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Terima kasih atas kesempatannya.

Tadi sudah disampaikan oleh Pimpinan kami untuk menyampaikan paparan. Sesuai dengan undangan kepada kami ada 4 (empat) agenda, yaitu:

1. Progres kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dengan BP2MI;
2. Kemudian langkah strategis BPJS Ketenagakerjaan menghadapi perkembangan Revolusi Industri 4.0;
3. Kebijakan BPJS Ketenagakerjaan mendukung program *vocational training*; dan
4. Monitoring dan evaluasi investasi BPJS Ketenagakerjaan pada surat berharga.

Saya akan mulai yang agenda pertama yaitu progres perlindungan pekerja migran Indonesia.

BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan amanah untuk memberikan perlindungan kepada PMI sejak Agustus 2017. Halaman kedua kami paparkan grafik kenaikan jumlah tenaga aktif untuk PMI, dari 2017, 2018, dan 2019. Saat ini data terakhir kami per 2019 ada 554 ribu PMI yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, atau ada kenaikan dari pertama di implementasi 266 persen.

Kalau kita lihat profil siapa PMI itu dan darimana, di halaman 5 ada profil daerah asal. Daerah asal terbanyak adalah Indramayu, yang kedua adalah Lombok Timur.

Kalau kita lihat dari negara tujuan penempatan ini yang pertama data di kami yang terdaftar adalah yang terbanyak dari Taiwan, kemudian Malaysia, Hongkong. Ini data yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian jenis pekerjaan terbanyak adalah sebagai *care giver*.

Pembayaran klaim PMI, jadi sejak kita berikan perlindungan dari 2017 sampai 2019 berapa banyak PMI yang klaim karena kecelakaan atau yang meninggal totalnya sebanyak 260 klaim, atau 260 kasus. Terbanyak adalah di tahun 2019, yaitu sebanyak 207 kasus. Baik itu karena kecelakaan kerja atau yang meninggal.

Berikutnya adalah, apa upaya peningkatan perlindungan PMI yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan? Ada 3 (tiga) upaya yang kita lakukan:

1. Kita melakukan edukasi publik;
2. Optimalisasi kanal layanan;
3. Melakukan kerjasama kelembagaan.

Yang pertama yang kita lakukan terkait dengan edukasi publik. Ini karena PMI ada di luar negeri, maka kita melakukan sosialisasi, advokasi, dan edukasi. Umumnya menggunakan saluran-saluran atau kanal-kanal digital, melalui medsos dan sebagainya. Namun demikian yang berada di dalam negeri yang belum berangkat kita lakukan sosialisasi dan edukasi ke kantong-kantong TKI di daerah-daerah pengirim TKI atau PMI.

Kemudian yang kedua kita lakukan optimalisasi kanal layanan. Jadi. Bapak/Ibu, untuk pendaftaran PMI ini sebelum mereka berangkat mereka terdaftar atau didaftarkan melalui PT IS. Kemudian apabila mereka sudah di luar negeri mereka didaftarkan menggunakan fasilitas digital kita, yaitu BPJS TKKU.

Kemudian yang kita lakukan optimalisasi kanal layanan, ini *payment channel*-nya. Baik dengan perbankan maupun dengan non perbankan. Di halaman 9.

Kemudian yang di luar negeri kita lakukan optimalisasi kanal layanan juga. Kita kerjasama dengan fasilitas perbankan yang di akses melalui *electronic banking*, kemudian kerjasama dengan non perbankan, dan juga dengan beberapa penyedia jasa layanan, seperti *provider*.

Salah satu contoh untuk penguatan kanal layanan, karena ini tidak ada kanal layanan yang bisa diterapkan untuk seluruh negara, kecuali untuk pendaftaran. Kalau pendaftaran menggunakan BPJS TKKU, mereka mengakses kepada satu aplikasi kita. Tetapi pembayarannya, karena masing-masing negara punya otoritas dan regulasi sendiri-sendiri, sehingga kita lakukan setiap negara berbeda-beda. Contohnya dengan Hongkong. Hongkong kita bekerjasama dengan BNI untuk pembayaran, kemudian dengan Vinet, diantaranya dengan Warung Chandra, dan yang lainnya. Kemudian di Jepang kita kerjasama dengan Keodai dan lainnya juga. Kemudian di Malaysia kita kerjasama dengan beberapa provider, termasuk dengan *Mandiri International Remittance*/anak perusahaan Mandiri, kemudian juga dengan pihak lokal di Malaysia. Di Singapura kita kerjasama, baik itu dengan BNI ataupun dengan mitra lokal di Singapura yang umum. Umumnya adalah untuk memperkuat kanal layanan. Di Brunei Darussalan demikian juga kita kerjasama dengan mitra *remittancy* di Brunei dan koperasi KBRI di Brunei. Di Taiwan berbeda juga, kita kerjasama dengan Tel In/perusahaan telekomunikasi di Taiwan, dan dengan Seven Eleven. Inilah bentuk kerjasama atau *payment canal* yang tidak bisa berlaku untuk seluruh negara, tapi masing-masing negara punya regulasi sendiri-sendiri, sehingga kita melakukan kerjasama secara bilateral.

Yang ketiga, penguatannya kita lakukan dengan kerjasama kelembagaan. Kelembagaan di dalam negeri, yaitu dengan Kemenaker, kemudian dengan BP2MI, kemudian dengan Kementerian Luar Negeri, dan Kemenkumham. Dengan Kemenaker diantaranya untuk menyiapkan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PMI melakukan sosialisasi bersama. Kemudian dengan BP2PMI juga sosialisasi, dukasi, integrasi sistem pendaftaran. Kemudian dengan Kementerian Luar Negeri. Dan Kemenkumham ini yang terkait dengan integrasi data untuk validasi paspor antara BPJS Ketenagakerjaan dengan data di Imigrasi. Kerjasama dengan pihak di luar negeri diantaranya kita lakukan kerjasama dengan KJRI Hongkong, dengan KBRI Singapore, dengan Brunei, KBRI Jepang, dengan KTEI Taipei. Dengan Perkeso Malaysia/jaminan sosial Malaysia. Kemudian dengan Kombel atau MPS/jamiiinan sosial di Korea. Ini kerjasama kelembagaan pun juga kita lakukan bilateral di masing-masing negara penempatan.

Tahun 2020 rencana pengembangan layanan dan perlindungan PMI ini akan kita lakukan dengan mengevaluasi manfaat perlindungan PMI pada Permenaker 18/2018. Kemudian kita lakukan sosialisasi perlindungan PMI yang lebih *massive*, baik pada saat mereka sebelum berangkat/saat ada di dalam negeri di kantong-kantong penyalur TKI ataupun di luar negeri.

Kemudian kami juga membentuk kanal layanan di luar negeri di negara penempatan yang mana membutuhkan dukungan Kementerian Luar Negeri dan ketersediaan anggaran. Namun demikian kita sudah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri, memang untuk membuka kanal layanan atau penempatan karyawan di KBRI terkendala karena regulasi negara setempat.

Kemudian program pemberdayaan PMI kita lakukan pengembangan di desa/kantong-kantong PMI dilakukan sosialisasi/edukasi yang lebih *massive*, peningkatan literasi keuangan, pelatihan vokasi di kantong-kantong TKI.

Kemudian juga kita di tahun 2020 ini melakukan kajian komprehensif terkait perlindungan PMI di Timur Tengah.

Berikutnya adalah kepesertaan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. Kalau kita lihat data kepesertaan untuk pelaut dan juga pelaut awal kapal dan pelaut perikanan, pelaut awal kapal ini adalah awal kapal orang Indonesia yang bekerja di kapal, baik itu untuk tenaga misalnya seperti ABK dan sebagainya. Total saat ini ada 143.666. Memang belum banyak. Terutama ini terkendala adanya disharmoni regulasi Kemudian kalau untuk kepesertaan pelaut lintas batas yang didaftarkan melalu BP2MI itu totalnya adalah 9.778.

Hal-hal yang perlu mendapatkan dukungan untuk kita bisa melindungi para pelaut, awak kapal, ataupun pelaut perikanan, diantaranya adalah mengharmonisasi regulasi, yaitu adanya disharmoni Undang-Undang 40/2004 dan Undang-Undang 24 dengan Undang-Undang 17/2008, dimana di dalam Undang-Undang Nomor 17/2008 Tentang Pelayaran tidak mengatur terkait kewajiban untuk mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Untuk pelaut perikanan ini ada disharmoni antara Undang-Undang 40/2004, 24/2011, dengan Undang-Undang Nomor 7/2016, dimana resiko yang dihadapi nelayan pembudidaya ikan dan petambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi nelayan pembudidaya ikan dan petambak garam.

Untuk pelaut lintas batas demikian juga, sehingga kita juga merekomendasikan ada 3 (tiga) hal untuk penguatan perlindungan kepada pelaut ini adalah:

1. Jaminan sosial bagi pekerja merupakan bagian perlindungan WNI secara keseluruhan yang mana program perlindungan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40/2004 (SJSN) dan Undang-Undang BPJS;
2. Pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah yang mengatur secara lengkap terkait perlindungan jaminan sosial bagi PMI pelaut dan awak kapal;
3. Pembahasan substansi peraturan pemerintah agar lebih komprehensif dengan melibatkan antar kementerian/lembaga yang mengatur tentang pelaut dan awak kapal, yaitu diantaranya Kemnaker, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, BNP2TKI, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan.

Demikian yang bagian pertama atau agenda pertama.

Izinkan kami untuk memaparkan agenda kedua yaitu langkah strategis menghadapi era Revolusi Industri 4.0 dan Digitalisasi. Saya kira informasi tentang dampak Revolusi Industri dan Digitalisasi ini sudah sangat *massive*, yang mana pada jaman sebelumnya banyak hal dilakukan secara manual/dengan *paper base*, sekarang sudah dengan *digital*, dengan *cashless*, dengan memanfaatkan *activicial intelligent*. Dan inilah yang faktanya merubah seluruh konstelasi kehidupan dan merubah *the way of life* dari masyarakat, cara mereka hidup pun mulai bergeser.

Disrupsi karena otomasi juga beberapa data saya kira sudah banyak kita dapatkan atau kita informasikan, ada 45 persen aktifitas pekerjaan dapat digantikan oleh teknologi. Ini sumber data dari ISA 2017. Namun demikian akan ada 7,1 pekerjaan yang hilang dan ada pekerjaan baru yang muncul.

Potensi ekonomi baru di ekonomi digital pun sering kita dengar. Bahwa dengan adanya kehilangan pekerjaan tetapi akan muncul sebuah potensi ekonomi baru. Di halaman 27.

Fenomena disrupsi di sektor ketenagakerjaan dan jaminan sosial, ini yang terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Pertama, fenomena ini akan mengena pada otomasi dalam skala luas. Otomasi termasuk otomasi di BPJS Ketenagakerjaan ini akan merubah hubungan industrial antara pekerja dan pemberi kerja. Dan otomasi ini diperkirakan akan merambah *landscape* ketenagakerjaan sehingga perlu diantisipasi peningkatan angka pengangguran atau kebutuhan *skill* baru yang muncul.

Kemudian skema pengangguran dan peningkatan manfaat lainnya hendaknya mulai dikaji sebagai kesatuan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan untuk mengantisipasi fenomena *disruption* tersebut.

Platform digital juga demikian akan ada perubahan, dimana tantangannya bagaimana kita mendaftarkan tenaga kerja pada program jaminan sosial yang sulit dijangkau, terutama yang sifat hubungan antara majikan dan karyawannya itu bervariasi, sehingga kita perlu memikirkan bagaimana kita mampu untuk masuk ke ruang-ruang para pelaku ekonomi digital tersebut.

Fenomena disrupsi di sektor ketenagakerjaan yang terkait dengan dampak ekonomi yang muncul. Tadi kami sampaikan bahwa akan ada para pelaku ekonomi baru sehingga kita perlu membangun interaksi dan *realitionship* dengan aktor-aktor utama pada sektor ekonomi baru. Saat ini kita memberdayakan perisai, merekalah yang memfasilitasi kita untuk bisa masuk ke ruang-ruang aktor-aktor pelaku ekonomi digital. Kemudian transformasi pasar tenaga kerja juga berubah.

Pertanyaan yang lainnya adalah bagaimana standar upah di masa yang akan datang yang tentunya berpengaruh pada pembiayaan jaminan sosial kedepan.

Dampak lainnya adalah dampak sosial tadi akan merubah cara pendekatan kepada pelaku ekonomi ini/kepada peserta, karena *the way of life*-nya akan berubah karena hadirnya dk digital tersebut, kemudian dampak hubungan industrial.

Mungkin yang penting yang dihadapan kita adalah bagaimana BPJS Ketenagakerjaan merespon pengaruh atau dampak dari disrupsi tersebut. yang pertama kita melakukan *service communication and digital*. Jadi ada 3 (tiga) di halaman 31, yaitu:

1. *Service communication and digital*;
2. Melakukan kolaborasi dengan ekosistem *e-commerce*;
3. Mengembangkan kapasitas organisasi dan SDM.

Ini adalah cara kita merespon terhadap dampak revolusi industri 4.0.

Yang pertama, *service communication and digital*. Ini kita meningkatkan kanal-kanal komunikasi kita menjadi kanal-kanal komunikasi digital, dimana kanal komunikasi fisik maupun kanal komunikasi elektronik ini harus mampu memberikan layanan yang sama persis. Jadi kita tetap memberdayakan kanal fisik, kita membangun kanal *digital*, dimana dua kanal ini harus mampu memberikan kualitas dan ragam layanan yang sama persis.

Di kanal digital kita menggunakan berbagai kanal digital, seperti di halaman 32, tidak saya sebut satu persatu. Kemudian di *channelling*-nya kita ada IPLKK, ada 175, kemudian ada fasilitas antrian *online*. Dan kita memiliki BPJS TKKU, ini adalah aplikasi *apps* dari BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian kita juga meningkatkan untuk verifikasi menggunakan verifikasi biometrik. Di inovasi *landscape* layanan berbasis digital diantaranya kita punya SIPP, kemudian kita ada kerjasama atau komunikasi protokol digital dengan pusat layanan kecelakaan kerja. Kemudian kita punya aplikasi *smile*, itu untuk *core system* internal kita. dan yang lainnya.

Kemudian yang kedua, kita lakukan kolaborasi dengan ekosistem *e-commerce*. Kita kerjasama dengan *market place*, *bukalapak*, *grab*, *tokomedia*, *gojek*, *linkaja*, dan sebagainya. Dan kerjasama ini akan diperluas lagi kedepan dengan mempersyaratkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebelum jadi mitra usaha *e-commerce* tersebut. Sebetulnya saat ini sudah kita ada kerjasama dengan para *market place* ini, tetapi belum optimal, sehingga kita perlu ada suatu kebijakan bagaimana para mitra dari *e-commerce* tersebut/dari *market place* tersebut. Misalnya *bukalapak* secara otomatis akan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ini yang perlu kita pikirkan.

Kemudian yang ketiga, upaya kita terkait dengan peningkatan kapasitas organisasi dan SDM. Ini kita mengembangkan *big data analysis* untuk bisa memberikan masukan dalam membuat kebijakan di BPJS Ketenagakerjaan.

Kemudian kita mulai mensyaratkan untuk rekrutmen itu karyawan dengan *vlogger*. Kita ingin melihat kemampuan karyawan baru itu adaptasinya terhadap sistem teknologi terkini dan aplikasi yang terkini.

Kemudian kita juga melakukan pelatihan komunikasi *cross generation*. Karena cara-cara pendekatan/cara-cara komunikasi sosial saat ini sudah bergeser dengan adanya Revolusi Industri 4.0, dimana antara generasi yang muda dengan generasi yang tua ini harus ada suatu komunikasi yang baik. Ini yang kita lakukan pelatihan di seluruh SDM kita.

Dan yang berikutnya kita lakukan kampanye Isanova. Ini kampanye untuk peningkatan inovasi di internal BPJS Ketenagakerjaan.

Demikian yang agenda kedua yang terkait dengan Revolusi Industri 4.0.

Yang ketiga adalah terkait dengan program vokasi dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia.

Program vokasi ini selaras dengan arahan Bapak Presiden, yang pertama adalah terkait pembangunan SDM, dimana dalam pembangunan SDM kita punya 2 (dua) kegiatan, yaitu program vokasi dan pemberian manfaat beasiswa, sesuai dengan PP 82 yang baru saja ditandatangani oleh Bapak Presiden. Yang terkait dengan program vokasi ini baru, kita baru implementasikan tahun lalu di bulan September 2019. Dan saat ini baru sifatnya *piloting*. Karena ini program besar kita harus hati-hati, kita harus siapkan betul infrastrukturnya, sehingga tidak kita lakukan secara *massive* seluruh Indonesia, tetapi kita lakukan secara bertahap, dan kita akan lakukan evaluasi terus menerus. Di skema pelatihan vokasi, kita sebut namanya Vokasi Indonesia Bekerja, yaitu ada peserta. Kita sudah atur bagaimana persyaratan dari peserta tersebut. Kemudian lembaga pelatihan kerja siapa saja para lembaga yang memberikan pelatihan kerja tersebut, termasuk persyaratannya, kemudian bagaimana mendaftarkannya, bagaimana melaksanakan pelatihan dan sertifikasinya, dan sebagainya kita atur disitu.

Kemudian terkait dengan perusahaan penyedia lowongan kerja. Ini yang agak sulit, karena ini kita ingin dibantu dari pihak pemberi kerja/dari perusahaan, dari Apindo untuk Cipta Lapangan Kerja, dan memberikan informasi lowongan kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan agar yang dilatih/di *training* tersebut bisa disalurkan. Kemudian untuk menyelenggarakan tersebut kita memberdayakan kantor-kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Prasyarat dan lokasi *piloting* vokasi ini kriteria peserta adalah para peserta kita/peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami PHK, kepesertaannya lebih dari satu tahun, dan sebagainya.

Kemudian kriteria BLK (Balai Latihan Kerja) atau LPK sebagai penyedia atau penyelenggara pelatihan, yaitu kriterianya ijin operasionalnya masih valid, milik pemerintah ataupun milik swasta, memiliki minimal dua jenis modul pelatihan, memiliki kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, kerjasama dengan perusahaan yang bisa menyerap tenaga kerja, dan sudah beroperasi minimal 6 bulan. Tempat pelaksanaan *piloting* saat ini ada di 44 kantor cabang di 11 kantor wilayah BP Jamsostek.

Untuk implementasi vokasi di tahun 2019 yang mulai kita jalankan di bulan September, dari September-Oktober-Nopember-Desember, itu sudah ada 5.343 orang yang mendaftar. Peserta yang dilatih ada 2.963. yang sudah terserap ke pekerjaan baru atau mendapatkan pekerjaan baru 137 orang. Mungkin ini lebih besar, karena kita masih kesulitan untuk memantau para pekerja yang dilatih itu sudah mendapatkan pekerjaan atau belum. Terus terang kami masih kesulitan untuk melakukan pemantauan ini.

Kemudian implementasi vokasi di tahun 2019 yang kami sampaikan tadi ini masih *piloting*. Ini kalau kita lihat dari modul vokasi terbanyak adalah multimedia, kemudian pelatihan untuk mesin dan pabrik, kemudian mekanik industri. Ini modul yang paling banyak dibutuhkan.

Kemudian ini ada di halaman 42 data BLK yang sudah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2019. Dari BLK Pemerintah ada 19 BLK, LPK swasta ada 35, ini per Desember 2019.

Saat ini kita melakukan *self evaluation*, kita melakukan evaluasi secara umum *piloting* vokasi 2019. Yang pertama rekrutmen tenaga kerja dan calon peserta vokasi. Ternyata peminatnya cukup banyak sekali. Termasuk yang berusia lebih dari 40 tahun mereka juga berminat menjadi peserta vokasi.

Kemudian belum mengakomodasi peserta PMI, baik itu di fase sebelum berangkat ataupun setelah penempatan.

Kemudian dasar hukum pelaksanaan vokasi kita masih dalam persiapan. Pembahasan dasar hukum, pelaksanaan vokasi, ini memakan waktu cukup lama, dan belum ada dasar hukum yang dikeluarkan oleh kementerian, baik itu dari Kementerian Tenaga Kerja, sehingga kita masih butuh cantolan hukum yang pasti/kuat untuk implementasi vokasi ini.

Kemudian perluasan kerjasama dengan BLK, dengan LPK, dan *stake holders*. Kita butuh dukungan kebijakan penciptaan lapangan kerja. Dan pembelajaran di tingkat wilayah, daerah, dan pusat, kita membutuhkan waktu untuk *transfer knowledge* program tersebut. Dan perlu dukungan aplikasi yang memegang peranan penting dalam hal ini.

Di tahun 2020 arahan Pemerintah terkait dengan vokasi ini bahwa program vokasi BPJS Ketenagakerjaan dapat mungkin juga mencakup Pekerja Migran Indonesia (PMI). Misalnya pelatihan bahasa asing atau yang lainnya.

Kemudian juga program vokasi BPJS Ketenagakerjaan hendaknya bersinergi dengan program strategis Pemerintah. Misalnya integrasi dengan program vokasi BPJS Ketenagakerjaan dengan Kartu Pra Kerja.

Kemudian melakukan optimalisasi kerjasama dengan Balai Latihan Kerja milik pemerintah pusat maupun daerah.

Di tahun 2020 ini kami memiliki Rencana Kerja Vokasi Indonesia Bekerja, diantaranya pertama melakukan perpanjangan masa *piloting*. Yang tadinya kita *piloting* itu berakhir di bulan Desember, ini kita perpanjang agar masih bisa melakukan operasional, sambil menunggu dibuatnya sebuah regulasi yang baru.

Kemudian Vokasi Indonesia Bekerja dasar hukumnya juga lagi kita siapkan. Pendukung implementasi lainnya kita melakukan pengembangan ekosistem vokasi, seperti program Bapak Asuh Vokasi, dan sebagainya.

Demikian yang terkait agenda ketiga. Ijinkan kami memaparkan agenda keempat, yaitu Monitoring dan Evaluasi Investasi BPJS Ketenagakerjaan pada surat berharga.

Untuk mengelola investasi di BPJS Ketenagakerjaan ini *fully regulated*. Jadi regulasinya sangat banyak sekali, kami harus *comply* dengan berbagai peraturan tersebut. Peraturan itu diantaranya ada yang mengatur investasi, yaitu di Undang-Undang 40/2004 Tentang SJSN, Undang-Undang 24/2011 Tentang BPJS, kemudian PP Nomor 99/2013, PP Nomor 55, kemudian POJK I (Satu) Tahun 2016. Ini regulasi eksternal yang harus kami patuhi disitu sebagai rambu-rambu untuk melakukan pengelolaan investasi.

Kemudian masih ada lagi regulasi internal yang mengatur di internal kita, yaitu ada peraturan direksi. Yang terbaru adalah Peraturan Direksi 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian ada lagi regulasi turunannya, ada *asset allocation*, ada *strategic asset allocation*, ada *tactical asset allocation*. Jadi regulasinya sangat berlapis-lapis.

Kalau untuk regulasi yang eksternal misalnya, ini terkait dengan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 bahwa Pemerintah menjamin terselenggaranya pengembangan jaminan hari tua sesuai dengan prinsip kehati-hatian, minimal setara tingkat suku bunga deposito bank pemerintah jangka waktu 1 (satu) tahun sehingga peserta memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Jadi kami itu di target oleh PP bahwa dalam mengelola investasi BPJS Ketenagakerjaan tidak boleh rugi, tapi harus menghasilkan minimal itu setara dengan rata-rata suku bunga deposito bank pemerintah. Kita kalau lihat instrumen investasi yang ada itu tidak ada yang memberikan jaminan *return*. "Anda kalau beli ini nanti saya jamin tidak akan turun dari deposito", tidak ada. Tetapi di BPJS Ketenagakerjaan kami

diatur, kami di target oleh PP tidak boleh turun dari deposito hasil investasinya. Itu yang pertama

Kemudian yang kedua terkait dengan PJK I (satu) Tahun 2016. BPJS Ketenagakerjaan wajib menempatkan investasi pada Surat Berharga Negara (SBN). Paling rendah 50 persen dari seluruh jumlah investasi Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan paling rendah 30 persen dari seluruh jumlah investasi BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kami harus mematuhi harus menempatkan dana-dana kami investasi di SBN yaitu minimal 50 persen dari DJS (Dana Jaminan Sosial).

Kemudian PP 46 Tahun 2015 Pasal 25 ayat (1) dan Permenaker 35 Tahun 2016, peserta memperoleh manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan dan/atau manfaat lainnya.

Kemudian ada PP Nomor 55 terkait dengan *resume task quantitative*. Jadi dalam mengelola investasi ini kita tidak boleh sembarangan, tidak boleh seenaknya saja. Ini sudah ada panduannya, ada *guidance*-nya, yaitu PP 55, ada batasan maksimalnya di instrumen.

Kami tampilkan di halaman 49. Misalnya deposito, itu maksimal berapa boleh ditaruh di deposito. Kemudian di surat berharga yang diterbitkan negara berapa batas maksimal, kemudian minimalnya. Minimalnya ada, maksimalnya ada. Kemudian surat utang korporasi juga maksimalnya berapa. Maksimal sangat detail sekali disini, sehingga kita di dalam melakukan penempatan investasi selalu melihat/meneropong melihat batas-batas investasi sesuai dengan regulasi yang ada.

Yang berikutnya ini terkait dengan regulasi di internal. Jadi tadi ada regulasi eksternal sudah mengatur sedemikian rupa. Ada regulasi internal. Regulasi internal ini berupa pedoman pengelolaan investasi BPJS Ketenagakerjaan. Ini memuat garis besar kebijakan investasi:

- Ada *strategic asset allocation*, jadi alokasinya kemana saja;
- Kemudian kebijakan pemilihan mitra kerja investasi. Jadi kalau ada mitra kerja investasi atau pihak yang ingin bekerjasama investasi dengan kita itu ada kriteria, ada persyaratan, ada kebijakan di internal kita, yaitu kebijakan pemilihan mitra kerja investasi.
- Kemudian ada pedoman perilaku dalam investasi;
- Kemudian ada struktur dan fungsi organisasi;
- Ada *technical asset allocation*;
- Ada petugas teknis pengelolaan investasi;
- Dan sebagainya.

Di halaman 51 kami gambarkan pertumbuhan dana investasi per 31 Desember 2019 yang kami gambarkan dari tahun 2015. Ini kita berikan *historical*-nya dari 2015. Yang warna hijau ini adalah dana investasi. Kemudian yang warna biru ini adalah pertumbuhannya atau *growth*-nya, atau hasil investasi, maaf, hasil investasinya. Jadi di 2015 total dana investasi kita 206 triliun, 2016 (261 triliun), dan di 2019 menjadi 431 triliun. Hampir *double*, dua kali lipat lebih kenaikannya dari tahun 2015 ke 2019.

Berikutnya adalah *asset allocation*. Ini alokasi dari pengelolaan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan. Kalau kita dengar ada dana 431 triliun itu ada dimana saja, ini gambarnya di halaman 52, yaitu 58 persen ada di obligasi. Kenapa sedemikian besar, karena tadi ada regulasi, POJK I (satu) tadi. Kami harus menempatkan minimal 50 persen. Saat ini ada 60 persen, maaf, di sebelah kanan 2019. Saham ada sebanyak 19 persen dari 431 triliun. Kemudian Reksadana sebanyak 9,34 persen dari 431 triliun. Penyertaan langsung, ini yang kami langsung memberikan investasi langsung/penyertaan. Itu masih kecil, hanya 0,4 persen. Ini karena terkait dengan regulasi.

Kalau Bapak/Ibu lihat di batasan investasi ada investasi langsung, itu ada batasannya. Batas maksimalnya kalau tidak salah 2 persen di regulasi yang ada. Hanya 2 persen kita diperbolehkan. Saat ini kita baru 0,1 persen. Kemudian deposito sebanyak 10,86 persen dari 431 triliun.

Berikutnya kinerja investasi. Ini kinerja investasi juga kami paparkan secara *historical* supaya bisa melihat tahun-tahun sebelumnya seperti apa. Di paling atas kami tunjukkan prosentase hasil investasi atau *Year On Investment*, atau sering disebut YOI. 2019 (9,4 persen), 2017 YOI kita 9,4 persen, di 2018 (8,16 persen), dan di 2019 (7,34 persen). Nanti kalau dilihat ada penurunan ini pasti akan bisa terlihat dari bagaimana kondisi *market*, terutama di pasar modal Indonesia.

Kinerja investasi ini YOI nya kita bagi per instrumen, yaitu instrumen deposito, obligasi, saham. Warna ini membedakan tahun, jadi kita ingin menunjukkan untuk YOI deposito, obligasi, saham, di tahun 2016 bagaimana. Ini kita tunjukkan untuk di deposito kita perlihatkan masing-masing diperbandingannya. Kalau yang paling kanan adalah saham di tahun 2016, 2017, kemudian 2018, dan 2019. Untuk saham itu *pic*-nya yang warna merah (2017), nanti bisa dilihat dari pergerakan indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia.

Kalau deposito hampir sama, hampir *flate*. Karena kenaikan dan penurunan deposito tidak terlalu tajam, obligasi demikian juga. Namun saham ini yang pergerakannya cukup fluktuatif, justru ini yang malah di senangi para investor asing yang dianggap sebagai *emerging market*.

Berikutnya di halaman 55 adalah kinerja investasi. Ini portofolio investasi kita per 31 Desember 2019 yang tadi di depan kami gambarkan dalam (*'caycap?'*) tadi. Dalam prosentase ini angka kumulatifnya. Deposito ada 46 triliun, obligasi 259 triliun, dan sebagainya. Total 431 triliun. Ini aset alokasinya, prosentasenya seperti yang kami gambarkan di depan. Kemudian hasil investasinya dan YOI nya.

Kemudian masing-masing kalau kita lihat per instrumen deposito per 31 Desember komposisinya yang di halaman 56. Ini depositonya ada dimana? Depositonya kami kelompokkan menjadi tiga, yaitu BUMN, BPD, dan swasta. Yang paling besar adalah di BPD, yaitu sebanyak 66 persen atau 31 triliun. Kemudian di Bank BUMN sebanyak 30 persen atau 14 triliun, dan di bank swasta sebanyak 2 persen atau 1 triliun. Kategorinya, ini kategori penempatan kita, ini penjelasan yang paling kiri ya.

Saya teruskan, untuk obligasi. Tadi sudah saya paparkan dari beberapa instrumen. Deposito sudah. Sekarang kita lihat obligasi. Obligasinya dimana, dan bentuk obligasi apa? Ini ada di halaman 57, dimana terbanyak adalah yang warna biru, itu 86 persen atau sebanyak 223 triliun. Itu di obligasi Pemerintah. Ini tentunya seiring dengan regulasi yang ada tadi, POJK I (satu).

Kemudian obligasi BUMN yang diterbitkan oleh BUMN itu sebanyak 13 persen, atau 34 triliun. Yang di swasta, obligasi yang diterbitkan swasta, 1 persen, bahkan kurang dari 1 persen.

Kemudian untuk saham ini kita lihat investasi saham kita tadi totalnya ada sebanyak 82 triliun. Itu ada dimana saja? Ini *'caycap?'* ini menggambarkan industrinya. Jadi yang terbanyak adalah di industri keuangan yang warna biru 31 persen, kemudian industri infrastruktur dan utilitas, Aneka Industri 20 persen, dan sebagainya.

Kemudian penempatan dana investasi portofolio saham, jadi penempatan investasi BPJS Ketenagakerjaan di saham, ini 98 persen adalah LQ 45. Jadi, Bapak/Ibu, yang saham ini kalau di *market* pengelompokkannya ada 3 (tiga):

1. Yang paling atas itu kelompok LQ 45. Ini adalah dari perusahaan-perusahaan besar, kapitalnya besar, masuk di kelompok LQ 45;
2. Sering sekali disebut *second layer*. Ini kriterianya lebih rendah lagi. Contohnya, ada indeks Kompas, indeks saham seratus, dan sebagainya;
3. *Third layer*. Ini saham-saham yang dari perusahaan yang masih baru *go public* dengan ukuran fundamental *capital*-nya rendah. Ini yang seringkali kita dengar saham-saham gorengan di lapis ketiga ini. Dan kita di BPJS Ketenagakerjaan tidak ada saham di lapis ketiga. Bahkan di lapis kedua pun tidak ada. Semua saham BPJS Ketenagakerjaan ada di lapis satu, yaitu di LQ 45. Itu sebanyak 98 persen itu ada di LQ 45, dan sisanya itu sudah

keluar dari LQ 45. Dulunya awalnya LQ 45. Jadi boleh dikata semua saham portofolio investasi BPJS Ketenagakerjaan adalah saham LQ 45 yang fundamentalnya kuat.

Kemudian di pojok bawah yang kami lingkari merah ini, ini menunjukkan hasil investasi di saham di tahun 2019. Kita investasi di saham itu menghasilkan *return* 7,63 persen. Sekarang 7,63 persen ini tinggi atau rendah? Kita bandingkan dengan kinerja indeks, *Jakarta Composite Index*, atau IHSG, itu ternyata kenaikannya 1,7 persen, sementara kita menghasilkan 7,63 persen, jadi di atas dari indeks. Kenapa, karena saham kita ada 98 persen itu di LQ 45.

Kemudian ini kami gambarkan semua saham yang kita miliki, ini kami buka. Ini di halaman 59. Inilah saham-saham yang saat ini dipegang oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kita bagi dua, LQ 45 dan non LQ 45. LQ 45 jumlahnya ada 25 saham, atau 25 *emittance*. Kalau Bapak/Ibu baca disini mayoritas adalah saham-saham BUMN.

Kemudian paling kanan adalah non LQ 45. Ini dulunya LQ 45, tapi karena ada penurunan *performance* setiap tahun bursa itu melakukan evaluasi, sehingga yang tidak memenuhi kriteria dikeluarkan dari LQ 45. Sehingga saat ini kita masih pegang ada 9 saham non LQ 45, jumlahnya 2 persen. Tetapi saham non LQ 45 ini bukan saham lapis kedua atau lapis ketiga yang saya sebut tadi, masih lapis yang pertama. Hanya karena penurunan kinerja. Diantaranya yaitu Astra Agro Lestari, Garuda Indonesia, Krakatau Steel, Perkebunan London-Sumatera, Salim, Summarecon, kemudian Timah, Waskita Betok, kemudian Wijaya Karya Beton. Ini meskipun non LQ 45, tetapi fundamentalnya itu sangat masih kuat, dan terbukti perusahaan tersebut masih memberikan deviden yang cukup bagus di halaman 61 berikutnya.

Halaman 60 ini kami berikan *historical* dari 9 saham yang non LQ 45 kenapa menjadi non LQ 45, kapan mereka dikeluarkan atau keluar dari LQ 45. Ini kebijakan dari Bursa Efek.

Halaman 61. Ternyata walaupun dari saham-saham yang non LQ 45 tersebut memang masih memiliki fundamental yang kuat, dan terbukti mereka membagikan deviden yang cukup signifikan di tahun 2019 ini. Di halaman 61 kami paparkan jumlah deviden yang mereka bagikan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Berikutnya kinerja investasi yang terkait dengan Reksadana. Ini di halaman 62. Reksadana kita 78 persen adalah Reksadana saham. Kemudian Reksadana ITF ada 16 persen, Reksadana Indeks 1 persen, Reksadana Pendapatan Tetap 2,16 persen, dan Reksadana Campuran 1,9 persen. Ini pertimbangan penempatan pada instrumen ini kita lakukan dengan analisa kinerja manajer investasi dan Reksadana melalui metode *scoring* dari aspek kuantitas maupun kualitas. Mayoritas penempatan pada Reksadana Saham.

Dan manajer investasi pengelola Reksadana ini yang di BPJS Ketenagakerjaan adalah Reksadana. Manajer investasi dengan reputasi nama yang baik. Tidak ada satupun manajer investasi yang di *freeze* atau dibekukan oleh OJK. Kemarin OJK mengeluarkan daftar Reksadana dan manajer investasi yang dibekukan, itu tidak ada satupun yang manajer investasi ataupun reksadana milik BPJS Ketenagakerjaan.

Isu-isu yang berkembang terakhir ini yaitu ramainya soal saham gorengan, ini mengganggu citra pasar modal Indonesia. Beberapa perusahaan pelaku pasar modal asing sering juga menanyakan kepada kami kenapa ini bisa terjadi, dan dampaknya seperti ini, dan sebagainya. Kemudian BPK sebut kinerja BPJS Ketenagakerjaan sudah cukup baik. Kemudian BP Jamsostek memastikan dana kelolaan investasi aman. Ini kami kemarin mengeluarkan rilis bahwa tidak ada saham gorengan. Dan saham-saham yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah lapis pertama, LQ 45 seperti saya sampaikan tadi. OJK dan DJSN sepakat mengawasi kinerja BPJS Ketenagakerjaan.

Ada juga tentang awasi investasi BP Jamsostek, KPK tidak temukan kerugian. Jadi, Bapak/Ibu, ini dengan KPK kami melakukan kerjasama. Jadi pada waktu tahun-tahun pertama kami dilantik kami menyadari bahwa kami memiliki tanggungjawab dan amanah yang begitu besar mengelola dana milik masyarakat, milik para pekerja, oleh karena itu perlu penguatan tata kelola pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan.

Pengawasan sudah cukup lengkap. Dari eksternal ada dari BPK, OJK, kemudian DJSN, kemudian akuntan publik. Dari internal juga ada satuan pengawas internal, kemudian dewan pengawas. Kami merasa belum cukup, kita lengkapi, yaitu kerjasama dengan KPK. Kami datang untuk membuat MOU. Akhirnya kita tandatangani MOU tersebut untuk penguatan integritas badan dan integritas internal karyawan BPJS Ketenagakerjaan. Kita melakukan sosialisasi bersama, edukasi bersama. Dan saat ini sudah kita latih, kita didik 700 karyawan kita untuk menjadi duta integritas, atau kita sebut 'Tunas Integritas'. Merekalah yang menyebarkan budaya berintegritas, dan ikut mengawasi lingkungan disekitarnya.

Kemudian tidak cukup dengan itu, kami datang kembali ke KPK untuk sama-sama mengawasi operasional dari investasi kita. Jangan sampai kita melakukan investasi membuat sebuah kebijakan ternyata salah. Karena kalau kita lihat sendiri, kami internal melihat sendiri, mungkin tidak jeli, tapi kalau pihak luar melihat mungkin akan lebih jeli. Itulah yang dilakukan oleh KPK, dan KPK sepakat meminta untuk melakukan kajian regulasi jaminan sosial, kajian operasional investasi di BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka untuk penguatan operasional di BPJS Ketenagakerjaan.

Jadi demikian, Bapak/Ibu, yang kami sampaikan.

Terus satu lagi, ada juga rilis dari Ketua Dewan Pengawas kita bahwa BPJS Ketenagakerjaan masih tetap tumbuh meskipun dalam kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian.

Kesimpulannya adalah, bahwa di dalam pengelolaan aset jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan telah dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, keamanan dana, hasil yang optimal untuk menjamin kelangsungan program jaminan sosial.

Untuk pengelolaan aset jaminan sosial dan BPJS Ketenagakerjaan, jadi ini asetnya badan dan asetnya peserta, itu ada serangkaian regulasi, dan kami telah sesuai dengan ketentuan regulasi tersebut.

Kemudian 2017-2018 telah dilakukan audit BPK dengan Wajar Tanpa Modifikasi (WTM). 2014-2018 audit eksternal, audit KAP, juga memberikan Wajar Tanpa Modifikasi. Dan demikian juga dari KPK memberikan penghargaan.

Demikian yang bisa kami paparkan, Bapak/Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya.

Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Kami kembalikan kepada Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Dirut BPJS Ketenagakerjaan.

Dari empat yang kita minta komprehensif jawabannya. Tentu ada banyak catatan dari Bapak/Ibu sekalian Anggota DPR RI yang terhormat. Satu jam kurang lebih Pak Dirut menyampaikan paparannya itu. Dari empat poin ini saya lihat tiga bagian awal kurang lebih setengah jam, bagian terakhir setengah jam, karena itu pasti yang menjadi catatan banyak orang. Biar juga semuanya *clear* disini, kita juga nanti tanya jawab juga dengan terbuka, Pak Dirut, sehingga nanti berbagai cerita yang berkembang diberbagai media ini bisa kita luruskan disini untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan para peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk itu kami mulai dengan pertanyaan dari Anggota Dewan yang terhormat. Saya mulai dari Pak Obon, kemudian nanti Pak Haruna, nanti bersiap-siap juga nanti Ibudan seterusnya.

Silakan Pak Obon yang terhormat.

F-GERINDRA (OBON TABRONI):

Bismillaahirrohmaanirrohiim.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Terima kasih Pimpinan.

Bapak-bapak Direksi dari BPJS Ketenagakerjaan yang saya hormati dan banggakan,

Pertama tentu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih program vokasinya sudah mulai berjalan, sudah mulai terasa, dan mudah-mudahan program vokasi tersebut bisa terus terselenggara sehingga lebih banyak sahabat-sahabat kita yang ter-PHK bisa mendapatkan manfaat dari program vokasi tersebut kedepannya tentu.

Yang kedua, beberapa waktu yang lalu muncul pemberitaan di media, salah satunya adalah di Kumparan yang sebagian mungkin sudah membaca itu semua. Salah satunya di Kumparan itu menyebutkan, saya minta klarifikasi untuk itu, bahwa judul beritanya adalah 'Carut Marut Investasi BPJS' yang beberapa hari kemudian *link* di kumparan itu sempat hilang. Saya tidak tahu sekarang cek ada atau tidak, tapi kan aneh saja ada berita carut marut itu kemudian *link*-nya itu bisa hilang. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu.

Kumparan menyatakan bahwa sumbernya dari BPK menemukan 14 temuan dari 19 permasalahan yang ada yang ditemukan oleh BPK. 14 temuan tersebut tentunya banyak merugikan BPJS sendiri, baik dari pengelolaan atau yang lain-lain. Saya ingin dalam pertemuan kali ini bisa dijelaskan secara konkrit temuan dari BPK yang menimbulkan *potential lost* itu apa saja. Kemudian yang kedua, apa upaya-upaya kalau memang informasi dari Kumparan tersebut betul.

Dimuat juga bahwa ada potensi kerugian yang sampai 13 triliun. Saya tidak tahu ini potensi kerugiannya dimana. Kita kan sekarang kadang-kadang sensitif juga melihat persoalan di PT Jiwasraya, kemudian ada indikasi juga di ASABRI, ini jangan-jangan kemudian beberapa BUMN lain jangan-jangan hal tersebut juga terjadi di BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga kita minta adanya kepastian apakah hal tersebut terjadi atau tidak tentang *potential lost* tadi.

Kemudian yang ketiga, kalau tadi disampaikan tentang isu-isu yang berkembang yang sempat dalam *slide* halaman 63, seolah-olah isu-isu yang berkembang itu kan selalu mengarah kepada hal-hal yang positif. Di halaman 63 tentang ramai soal raham gorengan, kemudian BPK sebut kerja BPJS Ketenagakerjaan sudah cukup baik, dan yang lain-lain. Saya melihat seolah-olah ini yang diambil yang di *crop*, atau *link* yang ditampilkan disini itu semua *link* yang bagus.

Dan tidak melihat tanggal. Ada yang sampai *link* tersebut dimuat dari tahun 2013 misal, maksain banget itu. Berita di tahun 2013 di Liputan6.com paksa-paksain sehingga seolah-olah BPJS Ketenagakerjaan ini bagus. Terus ada berita juga April 2018 dari pengamat investasi BPJS Ketenagakerjaan sudah sesuai. Kemudian ada berita juga di tahun 2019. Itu yang di halaman 63.

Kalau dilihat dari sekilas tanpa lihat tanggal inikan semuanya bagus. Tapi kalau diperhatikan tadi saya sampaikan tanggal-tanggalnya sudah 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, atau tahun yang lalu masih cukup dimuat. Tidak ada berita-berita yang seolah-olah kaitan tadi dengan Kumparan berita-berita yang negatif.

Kemudian satu lagi di halaman 55, kinerja investasi portofolio, investasi per 31 Desember 2019. Disinikan jelas tertulis berapa deposito, kemudian obligasi, saham, dan yang lain-lain. Persen, alokasi, kemudian hasil investasi, dan semua tercantum di halaman 55.

Saya hanya ingin bertanya, dari alokasi dana diberikan atau tidak targetan. Misal, targetan keuntungan untuk saham kemudian berapa persen, untuk deposito berapa persen, dan yang lain-lain. Sehingga kalau dilihat dari hasil ini bagus, tapi kalau dilihat targetan kan

belum tentu. Saya mohon tampilkan juga/disampaikan juga di halaman 55 ini target dan realisasi, sehingga muncul angka-angka tadi.

Baik, Pimpinan, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

Billaahitaufig Wal Hidaayah

Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima komunikasi Pak Obon.

Untuk Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk diperhatikan, Pak Obon ini adalah dari wakil daerah yang mayoritasnya itu buruh semua, jadi pasti sensitif kalau soal BPJS Ketenagakerjaan. Itu yang semua pesertanya buruh, makanya pasti akan sangat serius soal ini.

Berikutnya Pak Haruna. Bersiap-siap Ibu Krisdayanti.

F-KB (H. HARUNA, M.A., M.B.A):

Bismillaahirrohmaanirrohiim.

Terima kasih Pak Ketua.

Yang kami hormati, Pak Ketua dan Teman-teman, Bapak Dirut BPJS dengan rombongan,

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Pertama-tama yang kami ingin kupas disini tentang penempatan dana di Danareksa, ini 9,3 triliun Pak. Siapa yang akan menjamin kalau Danareksanya *pailit* atau bagaimana? Itu sekedar pertanyaan.

Ada masukan. Apa bisa diusahakan 1.554 BPR di Indonesia, sementara BPRS 164 unit. Kalau Bapak tempatkan dananya disini 2 miliar atas nama dirut satu, 2 miliar atas nama dirut keuangan, atas nama dewas, kemudian atas nama pengawas internal 6 orang. Itukan ada jaminan dari LPS 2 miliar, jadi resiko untuk terjadinya *closed* keuangan tidak ada. Yang penting jangan Bapak simpan lebih dari 2 miliar. Karena 100 persen BPR punya LPS, kenapa tidak dipikirkan. Tolong kalau sudah hadir disini yang membidangi penempatan dana.

Sebab sekarang Bank Indonesia juga pasang aturan lagi untuk menghidupkan BPRS yang *notabene* BPR dan BPRS ini. Ini yang menyentuh rakyat Pak. Karena kalau bank pemerintah, bank plat merah, atau bank swasta besar, itu terlalu rumit pengeluarannya. Dikasih neraca besar katanya "sudah banyak uang anda". Dikasih neraca kecil tidak mampu mengembalikan. Tiga kali ganti neraca itu jual celana dalam.

Ini tidak ada resikonya Pak. Ini jumlahnya cuma 20 triliun, Bapak bisa pikirkan. Terbantu juga dia menghadapi peraturan Bank Indonesia yang harus punya modal setor 12 miliar. Kalau terjadi resiko langsung Pemerintah bayar, karena ada undang-undangnya. Danareksa ini yang saya tanyakan ada tidak undang-undangnya kalau Danareksanya lari?

Kalau misalnya Bapak terlanjur menempatkan dana di SBN sebanyak 60 persen, kenapa Bapak tidak ambil acuan terendah. Karena di PP 55 acuan terendah menempatkan dana BPJS Ketenagakerjaan terendahnya 30 persen, tertingginya 50. Itu pertanyaan ketiga Pak.

Kalau misalnya sudah tidak ada dananya yang bisa di geser untuk menyelamatkan BPR di Indonesia dengan adanya regulasi Bank Indonesia yang mengharuskan modal setor 12

miliar. Kemungkinan nanti akan tutup BPR sampai 80 persen di Indonesia. Paling tinggi 20 persen yang mampu memenuhi standar modal setor. Ini yang Bapak musti pertimbangkan betul-betul. Karena ini ada jaminannya Pak, 2 miliar itu Pemerintah langsung bayar.

Saya kira itu Pak sekedar masukan. Kalau tidak punya dana lagi, di geser dari prosentase terendah. Karena di PP 55 ditempatkan dana terendah 30 persen, dan tertinggi 50 persen, untuk penempatan demi keamanan uang pekerja imigran.

Saya kira itu Pak tiga pertanyaan. Ini sangat luar biasa untuk membantu rakyat Indonesia, karena BPR itu betul-betul bank rakyat.

Saya kira itu Pak, sekian, terima kasih Ketua dan teman-teman.

*Walloohulmuaafiq Illaa Aqwamiththooriq
Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih yang terhormat Pak Haruna.

Berikutnya yang terhormat Ibu Krisdayanti. Bersiap-siap Pak Imam Suroso.

F-PDIP (KRISDAYANTI):

*Bismillaahirrohmaanirrohiim.
Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.*
Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Pimpinan dan juga para mitra

Dan terkhusus Bapak Dirut BPJS, terima kasih tadi sudah nyamperin kesini salaman. Terima kasih Bapak.

Sebelumnya, saya sangat mengapresiasi tadi bahwa bagaimana BPJS Kesehatan merespon dan menyikapi dampak disrupsi. Karena saya tidak tahu tidak semua tenaga kerja kita itu melek teknologi, jadi secara fisik dan juga secara elektronik memang harus dimaksimalkan keduanya.

Setelah melihat pemaparan dan mendengar apa yang sudah Bapak tadi sampaikan, pertama yang sangat menarik untuk saya ingin sampaikan kepada Bapak adalah upaya perlindungan pekerja migran Indonesia, yaitu upaya edukasi publik melalui kegiatan sosialisasi, advokasi, dan juga edukasi.

Yang ingin saya tanyakan, edukasi ditempatkan setelah advokasi. Apakah ini hanya sekedar nama atau nama seperti apa. Dan yang saya pahami bukankah sesungguhnya kegiatan sosialisasi merupakan implementasi atau cara yang dilakukan untuk melakukan edukasi. Bagaimana sesungguhnya pelaksanaan upaya edukasi publik yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan pada kenyataannya, serta bagaimana BPJS melakukan koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam mewujudkan upaya ini, khususnya peran seperti apa yang BPJS Ketenagakerjaan sampaikan dalam upaya ini?

Selanjutnya mengenai program vokasi dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Ada beberapa hal juga yang berkaitan dengan hal ini, saya mohon penjelasannya, soal skema Indonesia bekerja bahwa ada 33 kantor cabang di 11 kantor wilayah BP Jamsostek yang melakukan kegiatan pelatihan berbentuk *piloting* vokasi. Ini kita semuanya pasti teman-teman di Komisi IX setuju dengan saya bahwa sangat-sangat layak dan patut untuk di apresiasi, karena menjadi banyak jalur yang dapat dipakai oleh masyarakat untuk menyiapkan diri melalui kira-kira *skill* apa yang mereka pantas dan kompeten agar dapat bersaing.

Namun kembali lagi bagaimana relasi dan koordinasi BPJS Ketenagakerjaan dengan Kementerian Ketenagakerjaan, yang mana Kementerian Ketenagakerjaan yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menyiapkan atau mengembangkan *skill* tenaga kerja melalui bentuk-bentuk pelatihan seperti vokasi.

Selain itu, mengenai jaminan sosial tenaga kerja itu sendiri apakah peserta vokasi dari sejak mengikuti pelatihan sudah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program jaminan BPJS Ketenagakerjaan?

Itu saja dari saya, terima kasih.

Wabillaahitaufiq Wal Hidaayah

Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Krisdayanti.

Berikutnya yang terhormat Pak Imam Suroso. Bersiap-siap Pak Rahmad Handoyo.

F-PDIP (Drs. H. IMAM SUROSO, S.H., M.M):

Terima kasih.

Pak Ketua/Pak Melki 'Gueslow', dan Teman-teman Komisi IX;
Yang saya hormati, Pak Dirut BPJS Ketenagakerjaan/Pak Agus.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Jadi apa yang disampaikan Mbak Krisdayanti tadi betul Pak, sosialisasi, advokasi, itu bagus, itu perlu giatkan untuk 2020. Makanya Pak Agus Susanto tadi dapat apresiasi dari Mbak KD, setuju saya.

Kemudian yang dari saya. Berdasarkan *slide* nomor 4, 5, paparan BPJS Ketenagakerjaan disebut bahwa hingga akhir tahun 2019 jumlah PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan adalah sebanyak 544 ribu orang, yaitu meningkat dari 2017 (445,6 persen).

Kemudian yang perlu saya tanyakan, hingga saat ini berapa total PMI yang belum mengikuti program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan, kira-kira sampai berapa sampai dengan saat ini? Terus, bagaimana upaya maupun strategi atau target BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikutsertakan petugas atau pekerja migran Indonesia untuk mengikuti BPJS Ketenagakerjaan?

Kemudian yang pada *slide* 6 paparan BPJS disebutkan bahwa pada tahun 2019 jumlah PMI yang mengajukan klaim kecelakaan kerja itu 131. Jadi tinggi. Kalau tahun 2018 cuma 15, namun 2019 naik jadi 131 orang. Naiknya itu 115. Tolong Pak Agus Susanto dijelaskan kira-kira kasus apa saja yang terjadi pada PMI yang dimaksud. Terus, rata-rata manfaat yang diterima oleh PMI dari klaim JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) tersebut berapa Pak? Dan tolong dijelaskan juga kondisi dengan jaminan kematian juga. JK berapa, JKK berapa? Ini kayaknya penting untuk kita dalam.

Kemudian yang kedua pada *slide* 54, BPJS Ketenagakerjaan disebut bahwa per 31 Desember 2019 jumlah dana BPJS Ketenagakerjaan yang diinvestasikan mencapai 431,67 triliun. Jumlah tersebut dua kali lebih banyak dari total dana BPJS Ketenagakerjaan yang diinvestasikan per Desember 2015, yaitu sekitar 187,2 triliun. Dari 2015 (187 triliun), 2019 (431 triliun).

Pertanyaannya, Pak Agus, dalam catatan di beberapa media disebutkan bahwa imbal hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan mengalami penurunan menjadi 22,41 triliun, padahal pada tahun sebelumnya imbal hasil investasi mencapai 27,28 triliun, artinya turun 5 triliun. Tolong dijelaskan Pak Agus turunnya kayak apa, nanti tolong dijelaskan. Apa situasi, atau memang sedang *drop*. Atau kata Pak Agus tadi industri 4.0. Nanti mohon saya dijelaskan. Terus apa yang menjadi penyebab dari menurunnya imbal hasil investasi tersebut. Apa karena makro ekonomi, kondisi pasar, atau kondisi lainnya?

Kemudian produk investasi BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk apa? Yang mengalami penurunan paling signifikan di hasil investasi, jadi apa saja yang mengalami penurunan-penurunan itu sampai banyak itu, sekitar 5 triliun? Terus dengan kondisi pasar dan ekonomi global yang kurang menentukan saat ini, menurut Pak Agus investasi dalam bentuk apa yang paling aman dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan? Apa yang kira-kira menguntungkan? Semacam BUMN kan menargetkan keuntungan, kemudian keuntungan itu untuk kepentingan masyarakat pula. Jangan sampai mengalami kerugian. Seperti yang disampaikan teman-teman tadi, kayak Jiwasraya, untuk *banca'an*, untuk pesta, yang merugikan negara. Terus ini BPJS saya ingin dengar Pak Agus langsung bagaimana perkembangan kerjasama BPJS Ketenagakerjaan ini yang *go international* kerjasama dengan BNP2TKI yang sekarang BP2MI.

2MI atau 2ML itu Pak Ketua? Bukan ML ya. Itu sulit rakyat itu. Yang benar itu BP-PMI. Ini targetnya kan PMI (Pekerja Migra Indonesia). Kalau ML itu memang '*making love*' tidak jelas itu, itu perlu dirombak itu, menyulitkan masyarakat calon TKI sehingga mereka itu dibohongi terus. Karena sulitnya ada dua. Kalau dulu BNP2TKI jelas, 'TKI' jelas. *Iki* kan 'PMI', diganti 'ML', itu tidak jelas. Itu komunikasikan lagi itu Pemerintah nanti.

Terus kemudian, kemarin kan sudah melakukan sosialisasi bagus itu BPJS Ketenagakerjaan bersama Anggota DPR. Bagus itu. Perusahaan-perusahaan juga masuk, terus menyadari dijelaskan.

Kemudian apakah program-program 2020 nanti masih dijalankan terus atau malah di *stop*? Saya ingin mengerti kinerja 2020 ini oleh Pak Agus Susanto.

Ini sebenarnya masih banyak, tapi sementara ini dulu. Nanti kita pendalaman lebih lanjut.

Sekian, terima kasih Pak Ketua.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Imam Suroso.

Berikutnya yang terhormat Pak Rahmad Handoyo. Bersiap-siap Pak Yahya Zaini.

F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI., MM):

Bismillaahirrohmaanirrohiim.

Pimpinan, teman-teman sekalian, Pak Dirut dan seluruh jajaran yang saya hormati,

Pertama tentu saya senang pada kesempatan rapat hari ini saya cukup mendapatkan gambaran yang komprehensif. Memang jujur ini baru dapat silaturahmi pertama kita ketika kita sudah membaca *mapping*. Kalau dari sisi pembiayaan ataupun dana yang ada di Bapak saya sudah cukup kita angkat topi lah.

Jadi ada pikiran-pikiran di luar sana bahwa suasana bathin bangsa kita ini seolah-olah yang manajer investasi ini seenaknya sendiri. Tapi kalau melihat portofolio yang disampaikan

disini saya kira LQ 45 yang menjadi kedepankan. Dan prestasi kerjasama dengan KPK juga sudah ada positif, artinya tanda petik bahwa tidak ada suatu hal yang perlu dikhawatirkan. Juga BPK.

Tapi juga kita harus tetap mewanti-wanti. Bahwa Bapak inikan adalah manajer investasi, duitnya rakyat, duitnya umat pekerja, selalu asas kehati-hatian yang selalu ingin kita sampaikan kepada Bapak. Bukan berarti apa-apa, kita saling menjaga. Kami mendapatkan amanah, Bapak juga begitu mendapatkan amanah yang begitu besar di mata para pekerja.

Ada satu yang saya kritisi disini masalah isu kekinian. Bangsa kita lima tahun ke depan inikan masalah SDM, SDM tentunya mau arahnya tentu adalah kepada kesejahteraan. Saya menyentil, vokasi disinikan cuma sedikit, mestinya ada potensi yang bisa dikembangkan. Kenapa, beasiswa pekerja, anaknya yang mendapatkan beasiswa, bukan pekerja langsung. Artinya apa, kalau Bapak hanya sebatas mengandalkan kepada vokasi latihan di luar formal kepada peserta saya kira itu bagus, cuma efek geloranya untuk ikut berkontribusi membangun ekonomi melalui dana Bapak, pekerja ini, kurang maksimal Pak. Loh kok iya, iya Pak. Pekerjaanya cuma sedikit, yang pensiun itu masih terbatas.

Saya minta coba dikaji dari sisi peraturannya seperti apa. Kalau beasiswa saja bisa tidak langsung kepada pekerja. Seandainya istrinya bekerja, bapaknya masih menganggur, suaminya masih menganggur, kenapa tidak kita ikutkan. Anaknya yang mustinya sudah lulus SMA belum kerja kenapa, padahal bapaknya adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tapi karena, mohon maaf, karena ekonominya untuk melanjutkan kuliah hanya untuk biaya sambung hidupukupnya hanya untuk biaya keseharian, untuk melanjutkan biaya kuliah memungkinkan belum bisa. Mengapa tidak kita coba desain untuk vokasi.

Saya juga belum punya gambaran, cuma berapa Pak 2.000 peserta itu? Bapak bertriliun-triliun mengalokasikan itu, larinya juga akan ke peserta maupun ke pekerja. Saya kira apalagi Pemerintah saat ini tahun kemarin 1.000 BLK komunitas. Belum Pemerintah sudah stabil, sudah punya. Di daerah maupun di pemerintah pusat juga sudah ada BLK-BLK. Belum tahun 2000 ini ada 2.000 BLK. Cobalah kita pikirkan desain yang baik bagaimana.

Memang tetap harus asas kehati-hatian, saya setuju. Kalau alokasikan anggaran dana operasional nanti digunakan dalam rangka untuk kegiatan itu ya kita harus ke asas kehati-hatian. Targetnya *output*, bukan banyaknya. Syukur *output*-nya bagus, targetnya luar biasa banyak.

Suami/istri atau istrinya kerja, suaminya ada yang tidak kerja, banyak di tetangga-tetangga saja. kebetulan di daerah saya, Boyolali, *deso/kampung*, itu banyak keluarganya yang hanya sebatas kerja tapi anak-anaknya juga masih belum bisa. Ini perlu kita angkat. Ini apakah nanti perlu minta persetujuan kepada Menteri Keuangan, apakah minta payung hukum Kementerian Tenaga Kerja, saya tidak perlu. Ataukah cukup peraturan direksi, karena bisa jadi dimasukkan dana operasional. Saat ini saya juga minta berapa besaran biaya operasional untuk kegiatan apa saja. Saya sangat positif *thinking* kepada Bapak, karena Bapak memang tupoksnya dalam rangka untuk mengelola anggaran, tapi juga mengambil peserta-peserta calon peserta belum ikut peserta BPJS.

Di Boyolali banyak pabrik, tiap tahun ratusan miliar, sudahkah masuk? Kami sebagai salah satu *speaker* ikut juga berkontribusi menyuarakan "ini loh manfaat tupoksnya dan asas manfaat BPJS Ketenagakerjaan, begitu banyak meng-*cover*. Ada kematian, kesehatan juga sudah disana. Kemudian juga ketika ada pensiun, ketika ada PHK". Ini harus kita gelorakan.

Saya mengusulkan kepada forum yang terhormat ini agar kita bersinergi. Di satu daerah, atau kami yang di dapil kami, atau teman-teman yang ada disini, ikut berkontribusi menyumbang pikiran kepada teman-teman bagaimana "loh ini manfaat BPJS luar biasa". Kalau ansih kalauBapak memang jagonya. Nanti ke depan barangkali kita juga akan mencoba memberikan satu masukan berapa peserta dana pekerja ini, dan berapa yang belum masuk. Ini justru potensi yang belum tergarap, belum tersentuh, walaupun *day to day* Bapak memang sudah pekerjaannya menganalisa, mengalokasikan bagaimana strategi untuk narik calon

peserta ini. Tapi kan kami belum punya data, walaupun memang pada siang hari ini belum dibahas pada hari ini.

Jadi itu, Pak Dirut, bahwa saya minta berapa besaran dana yang untuk kegiatan operasional. Untuk seminarkah, untuk kegiatankah. Jangan sampai saya mendengar sayup-sayup disana, ketika BPJS Kesehatan Pak, ketika mereka berkeluh-kesah kesulitan dana, tapi mereka mengundang dirut-dirut rumah sakit, manajemen rumah sakit, tidur di hotel berbintang, pulang dikasih saku 2-3 juta. Apa mereka tidak menangis rakyat. Kalau disini likuiditasnya memang luar biasa. Yang likuiditasnya begitu saja kinerjanya operasional manajemen menggunakan alokasi untuk kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Dan itu yang melaporkan ke saya itu adalah manajemen rumah sakit. Kalau seperti inikan jadi pertanyaan.

Kalau seperti di sini saya serahkan kepada teman-teman yang ada disini. Saya percaya teman-teman disini. Cuma sekali lagi Pak, terkait dengan anggaran pembiayaan ataupun dana yang ada di rakyat ini, benar-benar asas kehati-hatian Pak. Walaupun saya tahu, kita percaya, sangat *haqqul yaqin* apa yang disampaikan itu sesuai. Tentu saya juga tidak mungkin kausaham itu tidak rugi, pasti ada yang jeblok juga. Tapi jangan sampai suatu ketika *na'udzu billaah*, jangan sampai terjadi suatu hal yang jatuhnya luar biasa hingga potensi kerugiannya. Saya tidak ingin mendengar, dan saya akan terus berdo'a supaya Bapak menjaga amanah harta rakyat dan dunia pekerja itu.

Yang kedua berikutnya Pak, ada pertanyaan dari teman-teman yang tadi bisik-bisik itu kenapa alasannya kok BPD berkontribusi yang paling besar dibandingkan bank BUMN atau bank yang lain. Dari sisi apanya saya juga tidak mengerti.

"Itu BPD paling besar kenapa Pak Rahmad"

"Nanti kita coba tanyakan sajalah"

Gede banget itu dibandingkan dengan yang lain.

Kalau memang sama-sama untuk negara, untuk keamanan, itu manajemen hak sepenuhnya pada teman-teman yang lain.

Dan terakhir, Pak Dirut, selain ada vokasi, CSR Pak, walaupun CSR itu sudah ada peraturannya Menteri Keuangan. Tapi kan kalau itu dialokasikan di sisi kegiatan operasional, atukah dalam bentukatau bentuk kegiatan yang lain, saya kira dalam rangka untuk masyarakat lebih mengenal terhadap Jamsostek mengapa tidak. Yang penting untuk kebaikan kinerja masyarakat, kinerja manajemen. Dan teman-teman juga semakin dikenal, bahwa para pekerja itu benar-benar suatu kebutuhan masuk ke BPJS Jamsostek itu.

Jadi yang paling penting itu menanamkan bahwa BPJS itu *need*, kebutuhan, sebagai rasa untuk bertanggungjawab negara untuk melindungi hak-hak para pekerja. Ini menjadi tanggungjawab Bapak. Dan kami disini sebagai mitra kerja bagaimana saling *support* agar tupoksi Bapak sesuai dengan yang kita harapkan.

Begitu yang bisa saya sampaikan, Pimpinan, terima kasih.

Selamat sore.

Merdeka!

KETUA RAPAT:

Merdeka!

Sesuai jadwal kita tadi sampai Jam 15.00, saya perpanjang sampai Jam 16.00.

(RAPAT: SETUJU)

Berikutnya yang terhormat Pak Yahya Zaini. Bersiap-siap Pak Darul Siska.

F-PG (M. YAHYA ZAINI, S.H):

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian.

Pimpinan yang saya hormati;
Dirut BPJS Ketenagakerjaan beserta jajaran,

Kalau teman-teman di awal tadi memulai dari *hot issue*, seperti disampaikan Pak Obon dan Pak Haruna, saya mulai dari *low issue* dulu.

Pertama saya memberikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan, karena belum setahun program vokasi ini sudah hampir 50 persen lebih yang dari pendaftar kepada realisasi, ada sekitar 2.000 yang sudah dijangkau. Kemudian ada 44 cabang dari 11 kantor yang sudah melaksanakan program vokasi. Saya kira ini penting, kalau bisa terus di dorong, karena memang tingkat pengangguran kita kan tinggi Pak. lulusan SMK itu sebagian besar juga tidak terserap di lapangan kerja, karena model pendidikannya masih lebih banyak teori daripada praktek. Kami berharap agar vokasi yang dilakukan oleh BPJS TK ini lebih fokus.

Pertama, untuk pengembangannya yang menjadi ukuran adalah ke daerah-daerah yang tingkat penganggurannya cukup tinggi. Inikan 44 dari 121 cabang, kalau bisa terus ditingkatkan dengan prioritas daerah-daerah yang tingkat penganggurannya tinggi.

Minggu yang lalu kami dari Komisi IX berkunjung/kunsep ke Maluku. Maluku itu adalah karakteristiknya daerah kepulauan. Tetapi disana pendidikan vokasi yang berorientasi kepada laut sangat kecil Pak. Disana tidak ada sekolah pelayaran Pak, saya juga heran itu. BLK yang ada disana juga tidak ada jurusan yang berorientasi kepada kelautan. Saya berharap vokasi disana dari BPJS JK justru menutupi kekurangan-kekurangan dari lembaga-lembaga yang lain. Pemda sangat berharap Pak. Memang disana kemarin kita dapat informasi ada 400 yang sudah dilatih di Maluku. Memang diarahkan kepada penyiapan tenaga kerja untuk industri gas. Karena disana ada Masela Pak, saya kira cukup bagus. Tapi kalau bisa juga yang kelautan lainnya juga harus diperhatikan.

Untuk daerah lain saya kira seperti ini harus disesuaikan dengan karakteristik daerahnya masing-masing. Jangan sampai *missed leading* nanti. Jadi yang dibutuhkan A yang dilatih B. Kalau kita lihat tadi ada beberapa jurusan yang sudah ditampilkan. Tapi kami ingin lebih mendalami agar lebih spesifik lagi sesuai dengan karakteristik daerah yang bersangkutan.

Kami berharap kalau mungkin dananya ditambah. Tentu ini ada aturannya kan. Tetapi kami berharap, karena sesuai dengan kebutuhan, tingkat pengangguran yang tinggi, kemudian tingkat pertumbuhan ekonomi juga yang masih rendah, pendidikan vokasi menjadi salah satu jalan untuk membantu generasi muda kita lebih banyak terserap di lapangan pekerjaan, terutama untuk pekerja mandiri. Kalau mereka bisa sukses menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, nanti yang mendapat *benefit* kan juga BPJS JK, karena mereka akan menjadi peserta BPJS JK. Saya kira ini sangat baik untuk dikembangkan kedepan.

Yang kedua terkait dengan PMI. Kalau lihat dari perkembangannya ada peningkatan. Tetapi kalau dilihat dari jumlah PMI yang ada disana dengan capaian yang ada sekarang itu masih di bawah 50 persen. Barangkali yang perlu kami tanyakan kira-kira kendala apa saja?

Tadi Pak Dirut menyampaikan ada kendala karakteristik setiap negara itu berbeda sehingga pendekatannya juga berbeda. Adakah kendala dari sisi Pemerintah sebagai regulator. Misalnya Kementerian Tenaga Kerja, sejauhmana efektifitas perwakilan Kemenaker di luar negeri dalam rangka mendukung program ini? Kami perlu menanyakan agar supaya nanti ketika kita raker dengan Kementerian Tenaga Kerja juga bisa kita sampaikan jika ada kendala-kendala yang terkait dengan dukungan dari Kementerian Tenaga Kerja.

Yang kedua berikutnya terkait dengan PMI ini, kami usulkan barangkali bisa memanfaatkan juga 'Program Perisai' di luar negeri. Misalnya di Malaysia, Malaysia inikan banyak sekali warga negara Indonesia yang tinggal disana yang bukan pekerja formal, ataupun yang sudah menetap menjadi warganegara sementara di Malaysia. Kalau perisai ini bisa didayagunakan untuk meningkatkan kepesertaan ini dengan melibatkan warganegara Indonesia yang ada disana saya kira lebih baik. Termasuk mahasiswa, kan banyak sekali mahasiswa yang ada di Malaysia. Kami ingin menanyakan, apakah 'Perisai' sudah ada tidak di negara-negara dimana tujuan buruh migran itu banyak, antara lain seperti Malaysia dan Taiwan.

Bagian yang ketiga terkait dengan investasi. Kami percaya dengan koridor aturan yang begitu ketat, pengawasan yang juga berlapis-lapis, saya percaya investasi di BPJS TK ini sangat *prudent*. Dan terbukti sampai sekarang kita semua berharap terus tidak ada masalah.

Ada beberapa pertanyaan kecil yang ingin saya sampaikan terkait dengan penempatan dana deposito. Memang jumlahnya kecil, yaitu di swasta sebesar 2 persen. Kami ingin menanyakan saja Pak, kira-kira swastanya dimana saja, dan *historical*-nya seperti apa, kapan mulai, dan bagaimana kinerjanya sampai sekarang. Karena disini tidak ada data Pak. Kalau BUMN saya kira jelas bank pemerintah, kemudian PBD juga bank daerah. tadi Pak Rahmad menanyakan kenapa banyak, karena jumlah PBD lebih banyak daripada bank pemerintah. kalau ditempatkannya sedikit-sedikit, jumlahnya banyak, pasti secara akumulatif juga banyak. Ini yang pertama Pak, kami ingin menegaskan kembali yang swasta itu apa saja, bank apa saja, dan kapan mulainya.

Masih terkait dengan investasi. Kalau kita lihat data dari presentasi Bapak tadi halaman 60, khususnya yang di luar LQ 45, ini yang kurang lebih tadi ada 9 ya, tetapi kalau kita lihat *historical*-nya yang paling banyak sejak jaman Bapak ini, ada 5 kalau tidak salah sejak tahun 2016. Sedangkan yang sebelumnya kan sedikit. Tentu ini ada alasannya. Kami ingin mendapatkan penjelasan kenapa di periode Bapak banyak sekali yang swasta non LQ 45 yang mendapatkan alokasi investasi? Ini kami ingin mendapatkan penjelasan saja. Dari segi perusahaannya saya kira perusahaan yang bonafid ini, tetapi kenapa begitu banyak dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ini kami ingin mendapatkan kejelasan saja.

Saya kira itu, Pak Pimpinan, dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.

Wabillaahitaufiq Wal Hidaayah

Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Yahya.

Status pertanyaan dari daerah maupun yang tadi terakhir soal investasi.

Berikutnya yang terhormat Pak Darul Siska. Bersiap-siap Pak Alifuddin.

F-PG (DRS. H. DARUL SISKA):

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Pak Ketua dan teman-teman Komisi IX yang saya hormati;

Pak Dirut BP Jamsostek dan segenap jajaran yang saya hormati.

Pertanyaan pertama Pak, BPJS Ketenagakerjaan "panggil kami BP Jamsostek", kenapa Bapak lebih suka dipanggil 'BP Jamsostek'. Dari segi aspek hukumnya ada soal tidak

Pak kalau dipanggil 'BP Jamsostek'? Supaya kita punya istilah yang sama, supaya kita tidak suka keliru-keliru menyebutnya BPJS Tenaga Kerja atau BPJS Kesehatan.

Itu yang pertama.

Yang kedua Pak, saya kira apresiasi jumlah kepesertaan. Tapi dilihat jumlah pekerja migran kita di luar negeri ini tentu masih jauh. Saya ingin menegaskan lagi pertanyaan Pak Yahya tadi, terobosan apa yang Bapak mau lakukan dalam rangka bisa menjawab atau meningkatkan jumlah kepesertaan pekerja migran kita ini. Kalau bisa lebih besar jumlahnya. Dan kami tahu jumlah ini belum separuh dari jumlah keseluruhan tenaga kerja kita atau pekerja migran kita yang ada di luar negeri. Apa terobosan yang sudah dilakukan Pak?

Kemudian, ini yang kecil-kecil saja Pak, saya pertanyaan yang kecil-kecil saja, kerjasama kelembagaan dengan Kemenlu itu masih diusulkan perpanjangan. Ada soal tidak Pak? Karena ini kaitannya dengan Pemerintah. Kalau ada soal apa masalahnya?

Yang berikut adalah, ada keluhan sedikit, Bapak merasa ada disharmoni diantara undang-undang yang ada. Saya kira Undang-Undang Nomor 17/2008, kebetulan saya ikut membuatnya, memang tidak dicantumkan bahwa harus atau wajib mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan. Saya kira walaupun tidak diwajibkan itu kan juga bukan berarti itu dilarang. Kalau Bapak menunggu perubahan undang-undang mungkin ini agak lama. Saya kira dilakukan pendekatan dengan Menteri Perhubungan ini selesai, karena ini tidak dilarang oleh undang-undang itu, cuma tidak diwajibkan memang.

Yang berikut adalah, tadi disebut tugas BP Jamsostek dalam peningkatan kualitas SDM, nomor 3 itu menyangkut beasiswa sesuai dengan PP. Apa *road map* yang Bapak siapkan untuk pelaksanaan beasiswa ini Pak? Supaya kita sama-sama bisa memonitor kegiatannya, dan barangkali meningkatkan jumlah orang yang bisa menikmati beasiswa yang Bapak sediakan.

Berikutnya adalah soal skema pelatihan Vokasi Indonesia Bekerja. Saya tidak mengerti tahapannya. Kalau tahapannya Bapak dari peserta kemudian orangnya dilatih dulu baru kemudian dilihat perusahaan penyedia lowongan kerjanya, apa tidak terbalik Pak, karena lembaga-lembaga pelatihan yang ada sekarang belum tentu antisipatif terhadap kebutuhan tenaga kerja di masa yang akan datang. Saya kira mungkin Bapak melihat dulu kerjasamanya dengan perusahaan penyedia lowongan kerja, baru kemudian dilatih orang yang diperlukan oleh perusahaan itu.

Yang terakhir, saya juga tidak *su'udzon* terhadap kerja Bapak. Segala sesuatu yang baik tentu kita apresiasi. Tapi menurut saya berita Kumparan ini, karena sekarang lagi musimnya *hoax*, kalau ini tidak betul harus dibantah. Karena penjelasan di Kumparan ini cukup rasional bagi sementara orang yang tidak tahu informasi akurat. Walaupun Pak Irfansyah Utoh sudah membantahnya menurut saya bantahannya itu tidak cukup kuat. Inilah forumnya Dirut BP Jamsostek untuk membantah secara lugas informasi kalau Bapak memang anggap ini tidak benar berita yang ada di Kumparan ini, supaya kepercayaan pekerja kita/tenaga kerja migran kita tidak berkurang sedikitpun kepada BP Jamsostek. Karena Bapak lebih suka dipanggil 'BP Jamsostek'.

Terima kasih, mohon penjelasannya.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Darul.

Berikutnya yang terhormat Pak Alifuddin. Bersiap-siap Ibu Nur atau Ibu Elva.

F-PKS (H. ALIFUDDIN, S.E., M.M):

Bismillaahirrohmaanirrohiim.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.

Terima kasih Pimpinan, teman-teman Anggota Komisi IX.

Bapak Direktur BPJS Tenaga Kerja, atau BP Jamsostek Pak ya.

Nama saya Alifuddin, dapil Kalbar, dari Fraksi PKS, A-453.

Jadi kami apresiasi tampilan laporan Bapak cukup bagus. Dan disini isu-isu yang berkembang pun ditampilkan *alhamdulillah* semuanya baik.

Yang pertama kami ingin bertanya hasil laporan Panja Investasi BPJS Ketenagakerjaan di Komisi IX DPR RI yang tertulis tanggal 22 Agustus 2019. Ada 6 rekomendasi. Jadi pertanyaannya, sudah sejauhmana rekomendasi ini dilaksanakan. Misalnya pada poin 5-6 adanya laporan berkala dari dewan pengawas dan DJSN tentang perkembangan investasi yang ada. Tekait investasi, sebagaimana teman-teman yang lain, kami perlu ketenangan bathin, informasi-informasi yang itu perlu Bapak klarifikasi. Kami tidak ingin BPJS Jamsostek itu seperti Jiwasraya. Jadi dari laporan pansus yang kami baca ini di periode Komisi IX yang lalu memang terjadi penurunan dari target yang ditargetkan. Memang untuk 2019 belum ada auditnya, maka mudah-mudahan tidak terjadi penurunan yang anjlok yang menyebabkan kerugian yang luar biasa.

Tapi dari informasi isu berkembang kesannya baik-baik saja. Untuk itu untuk ketenangan kami isu-isu yang berkembang sekarang tentang Kumparan dan seterusnya yang kami baca itu untuk di klarifikasi sehingga lebih gamblang, terang benderang.

Kami rasa cukup sekian Pak.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Alifuddin.

Berikutnya yang terhormat Ibu Elva, silakan.

F-PDIP (DRA. ELVA HARTATI, S.IP., M.M):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan beserta Teman-teman Komisi IX yang saya hormati;

Bapak Dirut BPJS Ketenagakerjaan beserta jajarannya,

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Saya akan menanyakan bahwasanya BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan yang menghimpun dana gotong royong dari pengusaha dan pekerja yang sangat besar. Pengelolaan dana tersebut diharapkan dapat memberikan efek kembali bagi pekerja. Salah satunya pemberian pelatihan vokasi, terutama pekerja yang PHK, sehingga dapat bekerja kembali. Hal ini sekarang dengan selaras dengan rencana Pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun melihat tujuan peningkatan kualitas dan pekerjaan melalui pelatihan vokasi tidak dibarengi dengan peningkatan dana operasional yang diterima melalui PP Menteri Keuangan Nomor 224 Tahun 2019 yang hanya mengalokasikan sebesar

250 M. Jumlah tersebut berkurang dibandingkan dengan sebelumnya yaitu 294 miliar. Mohon dijelaskan bagaimana langkah terobosan BPJS Ketenagakerjaan dalam mendukung peningkatan kualitas bagi pekerja yang ter-PHK, mengingat era globalisasi dan revolusi industri ini akan banyak penggantian tenaga pekerja dengan mesin.

Yang kedua, selama BPJS Ketenagakerjaan membuat anak perusahaan demi kepentingan investasi semata-mata, sementara tujuan utamanya adalah memberikan hasil sebesar-besarnya untuk kesejahteraan peserta, orientasi meningkatkan hasil yang sebesar-besarnya, dan mendapatkan profit justru malah meracuni semangat BPJS Ketenagakerjaan yang bersifat sosial, hal ini terlihat dari hasil pemeriksaan BPK dimana terdapat pemeriksaannya terkait dengan pengelolaan anak perusahaan yang tidak memberikan hasil yang optimal. Hasil optimal tersebut yaitu hasil investasi. Dan sejauhmana pelaksanaan rekomendasi BPK tersebut penyelenggaraan anak perusahaan saat ini.

Dan keberadaan PT Bijak itu Pak saya juga akan menanyakan yang dibangun sejak BPJS Ketenagakerjaan beserta TUS BUMN mencari profit, dan saat ini menjadi badan hukum publik non profit. Mendapat dana awal dari anggaran dana BPJS Ketenagakerjaan sebesar 5 miliar. Oleh sebab itu, sejauhmana perusahaan tersebut memberikan kepentingan untuk pekerja. Dan bagaimana pula dengan perusahaan properti yang menjadi anak perusahaan BPJS Ketenagakerjaan.

Demikian dari saya.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Elva.

Tadi PT Bijak langsung saya lihat Pak Dhevy Bijak langsung kaget dia. Di pikir PT nya lagi.

Berikutnya Ibu Kurniasih kami persilakan yang terhormat.

F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si):

Bismillaahirrohmaanirrohiim.

Terima kasih banyak.

The only one man begitu ya. Luar biasa ini Pimpinan kita ini.

Yang saya hormati, Pak Melki, dan juga Teman-teman Komisi IX; Pak Dirut BPJS Ketenagakerjaan, saya lebih suka 'Ketenagakerjaan' ini, dan jajarannya.

Yang pertama terkait dengan PMI. Kita kemarin cukup *shock* ketika mendapatkan berita PMI kita di Singapura positif Corona virus. Dan ini adalah WNI pertama yang kena dampak virus Corona. Dan karena peristiwa ini terjadi dikarenakan di tempat bekerja dia, di rumah kan, kalau dia mungkin tidak bekerja di dalam rumah itu mungkin dia tidak akan terjangkiti sakti tersebut kan, dan inikan bisa berdampak pada kematian dan sebagainya. Menghadapi *case-case* seperti ini apakah BPJS Ketenagakerjaan juga sudah mengantisipasi, artinya sejauhmana seorang PMI bisa di proteksi dalam Jamsostek ini ketika dia menemukan persoalan-persoalan yang terjadi pada saat dia bekerja di tempat pekerjaan dia.

Yang kedua adalah perluasan kepesertaan, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman. Saya dapilnya luar negeri Pak, jadi PMI-PMI ini adalah sahabat-sahabat saya. Jadi saya sangat paham bahwa mereka banyak yang belum dan belum mengerti bagaimana cara

mereka untuk bisa ikut BPJS ini. Sejuahmana sosialiasi ini harus ditingkatkan. Karena kalau hanya lewat formalitas-formalitas itu menurut saya malah tidak sampai ke *grass root*, jadi justru harus sampai kepada ke *shelter-shelter*, langsung ke PMI-PMI dimana mereka berkumpul. Kayak di Hongkong itu setiap minggu mereka berkumpul di satu taman, itu malah akan lebih efektif. Dan mungkin kalau mau buka langsung pendaftaran disana bisa langsung bisa mendapatkan peserta kalau memang mau serius meningkatkan kepesertaan PMI. Jadi saya berharap kepesertaan PMI ini bisa ditingkatkan secara signifikan di tahun-tahun yang akan datang.

Yang berikutnya adalah terkait dengan vokasi. Vokasi ini yang menarik memang ketika kita akan menghadapi satu masa, yaitu *disruption*. Ini juga harus diantisipasi kan. Kemudian juga kemungkinan adanya PHK yang besar-besaran. Itukan kita saja sedang berupaya meningkatkan jumlah kepesertaan, masih ada PR lah terkait dengan kepesertaan ini. Ditambah lagi kemungkinan *disruption*, kemudian juga kemungkinan adanya PHK besar-besaran, karena *economy growth* di negara kita sedang mengalami penurunan yang sangat luar biasa. Saya kira ini harus menjadi perhatian yang sangat serius untuk BPJS Ketenagakerjaan supaya tidak terjadi penurunan dalam hal pendapatan iuran ketenagakerjaan ini sendiri, karena ini akan menjadi persoalan yang besar.

Yang ketiga terkait dengan investasi. Ini pertanyaan kelompok yang terakhir. Pimpinan, Pak Melki, kita sudah punya panja 2019. Di hasil panja tersebut saya bacakan, ada salah satu poin yang sangat saya agak bertanya-tanya. Hasil panja itukan pasti bekerja tidak main-main, dan ada unsur tim di dalam panja tersebut. Tapi begitu melihat presentasi hari ini saya jadi bertanya, karena ada sedikit perbedaan data antara di panja dan apa yang disampaikan hari ini. Di Panja itu disampaikan di kesimpulan, salah satunya itu adalah pengawasan oleh dewan pengawas terhadap pelaksanaan investasi BPJS Ketenagakerjaan dan pengembangannya oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan belum dilaksanakan secara maksimal. Ini resmi hasil dari panja.

Tahun 2018 imbal hasil investasi sebesar 8,16 persen dari targeti RKAT 9,51 persen. Hasil investasi sebesar 27,27 triliun atau 8,501 dari target RKAT 2018 sebesar 32,08 triliun. Dan ini disebabkan kenapa, karena adanya pelemahan indeks saham gabungan yang menyebabkan akhirnya tidak maksimal pencapaian target hasil saham. Ini menjadi catatan penting buat kita. Ini panja yang sudah dibentuk oleh Komisi IX, dan sudah memberikan laporannya sejauhmana hasil panja inikan bisa kita cocokkan dan *crosscheck*-kan dengan kondisi saat ini. Karena juga inikan baru berakhir di akhir Agustus 2019, saya pikir tidak mungkin ada perubahan sedemikian signifikan dalam hitungan berapa bulan untuk perolehan saham. Ini menjadi catatan, Pimpinan, menurut saya. Artinya, temuan panja inikan menjadi satu hal yang menjadi PR kita bersama.

Artinya begini Pak maksud saya, kalau kita ber-RDP itu ada baiknya juga diceritakan permasalahan, kendala. Kita kan duduk bersama. Jangan hanya yang positif-positifnya saja, jangan hanya yang baik-baiknya saja, yang seolah-olah semuanya berjalan dengan baik, investasi juga berjalan dengan baik, padahal mungkin ada kendala-kendala yang dihadapi. Justru dengan rapat inilah Komisi IX bisa saling bersinergi. Mari sama-sama kita bersikap terbuka dalam hal pengelolaan investasi BPJS Ketenagakerjaan. Saya percaya panja ini pasti sudah kerja serius. Belum lagi di poin-poin berikutnya ini, Pak Melki, saya kira kita perlu *review* kembali hasil dari sini sampai rekomendasi dari Komisi IX itu/dari panja ini adalah Komisi IX mendesak dewan melaksanakan pengawasan investasi. Saat inikan berarti ada persoalan serius di dalam persoalan investasi BPJS Ketenagakerjaan. Saya hanya ingin mengingatkan kepada hasil panja ini, karena ini juga baru Agustus, belum sampai satu tahun berlewat, tapi ini ada banyak catatan.

Memang saya juga ingin menyampaikan di dalam data saya yang saya kumpulkan. Di ikhtisar hasil pemeriksaan semester dua 2018 BPK kalau saya tidak salah itu juga ada catatan juga dari BPK sebenarnya. Ada pelaksanaan kebijakan yang bisa dikhawatirkan

mengakibatkan potensi *lost*. Saya kira setiap investasi pasti akan ada lah kemungkinan potensi *lost*, pasti ada. Cuma berapa persen potensi *lost* ini yang memungkinkan untuk hilang, inikan yang perlu di analisis. Dan pada saat itu disampaikan ada 6 properti investasi berupa tanah yang belum dioptimalkan. Ini saya juga ingin meminta perkembangannya seperti apa.

Kemudian juga tingkat pengembalian investasi atas aset dana Jamsos dan aset BPJS ini masih di bawah tolak ukur kinerja portofolio investasi yang sudah ditentukan dalam Perdir.

Pak Ketua, kita mungkin perlu dapat ini Perdir tentang Pedoman Pengelolaan Investasi, supaya kita tahu standar-standar minimalnya itu ada dimana dan di angka berapa, sehingga kita bisa membantu untuk bisa terus menerus memajukan BPJS.

Semangat kita ingin memajukan. Karena apa, karena ini pesertanya pekerja yang luar biasa. Keringat sudah keluar lah ibaratnya, gaji mereka dipotong. Termasuk saya juga dulu sebelum disini juga gaji saya di potong. Bahkan kalau saya malah tahu kalau ternyata ada investasi. Padahal kan karusnya kalau dalam Islam itukan *muamallah* itu kalau uangnya ada digunakan itukan harusnya tahu, ada akadnya. Ini investasinya uang anda diinvestasikan ya, itukan harusnya ada informasi seperti itu. Saya saja tidak pernah tahu. Pas tahu-tahu sudah disini, ternyata perputarannya dahsyat. Artinya kita ingin memajukan BPJS Ketenagakerjaan. Apalagi khususnya konsern kita terkait dengan investasi ini. Jangan sampai, karena sebagai mitra kita ingin BPJS Ketenagakerjaan ini terlarut seperti yang terjadi oleh asuransi-asuransi yang lain, kita tidak ingin. Sebagai mitra kita ingin membantu dan duduk bareng, mari kita saling bersinergi agar perputaran investasi ini bisa transparan, bisa terbuka, dan bisa sama-sama diketahui oleh semua Komisi IX ini.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Kurniasih.

Spirit-nya saya kira mudah-mudahan ditangkap ya untuk kebersamaan kita untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya pekerja.

Berikutnya yang terhormat Ibu Dewi Asmara. Bersiap-siap Ibu Wenny Haryanto.

F-PG (HJ. DEWI ASMARA, S.H):

Terima kasih Pimpinan.

Para Direksi BPJS dan Teman-teman Komisi IX.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Pada Direksi BPJS, mungkin kalau tadi disampaikan bahwa pembicaraan adalah seputar dengan apa, berita-berita yang terjadi di Kumparan, dan sebagainya, mungkin kalau itu semuanya benar tidak? Tapi kalau itu merupakan satu kewaspadaan itu harus.

Kedua, apakah itu juga harus merupakan satu transparansi? Iya. Apakah BPJS sudah transparansi? Belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya ini saya teringat dalam beberapa rapat yang lalu saya pernah menanyakan bahwa BPJS inikan dulunya adalah Jamsostek, itu mempunyai jumlah aset yang banyak. Baik itu tanah, gedung, dan sebagainya. Bahkan saya waktu itu menanyakan ada gedung baru yang saya baru lihat. Saya lupa, apakah itu di Kuningan kalau tidak salah ya, kebetulan baru. Tentunya ini perlu saya tanyakan yang tidak memperoleh jawaban.

Dan sebetulnya yang ingin kami transparansi adalah, yang pertama, aset-aset Jamsostek itu banyak sekali. Investasi yang dilakukan secara benar, setengah benar, ataupun salah pada masa-masa yang lalu oleh Jamsostek adalah berinvestasi di bidang properti. Baik

investasi langsung maupun penyertaan. Dan itu tentunya kalau yang benar *alhamdulillah* mungkin masih ada, yang kurang benar mungkin dengan tahun yang berjalan sudah dipertahankan. Tapi kemana itu semua asetnya?

Kalau kita tadi menindaklanjuti apa yang disampaikan Ibu Eva mengenai PT Bijak, PT Bijak inikan terbentuk pada saat Jamsostek itu masih dalam bentuk badan hukum katakanlah BUMN, atau apapun waktu itu bentuk hukumnya. Itu kan masih PT (Perseroan), tentu boleh. Dalam kedudukan sekarang seharusnya pada saat itu bukankah harusnya sudah meleburkan diri atau di likuidasi, atau bagaimana? Inikan lucu. Jadi butuh transparansi. Jadi tidak dijawab lisan begini, saya tidak mau. Buat jawaban tertulis atas pertanyaan saya. Kalau transparansinya tidak ada, hanya lisan-lisan saja, cuma menguap. Yang kita inginkan itu yang sebenarnya, supaya tidak ada kecurigaan. Dan kalau Bapak-bapak kinerjanya baik, akuntabel, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Biasa saja. Dan kami juga hanya melakukan fungsi pengawasan kok.

PT Bijak itu kan mengelola, antara lain mengelola Menara Jamsostek. Di dalam audit BPK tahun 2018 ada kekurangan parkir, berapa itu biaya penagihan parkir, kalau saya tidak salah 800 juta apa 800 M, 800 juta lah mungkin kira-kira ya, plus lain-lain jadi 1 koma sekian. Itu cuma contoh kecil. Itu baru Menara Jamsostek. Inikan banyak. Kenapa saya tahu Jamsostek Pak? Bukan mau mengungkit sejarah, tapi saya punya hubungan bathin sama yang namanya Jamsostek. Dulu kantornya pertamakali itu masih kecil, cuma kayak rumah. Itu didirikannya di Wahid Hasyim. Bahkan itu dibentuk dari dana jaminan sosial. Itu masih ayah saya yang dulu taruh dananya dari dana jaminan sosial tenaga kerja. Orang-orang tidak tahu itu dibentuk. Masih Pak Henry Yarso itu. Jadi jangan main-main, jadi saya punya perhatian sekali, karena saya tahu bagaimana itu dibentuk. Masih belum BPJS, dulu kantornya masih kecil sekali lah. Itu prakarsa ayah saya membentuk yang namanya Jamsostek. Jangan sekarang setelah berkembang. Betul investasi itu dilakukan adalah dalam rangka memberikan/mengembalikan seluas-luasnya fasilitas ataupun keuntungan kepada para peserta. Bagaimana dana yang dikumpulkan dari masyarakat bisa bermanfaat buat masyarakat. Saya waktu S1 skripsi saya adalah itu. Dulu orang belum kepikir bagaimana dengan dana asuransi bisa jadi pembiayaan bagi negara, dan itulah yang sekarang terjadi.

Jadi yang saya inginkan adalah transparansinya. Bagaimana dengan aset-aset Jamsostek yang kemudian dikelola atau dikuasai, atau apapun, kita juga tidak tahu bagaimana Bapak membuat pembukuannya pada saat itu. Dan sekarang apakah itu dipisahkan, apakah itu jadi *equity*, apakah itu dimasuk, terserah. Yang jelas tentu harus melalui proses perundang-undangan. Kan itu tidak mungkin Bapak bawa lari pulang juga saya percaya tidak. Tapi kita minta transparansi, karena artinya itu kemana. Karena ini tidak umum. Seperti BPJS, dia juga apa punya BPJS Kesehatan misalnya tersendiri lagi, PT. Inikan ada ini PT Berkat atau PT apapun itu, Bijak, ini bagaimana? Itu satu saja. Karena yang saya bisa tangkap disini, belum anak usaha yang lain. Karena dulu dana Jamsostek juga banyak dibiayai untuk biaya-biaya properti. Biaya propertinya saya tahu, bisa juga cuma penyertaan. Penyertaannya kemana saja. Apa ada perusahaan properti-properti yang lain? Walaupun saya tidak ungkap disini, tapi saya tahu yang lalu pun ada ikut ke perusahaan-perusahaan properti. Beberapa diantaranya Pengusaha REI. Jadi saya bukan tidak tahu caranya memanfaatkan investasi dana dari Jamsostek, dan sekarang ini BPJS. Hanya saja semua itu boleh saja sepanjang transparan dan memang menguntungkan. Ini bagaimana pelaporannya? Karena kalau Bapak bilang KPK bilang aman dan sebagainya, kalau yang di periksa hanya BPJS nya memang iya. Tapi anak-anak usahanya diperiksa apa tidak? Belum tentu. Jangan-jangan rugi-ruginya Bapak masukin itu semua di anak-anak usaha. Bersih itu bukunya BPJS, bagus itu bukunya BPJS. Belum tentu di anak-anak usahanya, karena penyertaan tidak semuanya untung. Penyertaannya bagaimana? Apa penyertaannya itu adalah melalui katakanlah dengan membeli saham? Kan tidak mungkin kasih kredit langsung kan? Atau masih sisa-sisa jaman dulu dengan yang agak sedikit sulap? Tentu Bapak harus membuat *financial engineering*

sehingga bagaimanalah kerugian itu secara lewatnya tahun kan harus tertutup. Karena kalau saya bicara pun tidak semua teman-teman disini tahu. Hanya intinya yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana pelaporan itu, bagaimana pelaporan PT Berkat yang menguasai aset-aset Jamsostek yang sekarang namanya BPJS. Karena boleh-boleh saja kalau itu dikelola baik dan menghasilkan keuntungan yang besar, kemudian membayar pajak, apapun kewajiban yang seharusnya oleh undang-undang, kemudian itu bisa bermanfaat. Jangan hanya sekedar kemudian memberikan jaminan hari tua, *bla-bla-bla*.

Yang disebut CSR-nya itu kan cuma kecil sekali. Undang-undang mewajibkan. Kewajiban CSR itu cuma berapa ya, 2 setengah apa 1 setengah persen, dari keuntungan itupun. Aduh, kecillah. Barangkali bikin taman bermain anak-anak atau tempat penitipan anak-anak 4 biji juga sudah selesai itu. Padahal kan tidak seperti itu. Konsepsi kita adalah semakin sukses dia memberikan jaminan-jaminan yang .baik. Ibaratnya kalau Bapak ibadah, dari gaji Bapak itu dapat *jenang*, tapi dari apa fasilitas yang diberikan. Kalau semakin baik, Bapak dapat nama.

Jadi ini yang saya ingin tanyakan, bagaimana dengan PT Berkat itu. Karena saya yakin yang di audit tidak termasuk anak-anak usaha. Kecuali kalau bukunya Bapak *consolidated*. Ini *consolidated* apa tidak? Kalau *consolidated*, mana daftar aset-asetnya? Karena daftar aset-asetnya ini harus jelas. Penyertaannya itu juga harus jelas apakah itu di audit.

Kita kan hanya dalam kapasitas mengawasi, mengawasi adalah kita sebagai mitra. Ibaratnya Bapak kalau *ngegas*, kita itu ngelempar remnya Pak, supaya Bapak juga jangan kecebur jauh. Kira-kira seperti itu. Karena biasanya, kita juga tidak memungkir, barangkali saja beda-beda tipis lah, jangan sampai seperti asuransi Jiwasraya ataupun yang lain-lain, barangkali *quote un quote* terjadi sesuatu-sesuatu diantara eksekutif *hengki pengki* yang kita tidak mau tahu. Untuk itu kita perlu transparansi, marilah kita bereskan bersama-sama.

Ini kita bukan mau cari siapa benar siapa salah. Tapi sebelum itu menjadi bola salju raksasa, mau ditutup kayak apapun itu akan menggelinding, dan itu akan membawa semua persoalan ini menjadi bola salju yang besar. Pada saat yang lalu kami juga sempat bertanya bagaimana ini dengan gedung baru Jamsostek yang tiba-tiba baru berdiri itu bagaimana. Bukankah atas kantor-kantor Jamsostek yang dulu kan disewakan apa dipakai sendiri? Dipakai sendiri pun harusnya kan bayar uang sewa, tetap diakui di bukunya. Tidak cuma main pakai gratis. Itu bagaimana?

Mungkin seperti itu yang saya ingin ketahui, agar ada transparansi. Terutama yang penyertaan langsung kepada properti. Disini yang saya maksud bukan yang hanya oleh PT Bijak, tapi apa ini penyertaan langsung? Apakah program infrastruktur? Kalau program infrastruktur, apa Bapak ikut *fund*? *Fund*-nya apa? Bersama-sama dengan siapa? BNI, BRI Bapak tahuh uangnya disitu? Atau apa? Supaya jelas juga. Paling tidak kalau kemudian seandainya tiba-tiba itu rugi minimal kita sudah pernah tahu benar dia sudah melapor. Tapi kalau tidak?

Kita jangan sifatnya kayak pemadam kebakaran, setiap ada masalah baru kita kayak *branwir*. Kalau itu sudah terjadi asuransi lain, mumpung kita disini di Komisi IX ini ada satu, dan ini besar, dan ini juga kita memikirkan bisa memberikan fasilitas yang lebih baik.

Tadi Pak Yahya Zaini bilang vokasi dan sebagainya buat angkatan kerja generasi muda. Kita harapkan yang terbaiklah untuk BPJS Ketenagakerjaan ini. Makanya kami mohon transparansi.

Mungkin itu saja dari kami, terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Dewi.
Banyak catannya buat Direksi BPJS.
Berikutnya yang terhormat Ibu Wenny Haryanto. Bersiap-siap Pak Abidin Fikri.

F-PG (DRA. WENNY HARYANTO, S.H):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati, Pimpinan/Pak Melki, Direksi BPJS Ketenagakerjaan beserta jajaran, serta Anggota Komisi IX.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.

Izinkan kami, Wenny Haryanto, Fraksi Partai Golkar, Dapil Jabar VI Kota Depok-Kota Bekasi, menyampaikan beberapa pemikiran maupun pertanyaan terkait bahan presentasi yang sudah disampaikan kepada kami.

Pertama-tama, tahun lalu kami mendapatkan data bahwa pihak BPJS Ketenagakerjaan telah bekerjasama dengan BP2MI yang saat itu namanya masih BNP2TKI mengenai Gerakan Migrasi Aman Desa, atau disingkat Germandes, melalui 4S, yaitu Siap Informasi, Siap Dokumen, Siap Kompetensi, Siap Jasmani dan Rohani.

Perlu saya jelaskan ya. Siap informasi itu artinya jika bekerja ke luar negeri menjadi pilihan maka langkah pertama adalah mencari sumber informasi yang benar melalui kantor desa, disnaker kabupaten/kota, dan LPSA. Kalau Siap Dokumen itu artinya CPMI harus menyiapkan dokumen jati diri serta dokumen penempatan, dan tidak dipalsukan. Kalau Siap Kompetensi artinya CPMI yang ingin bekerja ke luar negeri harus memiliki kompetensi sesuai dengan permintaan *user* dari negara penempatan. Sedangkan Siap Jasmani/Rohani artinya CPMI yang ingin bekerja ke luar negeri harus benar-benar sehat dan dinyatakan *vit to work* oleh sarana kesehatan maupun dari rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pertanyaannya adalah bagaimana mengenai kelanjutan program tersebut? Kami menilai jika program ini rutin dilaksanakan akan mampu mengurangi permasalahan PMI ilegal dan *less skill* ketenagakerjaan kita di luar negeri.

Kemudian selain program Germandes tersebut, program apa saja yang sudah terlaksana antara BPJS TK dengan BP2MI, dan hasilnya bagaimana sekarang?

Kemudian yang terakhir, di tahun anggaran 2020 ini program apa saja yang akan dilaksanakan terkait kerjasama dengan BP2MI? Berapa alokasi anggarannya dan apa target keberhasilannya?

Demikian pertanyaan-pertanyaan sederhana kami, semoga mendapatkan jawaban yang memuaskan.

Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalaam.

Terima kasih Ibu Wenny Haryanto.
Berikutnya yang terhormat Pak Abidin Fikri. Bersiap-siap Pak Nabil.

F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H):

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Salam sejahtera buat kita semua.

Pimpinan/Anggota Komisi IX, Dirut BPJS Ketenagakerjaan yang kami hormati.

Beberapa waktu yang lalu kan sudah disampaikan hasil panja dari Komisi IX. Betul ya Pak Dirut, sudah disampaikan ya. Saya ingin respon balik terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi IX. Karena sekarang ini agak khawatir-khawatir juga Pak, karena di luar kan banyak isu yang berseliweran. Tadi sudah disampaikan. Ada juga yang sekarang lagi hangat kan soal Jiwasraya, soal ASABRI, Bumiputera, yang itu dana masyarakat yang dikelola kemudian menimbulkan masalah. BPJS Ketenagakerjaan kan juga dengan model yang berbeda juga mengelola dana dari tenaga kerja. Oleh karena itu Komisi IX sangat berkepentingan agar jangan sampai meleset terhadap investasi-investasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Karena kalau ini bisa merembet kemana-mana itu Pak. Kericuhan di Jiwasraya, ASABRI, Bumiputera, dan sebagainya, kalau terjadi ya, karena respon kita juga tempo hari kan juga berkaitan dengan investasi di panja yang lalu, itu akan menimbulkan kerumitan tersendiri, kerumitan sosial. Jadi jangan menumpuk nanti soal yang harus diselesaikan. Oleh karena itu konsern kami adalah untuk apa. Kalau panja lagi juga akan ini lagi.

Tapi kalau penjelasannya cukup meyakinkan ya tidak perlu panja. Tapi kalau masih katakanlah yang dulu juga belum ditindaklanjuti ya kita harus dalami. Inikan saya masih positif dengan kerja teman-teman di BPJS Ketenagakerjaan. Panja itu maksudnya ingin katakanlah mendalami saja sebagai fungsi pengawasan dari DPR. Untuk jaga-jaga Pak. Inikan penting juga itu.

Kalau dirumuskan misalkan berapa sebenarnya perusahaan-perusahaan, tadi ada PT Bijak, bijaksana atau bijaksini, sebenarnya ini adalah perusahaan-perusahaan yang mengelola berkaitan dengan investasinya. Saya kira lumrah-lumrah juga kalau dilaporkan secara tertulis. Tidak perlu juga merasa DPR *neko-neko*, tidak juga. Sebagai fungsi dari pengawasan dari DPR.

Pertanyaan dari Ibu Dewi itu juga ingin meminta kejelasan itu sebenarnya. Juga termasuk aset-aset. Lumrah-lumrah saja. Tidak perlu merasa DPR terlalu berlebihan. Memang harus berlebihan Pak agar waspada. Kalau tidak ya kita nanti kalau ada apa-apa ditanya "mitranya siapa?" ternyata kita keboboran tidak mengawasi secara baik.

Pertanyaan-pertanyaan bisa dijawab tertulis, tidak perlu hari ini. Yang bisa dijawab hari ini ya dijawab saja. Yang perlu pendalaman menjelaskan itu dijawab tertulis saja. Agar kita *firm* bahwa kita sudah menjalankan fungsinya. Kita juga apa yang ditulis di media-media itu tidak sepenuhnya benar. Karena media sosial itukan kadang-kadang kan juga.

Dan juga jangan juga disepelekan informasi itu, tidak bisa juga. Tetap ada kebebasan pers itu juga dijunjung tinggi. Tapi juga verifikasi terhadap pemberitaan juga kita juga harus lakukan. Verifikasinya caranya adalah dengan menjelaskan yang sebenar-sebenarnya bahwa tidak benar apa yang diberitakan kondisi dari BPJS Ketenagakerjaan.

Saya kira itu, Pak Dirut, jadi hal yang biasa dan bisa ditindaklanjuti. Karena ini, Pak Pimpinan, tempo hari kita memang sudah bikin panja, rekomendasinya sudah, saya kira kita positif sajalah. Jangan sampai katakanlah ini menjadi bola liar. Jadi kalau tidak ada kejelasan dari Direksi terhadap isu yang diluar akan menimbulkan masalah.

Saya kira itu, Pimpinan. Lebih dalamnya lagi saya kira soal-soal katakanlah ada yang ngomong CSR, itu bagian yang memang harus disampaikan. Itu memang kebutuhan kita untuk menjelaskan itu berapa CSR yang dikelola oleh BPJS TK, sedikit atau banyak. Karena dulu kan Jamsostek itukan, mohon maaf ya, di era lalu kan citranya itu kayaknya kan bagi-baginya

itukan luar biasa Pak. Betul ya Pak ya? Jaman dulu Pak. Sekarang perkaliannya sekarang. Karena semakin ketat. Wajarlah, namanya bagian dari *good corporate* ya itu juga harus diinikan. Kalau masih ada ya juga bisa juga begitu kan. Tadi vokasi atau apa kan bermanfaat semua itu untuk meningkatkan *skill* dari tenaga kerja kita.

Saya kira itu, Pimpinan, terima kasih waktunya. Pertanyaan bisa dijawab tertulis. Misalkan Jamsostek, dulu karena saya sudah *risih* itu kalau Jamsostek, saya tidak mau lagi itu ngomong Jamsostek itu. BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kan sebenarnya didalamnya masih itu. Semangatnya mungkin baru, orangnya sama, *casing*-nya. Mudah-mudahan *casing* dan dalamnya juga berubah juga. Karena dulu kalau di cek itukan Jamsostek itukan juga banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dari masa lalu.

Saya kira itu, Pimpinan, terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Abidin.

Sebelum ke Pak Nabil, kita sudah Jam 16.00, saya perpanjang lagi sampai Jam 17.00.

(RAPAT: SETUJU)

Berikutnya yang terhormat Pak Nabil Harun/Gus Nabil. Bersiap-siap Pak Fadholi.

F-PDIP (MUCHAMAD NABIL HAROEN, S.Pd., M.Hum):

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.
Merdeka!

Terima kasih Pimpinan atas waktu yang diberikan.

Syukur *alhamdulillah* hari ini saya ketemu Pak Dirut BPJS, Pak Agus Susanto. Jadi ingat beberapa tahun yang lalu waktu saya pernah makan duren bareng di Kuala Lumpur. Waktu itu saya belum nyaleg. Rupanya itu tanda bahwa saya akan duduk di Komisi IX, kira-kira begitu Pak.

F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H):

Interupsi, Pimpinan.

Izin, Pimpinan, satu menit saja. Atau 30 detik.

Pimpinan, saya mohon ijin. Karena saya minta jawabannya tertulis tadi, yang berkaitan dengan saya dijawab tertulis saja. Saya mau pamit sebentar.

Saya izin ya, Pimpinan?

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Abidin.

Mudah-mudahan bisa balik lagi Pak.

Silakan.

F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H):

Terima kasih Pimpinan.

F-PDIP (MUCHAMAD NABIL HAROEN, S.Pd., M.Hum):

Boleh saya lanjutkan, Pimpinan?

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Gus Nabil.

F-PDIP (MUCHAMAD NABIL HAROEN, S.Pd., M.Hum):

Saya mau tanya apa jadi lupa ini gara-gara interupsi Pak Abidin.

KETUA RAPAT:

Sampai di duren Kuala Lumpur itu.

F-PDIP (MUCHAMAD NABIL HAROEN, S.Pd., M.Hum):

Dan DPR ini luar biasa. Jadi kalau seperti Pak Abidin ini akan pamit, kemudian saya, kemudian Pak Fadholi. Pak Dhevy Bijak itu seringkali keluar masuk ruang rapat. Tapi tetap kami bisa pantau, karena rapat-rapat seperti inikan disiarkan secara langsung dan rakyat melihat. Aplikasinya ada di DPR Now kalau mau memantau rapat-rapat kita. Jadi sudah lumayanlah kecanggihan DPR ini, jadi masyarakat bisa memantau secara langsung.

Kemudian kami di Komisi IX ini selalu *balance*. Jadi kalau memang itu bagus ya kita apresiasi. Kalau memang ada hal-hal yang memang harus kita berikan kritik kita berikan kritik. Jadi tidak ada istilahnya kami ngomong yang tidak penting atau berniat yang tidak baik. Dan saya harus mengapresiasi paparan dari Pak Dirut ini, puluhan halaman ini. Luar biasa, ini belajarnya berapa hari ini. Lama sekali ini. Dan pertanyaan-pertanyaan saya sebenarnya sudah terwakili oleh kakanda-kakanda kami di Komisi IX. Apalagi bertanya Kakanda Rahmad ini sangat menyentuh sekali, dan itu harus diperhatikan betul.

Pak Dirut, jadi pada beberapa waktu yang lalu Komisi IX melakukan kunjungan kerja di NTT. Dan kami menemukan fakta di lapangan bahwa ada program pelatihan vokasi yang di inisiasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Namun dari 200 kuota peserta pelatihan baru tercapai 10 persen. Saya tidak ikut, tapi mohon dikoreksi kalau saya salah. Jadi baru 10 persen. Ini kenapa? Karena minimnya sosialisasi dan persyaratan yang kurang terbuka. Atau apakah itu nanti silakan diperiksa. Padahal antusias masyarakat untuk mengikuti pelatihan ini cukup besar. Yang jadi pertanyaan adalah sejauhmana analisa dan tindak lanjut BPJS Ketenagakerjaan terhadap persoalan ini? Karena sangat mungkin persoalan ini juga terjadi di daerah-daerah lain.

Kemudian yang kedua, saya dulu pernah bertanya, tapi saya tidak tahu, atau saya tidak merasa mendapatkan jawaban yang cukup memuaskan, bagaimana jika kemudian BPJS Ketenagakerjaan ini juga melakukan investasi-investasi yang anti *mainstream*. Misalnya investasi ke koperasi karyawan. Itukan langsung ke buruh, koperasi buruh, dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa dijelaskan. Kalau memang sudah saya ingin tahu dimana. Dan kalau memang belum dan ada kendala di undang-undang atau apa ya mari kita bicara. Karena investasi terhadap koperasi karyawan ini tentu akan sangat besar manfaatnya.

Kemudian tadi Mbak Krisdayanti duduk di sebelah kanan itu biasanya tempat duduk saya itu. Tapi tidak tahu kenapa Mbak KD senang duduk disitu. "Mungkin hangat" kata Pak Imam Suroso. Tapi terus terang saya memang mau duduk di sayap ini. Biasanya saya di sayap kiri, saya ingin duduk di sayap kanan karena ingin lihat wajah Pak Dirut supaya lebih jelas.

Dan tadi sebenarnya saya juga tidak ingin bertanya, karena sudah terwakili. Namun ada masyarakat yang kemudian menyampaikan informasi beberapa hal kepada saya, khususnya terkait investasi-investasi BPJS yang menurut saya informasi yang saya terima ini masih belum begitu detail, sehingga hanya sedikit saja yang nanti akan saya tanyakan kepada Pak Dirut.

Pola komunikasi yang dulu juga sempat saya kritik di awal-awal rapat kerja ketika saya masih barudi Komisi IX sampai hari ini sayajuga belum merasakan efek yang signifikan. Mungkin efek yang signifikannya ketika kita kunker bareng-bareng mungkin jadi lebih dekat, jadi lebih kenal. Kalau sering ngomong itu kayaknya jadi lebih dikenal. Buktinya kan beberapa teman-te,man di BPJS Naker jadi kenal dekat dengan saya. Misalnya di Batam menemani saya merokok dan lain sebagainya.

Terkait investasi memang seperti tadi disampaikan oleh kawan-kawan ini uga betul-betul harus diperhatikan. Dan saya membaca ada 8 rekomendasi BPK. Ini ada rekomendasi terakhir yang berbunyi 'memberikan sanksi teguran kepada konsultan pengawas yang kurang cermat dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pencapaian fisik pelaksanaan pekerjaan'. Ini kira-kira pelaksanaannya rekomendasi ini apakah sudah dilaksanakan atau belum.

Dan terakhir sebelum saya tutup pertanyaan saya, saya hanya ingin mengingatkan kepada Pak Dirut bahwa kita disini serius Pak semuanya. Jadi kalau kita sudah mencapai sebuah kesepakatan di Komisi IX, kemudian sudah masuk dalam laporan singkat jadi kesimpulan harap betul-betul dilaksanakan. Karena kalau tidak, jangan sampai kemudian nasibnya seperti Dirut BPJS Kesehatan yang menjadi bulan-bulanan disini. Jadi kalau dengan mitra kerja yang baik ya kita baik-baik. Kalau mitra kerjanya mau main-main, kita bisa lebih *ngeri* lagi Pak. Karena di belakang kita inikan banyak konsituen, banyak rakyat, dan kami di kontrol betul.

Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan, Pak Dirut. Semoga jaminan sosial adalah landasan atas kompleksitas menuju negara kesejahteraan ini betul-betul bisa terlaksana.

Terima kasih.

*Walloohulmuaafiq Illaa Aqwamiththooriq
Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih Gus Nabil.
Mudah-mudahan Pak Dirut ingat ya Kuala Lumpur, ini duren Kuala Lumpur.
Berikutnya Pak Fadholi yang terhormat dari Nasdem, silakan.

F-NASDEM (DRS. FADHOLI):

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.
Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.

Bapak Pimpinan yang saya hormati; dan
Seluruh Bapak/Ibu Anggota Komisi IX yang saya hormati;
Bapak Dirut BPJS Ketenagakerjaan yang saya hormati bersama seluruh jajarannya.

Mohon maaf saya orang baru, jadi baru pengenalan terhadap BPJS sehingga belum tahu banyak. Karena periode yang lalu ada di Komisi IV sehingga tidak banyak tahu. Maka ijin saya untuk bisa minta beberapa tanggapan atau hal-hal yang nanti akan saya sampaikan.

Yang pertama filosofinya adalah bahwa BPJS ini merekrut dan diberikan satu kepercayaan untuk bisa mengelola amanah yang dari tenaga kerja masalah keuangan. Tidak jauh beda dengan apa yang amanah yang disampaikan oleh lembaga-lembaga lain yang mengelola keuangan sebetulnya. Tapi inikan ada satu perbedaan yang sangat menonjol. Setidak yang pertama bahwa, karena ini mengelola keuangan dari para tenaga kerja kita yang sekian banyak ini, manfaat apa yang diberikan kepada mereka dan keluarganya. Khususnya yang pertama kan yang dikelola itu kan uang mereka, manfaat untuk mereka dan keluarganya ini apa. Ini mesti menjadi skala prioritas.

Dan penataan pengelolaan ini apakah ada satu rumusan prosentase daripada keuangan yang dikelola itu, sehingga yang dikembalikan untuk bisa asas manfaat kepada keluarga dan mereka berapa persen. Dan kemudian sisanya baru digunakan untuk misalnya pengembangan yang lain, kegiatan-kegiatan aspek sosial yang lain. Termasuk juga disini pengelolaan terkait dengan masalah investasi.

Nilai investasi yang sekarang sudah dialokasikan itu berapa persen dari total yang aset yang dimiliki oleh BPJS? Ini penting untuk bisa diketahui agar nanti tidak salah untuk bisa menyampaikan satu pandangan-pandangan. Misalkan katakanlah kalau investasinya sekitar 400 triliun atau berapa itu kan tidak tahu persis, itu berapa persen dari total dana yang saat sekarang ini sudah terkumpul dan dihimpun oleh BPJS ini? Korelasinya kemudian disandingkan dengan dana yang dikembalikan dan diberikan manfaat untuk mereka yang sekarang dihimpun dananya dan keluarganya ini bagaimana? Berapa persen? Sehingga kalau dengan demikian nanti ada, maka program-program apa yang sudah diberikan kepada mereka ini? Atau mungkin juga banyak tadi yang dijadikan satu usulan bahwa seperti ada vokasi pelatihan ini macam-macam. Termasuk juga memberikan beasiswa.

Dalam pemberian beasiswa ini usulan saya, mungkin bukan sekedar usulan saya, tetapi apakah bisa itu menjadi skala prioritas kepada keluarga atau anak-anak kepada mereka yang saat sekarang ini tenaga kerja itu? Kalau ini dilakukan kan artinya memang ini biar buah ini tidak jatuh jauh dari pohonnya. Karena ini memang sumbernya dari situ, ini wajar kalau dikembalikan untuk situ.

Berikutnya saya pikir apa yang sudah disampaikan pada Bapak-bapak yang dulu terkait dengan adanya panja dan kemudian diberikan satu jawaban tertulis, saya pikir itu nanti akan menjadi bagian yang penting dan untuk bisa kita ini. Dengan memberikan jawaban tertulis dari semua rekomendasi panja itu saya pikir nanti akan bisa memperpendek di dalam rapat ini. Tetapi di dalam rapat inikan tentu kita akan perlu untuk bisa mendapatkan kesepakatan bersama, dan untuk bisa ditindaklanjuti.

Berikutnya juga saya berikan penghargaan atas data-data dan paparan yang sudah diberikan disini. Tetapi juga ada beberapa hal yang karena itu diberikan hanya judul dan kulitnya maka kan kami tidak bisa memberikan satu pendalaman yang lebih jauh sehingga tidak bisa mengerti akar. Ini nanti perlu diurai, saya pikir ada perlu jawaban yang perlu diurai terkait dengan beberapa yang disini disajikan dalam bentuk global. Seperti misalkan investasi itu dimana, apa saja, bagaimana. Inikan menjadi satu bagian yang sangat penting untuk bisa diurai dalam bentuk tulisan saja saya pikir. Tidak perlu diuraikan dalam satu jawaban.

Jadi seperti misalkan investasi dalam bentuk deposito berapa jumlahnya, terus kemudian anak perusahaan yang dibentuk ini ada apa saja, berapa jumlah anak perusahaannya, dimana saja. Inikan kita tidak sekedar mendapatkan informasi bahwa BPJS telah berinvestasi, kemudian mempunyai anak perusahaan disini, kan tidak hanya itu saja. Tetapi jauh lebih dalam kita perlu mendapatkan informasi yang lebih lengkap terkait berapa sebetulnya kaitannya dengan badan usaha yang dikelola oleh BPJS dan bagaimana kemungkinannya.

Saya yakin bahwa dari Bapak-bapak sekalian telah memikirkan sangat matang-matang dengan satu pertimbangan agar pengelolaan investasi ini mesti harus untung. Sebab kalau itu tidak untung kan akan sayang sekali. Oleh karena itu kita perlu bahan, investasinya

itu dimana saja, apa saja. Ini perlu diurai. Kalau ini tidak diurai, kita hanya tahu BPJS sekarang punya investasi sekian miliar, kemudian keuntungannya sekian, tetapi hal-hal yang mungkin perlu ada satu kebersamaan.

Dalam hal yang apa yang saya tanyakan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak-bapak terdahulu saya pikir itu perlu ada jawaban. Tapi secara tertulis Pak agar detail kita akan bisa mempelajari bersama-sama untuk melakukan bersama-sama akan melakukan fungsi pengawasan dan pendampingan kepada Bapak-bapak sekalian dalam rangka untuk bisa melaksanakan amanah ini.

Saya pikir itu, Bapak-bapak, mohon ini menjadi satu catatan. Dan sebelumnya saya mohon maaf sekiranya mungkin pertanyaan saya tidak pas dengan materi yang saat sekarang ini dibahas. Tapi saya pikir mudah-mudahan ini ada manfaatnya.

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Pertanyaannya pas, Pak Fadholi.

Berikutnya yang terhormat Ibu Ratu Wulla, kami persilakan.

F-NASDEM (RATU NGADU BONU WULLA, S.T):

Pimpinan dan Anggota Komisi IX yang saya hormati;
Direktur BPJS bersama seluruh jajarannya.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Om Swastiastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan.

Pada kesempatan ini dalam RDP kita ada beberapa agenda. Tetapi saya ingin fokus pada dua poin, yaitu berkaitan dengan langkah strategis BPJS Ketenagakerjaan dalam menghadapi perkembangan industri 4.0 dan digitalisasi terhadap upaya perlindungan pekerja dan kebijakan BPJS Ketenagakerjaan dalam mendukung program pelatihan vokasi bagi peningkatan kualitas SDM.

Berkaitan dengan kebijakan yang telah diambil langkah strategis oleh BPJS Ketenagakerjaan saya memberikan apresiasi. Disini kita melihat pada halaman 27 bahwa potensi ekonomi digitalisasi itu pada tahun 2025 bisa menembus angka 130 miliar US Dollar. Ini menjadi sebuah potensi. Tetapi kenyataan yang kita lihat bahwa kondisi sistem jaringan yang ada sampai saat ini di seluruh Indonesia itu belum rata. Contohnya di berbagai daerah terpencil masih banyak daerah yang tidak mempunyai jaringan listrik dan jaringan internet. Tentunya ini menjadi masalah yang dihadapi jika tidak ada jaringan listrik dan jaringan internet, bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan *e-commerce* dengan baik dan mengakses segala sesuatu yang dibutuhkan. Untuk itu harapan saya kepada BPJS Ketenagakerjaan perlu melakukan upaya-upaya untuk berkoordinasi bersama dengan Pemerintah agar segera mungkin jaringan listrik dan jaringan internet ini dapat diselesaikan secepat mungkin agar mempermudah masyarakat dalam mengakses segala sesuatu yang diperlukan berkaitan dengan pelayanan dan lain-lain.

Yang kedua, saya juga ingin mempertegas, yaitu masalah *vocational* yang sudah dilakukan. Memang betul beberapa waktu yang lalu kami lakukan kunjungan ke NTT. Kebetulan saya asli NTT. Disana kami temui bahwa dari 200 peserta kuota pelatihan yang diberikan hanya 10 persen. Ini juga terjadi karena minimnya sosialisasi yang ada di daerah.

Harapan saya ada langkah-langkah konkrit segera mungkin yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, sehingga informasi ini tersampaikan. Karena memang sebenarnya partisipasi masyarakat itu sangat tinggi, tetapi karena informasi yang kurang akhirnya kuota yang ada itu tidak bisa terserap.

Yang ketiga, saya juga memberikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan yaitu atas penghargaan dari KPK pada tahun 2017 dan 2018 sebagai lembaga dengan sistem pengendalian gratifikasi terbaik. Saya harap ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Berikut yang paling muda ini, Pak Dhevy Bijak.

F-PD (MUHAMMAD DHEVY BIJAK):

Bismillaahirrohmaanirrohiim.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.

Pimpinan dan Anggota Komisi IX yang saya hormati dan saya banggakan;
Direkrut BPJS Ketenagakerjaan beserta jajarannya yang saya hormati pula.

Terima kasih.

Tentu kami/Anggota Komisi IX sangat mengapresiasi materi yang disampaikan oleh Pak Dirut tadi, dan terus terang saya menaruh optimisme terhadap itu. Namun ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Pak Menteri.

"Eh Pak Menteri. Pak Dirut". *Insyaa Allah* menteri.

KETUA RAPAT:

Ini langsung Pak Amran aminkan ini.

F-PD (MUHAMMAD DHEVY BIJAK):

Aamiin. Doa kayaknya itu Pak.

Yang pertama terkait dengan sosialisasi dan edukasi terhadap pekerja migran, mengenai manfaat BPJS Ketenagakerjaan, perubahan mendasar apa yang telah dilakukan oleh Dirut BPJS Ketenagakerjaan untuk menangani masalah tersebut.

Yang kedua, seperti apa langkah BPJS Ketenagakerjaan yang dalam menyiapkan regulasi yang lebih komprehensif dan integratif terhadap perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja migran kita.

Selanjutnya peraturan perundang-undangan terkait perlindungan pekerja migran Indonesia telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018, bagaimana efektifitas dalam penerapan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hak dan keselamatan pekerja migran?

Selanjutnya Pak Dirut tadi mengatakan sulit mendapatkan data yang valid terkait para peserta pelatihan vokasi TK yang sudah dipekerjakan. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah kendalanya sehingga sulit mendapatkan data yang valid?

Terakhir, saya melihat di halaman 64 dari materi Bapak sampaikan tadi kesimpulannya, ini ada dua audit, BPK dan audit KAP. Tapi saya belum melihat yang 2019 nya belum ada ya, belum masuk ya? Sementara proses ya?

Mungkin itu saja, Pimpinan.

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Dhevy yang terhormat.

Ini yang paling terakhir ini yang baru masuk ini. Ini juga anggota baru kita di Komisi IX. Yang terhormat Pak Ade Rizki Pratama kami persilakan.

F-GERINDRA (ADE RIZKI PRATAMA, S.E., M.M):

Terima kasih Pak Ketua/Pak Melki.

Bismillaahirrohmaanirrohiim.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IX yang saya hormati;
Mitra Komisi IX, Direksi/Pak Dirut BPJS Tenaga Kerja yang kami hormati beserta seluruh jajaran.

Pak Dirut, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ade Rizki Pratama, saya dari dapil Sumatera Barat. Kebetulan saya baru seminggu kurang satu hari di Komisi IX, sebelumnya saya di Komisi V.

Langsung saja Pak. Saya belum tahu banyak, Pak Ketua, tentang BPJS dan seluruh mitra-mitra lainnya, tapi banyak membaca tentunya menambah wawasan kita.

Sebelumnya, Pak Ketua ijin, saya Komisi V pernah waktu itu mendapat audiensi dari Aosiasi Pelaut Indonesia. Disana disampaikan bahwa, kalau dilihat dari paparan Bapak di halaman 21 tentang kepesertaan pelaut dalam negeri, itu adanya disharmonisasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Jika kita lihat di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, disana ada Pasal 65 ayat (2) huruf a menyatakan 'untuk pembayaran upah dan pembayaran lainnya kepada nahkoda, anak buah kapal, dan awak pelengkap lainnya dalam hubungan dalam penugasan mereka di kapal, termasuk biaya repatriasi dan kontribusi asuransisocial yang harus dibiayai'. Disharmonisasi disini terdapat bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran tidak mengatur terkait kewajiban untuk mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan. Bahwasanya di sini, Pak Ketua, kami ingin kita bersama-sama, apakah ini lintas komisi, tetapi terkait juga dengan sinergitas DPR dengan Pemerintah agar nantinya setiap undang-undang ini dapat seiring sejalan kiranya, agar semua hak dan kewajiban masing-masing pihak itu dapat terjalin dengan sebagaimana mestinya.

Kemudian, Pak Dirut, terkait dnegan tenaga kerja pelaut dan awak kapal ini regulasinya secara internasional mengikuti konvensi IMO (*International Maritime Organization*), dan juga ILO (*International Labour Organization*), dan Bapak paham itu. Jadi secara regulasi internasional pasti mengikuti daripada wadah atau payung IMO tersebut. Sedangkan untuk tenaga kerja umum mengikuti konvensi internasional atau ILO. Lalu bagaimana menurut Pak Dirut apa sih negara yang di luar negeri tersebut yang kira-kira mereka dapat mensinergikan, contoh implementasi daripada IMO dan ILO ini. Dan kita juga mempunyai aturan-aturan sendiri dalam negeri.

Kemudian, Pak Dirut, bagaimana jajaran Pak Dirut mengenai menganalisis dan/atau *team analyze* terhadap saham-saham yang akan dipilih/yang akan dijadikan sebagai sesuatu

yang akan menguntungkan. Tidak hanya menguntungkan bagi BP Jamsostek sendiri, tetapi juga ada *edit value*-nya terhadap peserta BP Jamsostek secara umumnya.

Kemudian, Pak Dirut, terakhir, Pak Ketua, melihat dari halaman 27 tentang potensi ekonomi baru di era digital. Ini kalau dilihat ada nantinya estimasi jumlah pekerjaan yang didukung *e-commerce* di Indonesia. Memang ini tidak bisa kita hindari, tetapi ini sedang berlangsung dan akan terus signifikan dari waktu ke waktu.

Ini juga kami melihat, Pak Ketua/Pak Melki, ini juga ada disharmonisasi. Karena kami cukup lama di Komisi V, dan sekarang ada Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang juga akan mengakomodir daripada tenaga kerja-tenaga kerja kita khususnya yang akan berada di sektor transportasi, khususnya transportasi *online*.

Kalau kita lihat ada dua *startup* yang benar-benar menjadi raksasa, khususnya di transportasi *online*, di Indonesia. Kita sebut saja namanya Gojek yang hijau, dan hijau satu lagi yang namanya Grab. Gojek anak bangsa yang punya, mulai dari melahirkan, mendirikan, sampai sekarang luar biasa. Hingga Grab ini perusahaan *startup* kalau tidak salah Malaysia yang mencari keuntungan juga di negara kita. Kalau kita melihat berapa banyaknya Pak? Saya tidak tahu ini jumlahnya, jutaan atau ratus ribuan, pengendara ojek Pak. Yang mengantarkan makanan, yang mengantarkan manusia dari tempat satu ke tempat lainnya. Kalau dilihat, itu valuasinya, Pak Ketua, kalau Gojek itu sudah 50 triliun, bahkan lebih Pak. Ini lebih tinggi Pak dari nilai valuasi Garuda Indonesia. Ratusan triliun lagi, luar biasa Pak, hanya dalam kurun waktu beberapa tahun saja. Ini menjadi porsi yang penting Pak. Kalau kita bicara migran, dan ini dalam negeri, kami rasa penting, bagaimana nanti Pak Dirut juga dapat membuka sebuah wacana ini terhadap kementerian terkait untuk dapat ini cepat diselesaikan.

Kasih Pak hak-hak daripada pengendara *online* ini juga tidak dapat ditetukan. Mereka pengendara motor kita tidak tahu kapan peristiwa kecelakaan atau kejadian sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi. Tetapi inilah tugas Pemerintah bagaimana berada di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat pengendara transportasi daring atau *online* ini.

Itu mungkin, Pak Ketua. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang luas sebenarnya. Masih banyak porsi-porsi yang lain yang sebenarnya belum digarap oleh BP Jamsostek ini.

Terima kasih Pak Ketua/Pak Melki, mohon maaf.

Wabillaahitaufiq Wal Hidaayah.

Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Ade.

Saya kira bersyukur kita eks Komisi V langsung bisa nyambung dengan poin satu ini, karena tadi beberapa persoalan tadi sudah langsung di respon oleh Pak Ade.

Dari meja pimpinan saya tambah beberapa hal ya.

Pertama untuk Direksi dan seluruhnya jajaran direksi yang lain, ini terkait dengan virus corona. Inikan banyak permintaan ke kami dari PMI di luar negeri. Jadi kami minta untuk kalau boleh BPJS Tenaga Kerja juga memberikan bantuan, minimal masker. Karena di Hongkong itu pada minta ke kami, ini mereka bilang kesulitan dapat masker sekarang diluar. Kalau boleh kita membantu masker. Sementara kami juga minta ke yang lain, kalau boleh BPJS Tenaga Kerja juga menyiapkan bantuan masker ke Hongkong. Terutama ada beberapa negara yang memang membutuhkan kaitan dengan permintaan masker. Nanti pasti bisa ketemulah itu.

Yang kedua masih soal PMI juga, ini terkait dengan profil data peserta PMI yang masuk di data BPJS ini. Kami itu dapat data dari BP2MI dan tenaga kerja, mudah-mudahan ini sambung ya, tapi kami dari dapil NTT satupun tidak ada yang masuk disini, padahal termasuk pengirim terbesar. Mungkin dia masuknya ilegal ya. Tapi kalau ini data tidak masuk disini

malah saya bertanda tanya ini, ini basis datanya darimana ini profil data PMI berdasarkan daerah ini. Di halaman 5 coba tolong di cek, halaman 5 ini soal daerah asal profil PMI ini. NTT itu oleh Kemenaker dan BP2MI itu termasuk katanya pemasok tenaga kerja di Malaysia terbesar, tapi disini dari 25 besar ini satupun tidak ada ini. Ini basisnya darimana ini angka ini. Karena yang dikirim itu banyak sekali, baik yang legal maupun ilegal juga banyak, yang dikirim dalam bentuk jenazah juga ratusan pertahun, tapi profil disini sama sekali tidak masuk. Ini ada masalahnya dimana ini soal menyangkut profil peserta yang di catat disini. Apakah memang yang diambil yang legal saja, atau yang ilegal juga masuk ini? Ini biar kita bisa tahu.

Yang ketiga masih soal PMI juga. Di halaman 19 itu disitukan digambarkan bahwa pengembangan layanan dan perlindungan PMI tahun 2020 ini ada banyak sekali yang mau dilakukan. Termasuk misalnya, ini saya ambil poin kedua, sosialisasi perlindungan PMI yang lebih *massive*, baik di dalam maupun di luar negeri. Saya belum tahu apa yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan disini yang sekali lagi terkait dengan, ini ada 51 orang Anggota DPR RI Komisi IX, sebaiknya juga untuk hal ini, karena melibatkan nanti di tingkat daerah, sebaiknya teman-teman DPR RI di masing-masing dapil, termasuk kantong-kantong PMI nya dilibatkan, sehingga bisa membantu BPJS Tenaga Kerja, dan mempersiapkan juga pemerintah daerah untuk bisa terlibat hal ini. Termasuk juga program PMI dalam berbagai hal tadi itu, a, b, c, itu. Jadi memang kemarin kita sudah sempat bahas, tapi biar nanti teman-teman juga semua bisa terlibat dalam hal menyangkut berbagai persoalan PMI ini untuk poin di halaman 19 ini baiknya coba dibuat program yang lebih konkret dengan teman-teman Komisi IX.

Yang lain saya tidak tambah lagi, karena sudah banyak tadi ditanyakan oleh teman-teman dan Bapak/Ibu sekalian. Dan untuk itu kami meminta dan memberikan kesempatan respon dari Pak Dirut. Tidak harus Pak Dirut sendiri. Kalau Pak Dirut mau mendistribusikan buat direktur yang lain dipersilakan. Misalnya vokasi siapa, investasi siapa. Tidak harus Pak Dirut menjawab semua. Yang belum bisa dijawab nanti itu bisa nanti kita terima jawaban tertulis. Ada yang tadi minta tertulis, nanti kita siapkan tertulis.

Kepada Pak Dirut kami persilakan.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (AGUS SUSANTO):

Terima kasih Pimpinan.

Jadi hadir bersama kami jajaran direksi. Tadi mohon maaf saya lupa memperkenalkan. Jadi ada beberapa pertanyaan nanti yang akan dijawab atau disiapkan jawabannya tertulis oleh yang paling kiri Direktur SDM Umum/Pak Naufal, kemudian Dirut Investasi/Pak Amran, sebelah kanan saya Direktur Renstrategi/Pak Sumarjono, kemudian Direktur Kepesertaan/Pak Ilyas Lubis, kemudian Direktur Pelayanan/Pak Krisna. Dan satu-satunya yang paling cantik Direktur Keuangan kita, Ibu Evi.

KETUA RAPAT:

Tadi belum pakai masker, sudah pakai masker.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (AGUS SUSANTO):

Tadi terkait sama masker, Pimpinan, perlu kami informasikan. Kami minggu lalu telah memberikan bantuan masker kepada PMI. Ini kita salurkan melalui Kemenaker, dan sudah kita serahkan minggu lalu.

Kemudian data NTT ada dimana? Saya sedang mintakan data dari teman-teman.

KETUA RAPAT:

Biar mungkin bisa diperjelas soal masker, karena ini dapilnya Ibu Kurniasih biar bisa paham.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (AGUS SUSANTO):

1.200 *pieces*.

KETUA RAPAT:

1.200 boks berarti ya.

Kalau *pieces* itu berarti cuma 12.000, apa cuma 12 boks.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (AGUS SUSANTO):

Barangnya tidak ada Pak. Jadi kita sudah keliling.

F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si):

Ijin, Pimpinan.

1.200 *piece* Pak.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (AGUS SUSANTO):

Betul itu.

Jadi ini permasalahannya barangnya tidak ada. Kita sebetulnya mencari barang yang banyak.

KETUA RAPAT:

Nanti kalau soal kebutuhan barang bisa kontak Ibu Kurniasih. Jalur ke barangnya kami bisa buka nanti.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (AGUS SUSANTO):

Nanti tim kami akan koordinasi Pak.

KETUA RAPAT:

Sebentar, Pak Fadholi.

Itu angkanya kurang enak kita keluarkan. Nanti kita mesti kirim yang besar, itu baru jelas. Kan kita sudah meminta ini.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (AGUS SUSANTO):

Jadi kita ada atensi untuk memberikan bantuan. Namun ada kendala untuk penyediaan barang, sehingga yang baru tersedia sejumlah itu tadi. Tentunya kita akan berikan bantuan berikutnya.

Kemudian terkait yang Bapak sebut untuk sosialisasi 2020 iya kita akan lakukan sosialisasi *massive* menggunakan kanal-kanal yang ada, kanal fisik ataupun kanal digital. Dan

juga melibatkan para tokoh masyarakat, karena merekalah yang paling bisa didengar dan dituruti oleh para masyarakat setempat.

Kemudian dari beberapa pertanyaan tadi kalau kami kelompokkan ada terkait sama vokasi, PMI, dan investasi. Ini kalau untuk vokasi memang betul baru 10 persen yang terealisasi 2019, karena kita baru mulai di bulan September. Dan ini tentunya tahun 2020 akan kita tingkatkan. Namun kita masih terbatas untuk *piloting*.

Kemudian untuk vokasi ini juga kita mengintegrasikan atau berkoordinasi dan bersinergi dengan Kemenaker. Karena Kemenaker juga mendapatkan tugas dari Pemerintah untuk menjalankan program vokasi, sementara BPJS Ketenagakerjaan ada program vokasi. Oleh karena itulah kita berkoordinasi dan bersinergi dengan Kemenaker.

Kemudian kendala vokasi saat ini utamanya adalah untuk *job replacement* atau penempatan. Betul tadi Bapak sampaikan, yang terpenting adalah bagaimana orang yang di *training* ini tidak hanya di *training*, tetapi setelah di *training* dia bisa terserap di lapangan kerja. Kendala kita adalah bagaimana menyiapkan lapangan kerja tersebut.

Kemudian memonitor orang yang *training* tersebut, kita latih *vocational* itu, sudah terserap di lapangan pekerjaan. Oleh karena itu kita perlu bantuan/dukungan, terutama dari penyedia lapangan kerja, dari Apindo, dari pemberi kerja atau perusahaan, untuk cipta lapangan kerja. Paling tidak memberikan informasi kepada kami bahwa ada lapangan kerja yang bisa di isi oleh tenaga kerja yang ter-PHK dan mendapatkan *training* dari BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk beasiswa ini juga, seiring dengan arahan Presiden untuk peningkatan SDM, kita lakukan dengan dua, yaitu pemberian beasiswa. Namun pemberian beasiswa ini adalah manfaat kecelakaan yang menyebabkan kematian dan manfaat kematian. Artinya peserta kita yang meninggal oleh sebab apapun, sengaja atau tidak sengaja, dua anaknya akan kita beri beasiswa dari sekolah TK sampai lulus sarjana atau sampai umur 23 tahun.

Tadi kami mendapatkan masukan dari Bapak tadi, luar biasa masukannya, belum pernah terpikir oleh kita, untuk memberikan beasiswa pada pekerja. Ini memang kita belum ada. Namun ini akan kita kaji bagaimana kita bisa memberikan manfaat beasiswa untuk pekerja. Ini ide dan masukan yang sangat bagus, kami perhatikan Pak, kita akan coba kaji.

Kemudian yang terkait investasi ini saya berterima kasih kemarin mendapatkan undangan dari Komisi IX DPR RI untuk RDP. Ini adalah kesempatan kami untuk memberikan klarifikasi terhadap berita-berita di medsos yang simpang siur untuk memberikan jawaban atau klarifikasi atau kepastian untuk menenangkan masyarakat agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi.

Bahwa perlu kami sampaikan, kalau kita membaca dari berita-berita yang terakhir itu *carut-marut* investasi di BPJS Ketenagakerjaan, pengelolaan investasi BPJS Ketenagakerjaan itu *fully regulated*, artinya diatur sedemikian rupa oleh regulasi yang berlapis-lapis, dilakukan pengawasan oleh badan pengawas berlapis-lapis, baik pengawasan internal ataupun pengawasan eksternal yang saya sebutkan tadi. Tentunya dengan pengawasan, dengan regulasi yang ketat, kita tidak bisa melakukan investasi sedemikian rupa atau seenaknya atau sembarangan sehingga kata *carut-marut* tersebut kami pastikan itu tidak benar.

Kemudian juga diberitakan ada kerugian BPJS Ketenagakerjaan, rugi 13 triliun. Itu perlu kami sampaikan dan tegaskan, tidak ada kerugian 13 triliun. Jadi yang namanya rugi itu kami menjual barang, dibukukan, rugi. *Lost* itu rugi. Jadi tidak ada/tidak pernah kami melakukan penjualan barang terus rugi. Bahkan di laporan kami, tadi kami sampaikan, di tahun 2019 kita malah memberikan hasil investasi sebanyak 29 triliun. Malah memberikan hasil investasi, memberikan keuntungan disitu.

Namun demikian kalau disebut apakah ada potensi kerugian. Potensi kerugian ini perlu hati-hati membacanya, karena apakah ini sudah dianggap potensi atukah belum. Karena namanya investasi saham itu terpapar oleh harga saham, setiap hari naik dan turun/*mark to market*. Karena kalau ada kenaikan 1 persen di indeks harga saham,

implikasinya adalah akan ada kenaikan 1,4 triliun di portofolio BPJS Ketenagakerjaan. Sebaliknya, kalau ada penurunan indeks 1 persen akan berdampak pada penurunan 1,4 triliun. Tetapi apakah itu sudah menjadi kerugian? Belum, karena tidak kami realisasikan. Apakah itu berpotensi rugi? Bisa dikatakan “iya”, bisa dikatakan “tidak”. Tidak karena apa, kita harus melihat isi portofolionya itu. Tadi isi portofolio sudah kami sampaikan di halaman 59. Apakah di halaman 59 *emittance* yang kami investasi itu berpotensi akan gulung tikar dalam waktu dekat misalnya. Ataukah apa? Ini yang mungkin perlu bijak di dalam membaca namanya potensi resiko/potensi kerugian. Kalau istilah umumnya adalah *unrealized lost*, atau *unrealized gain*. Di saham selalu disebut *unrealized gain* atau *unrealized lost*. Jadi *gain* yang belum direalisasikan, atau *lost* yang bisa direalisasikan. Dalam satu hari bergerak. Bergerak naik 1 persen naik 1,4 triliun, turun 1 persen turun 1,4 triliun.

Kemudian temuan dari BPK. BPK setiap melakukan pengawasan, ikhtisar hasil pengawasan itu bisa di akses oleh publik. Dimuat di laman BPK, sehingga siapapun bisa melihat disitu. Hanya mungkin melihatnya atau membacanya yang proporsional. Jangan membacanya dari sudut yang menakutkan, tetapi yang proporsional.

Misalnya disitu ada tertulis BPJS Ketenagakerjaan belum memiliki *road map* investasi. Kalau dibaca titik, menakutkan. Tetapi itu panjang disitu. belum memiliki *road map* investasi langsung terkait dengan pemanfaatan lahan-lahan kosong. Jadi mungkin perlu hati-hati membaca.

Pada waktu kami mendapatkan *link* berita dari Kumparan, kami terinformasi bahwa itu bukan dari Kumparan, tetapi itu *link*-nya Kumparan. Dan kami mendapatkan informasi penulis adalah bukan wartawan Kumparan, tetapi wartawan dari perusahaan lain. Ini adalah blog, blog itu kita bisa menulis di blog itu, siapapun bisa. Kami, Bapak/Ibu sekalian, juga bisa menulis di blog Kumparan. Seperti Kompasiana. Isi kebenaran dari tulisan tersebut sepenuhnya tanggungjawab dari penulis. Oleh karena itu tim dari humas kami mengundang penulis ke kantor kami, ditemui bahwa tulisan anda seperti ini, kita jelaskan “ini loh faktanya, ini bukti-bukti tertulisnya”, dan sebagainya. Terjadi dialog dengan tim kita. Akhirnya penulis ini menyadari sendiri. Mungkin karena kesadaran tersebut, penulis ini yang menurunkan atau apa kami tidak tahu, namun demikian konsekuensi dari tulisan itu menjadi tanggungjawab penulis pribadi. Ini yang terjadi sebenarnya seperti demikian.

F-PG (DRS. H. DARUL SISKA):

Interupsi, Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Darul.

F-PG (DRS. H. DARUL SISKA):

Pak Dirut, terkait dengan penulis yang menulis tentang BPJS Ketenagakerjaan yang tulisannya tidak akurat dan mencemarkan nama baik BPJS Ketenagakerjaan apakah ada upaya hukum yang Bapak lakukan? Karena ini menyangkut kepercayaan publik Pak pada satu institusi yang terkait dengan kepentingan pekerja migran kita di seluruh daerah dan di beberapa negara.

Terima kasih Pak.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (AGUS SUSANTO):

Baik, ijin Pimpinan.

Jadi akan kami konsultasikan di internal dulu Pak apa yang akan kita lakukan untuk langkah-langkah kedepan. Tapi tentunya kita semua ingin menjaga ketenangan suasana berinvestasi di Indonesia dan juga ketenangan berusaha dan ketenangan para pekerja yang memiliki atau menitipkan dananya di BPJS Ketenagakerjaan.

Nanti yang terkait dengan data-data perusahaan, seperti Bijak, SIP, kami akan sampaikan secara tertulis, bahwa itu di konsolidasi di data DJS atau Dana Jaminan Sosial kita. Itu sangat transparan. Itu adalah investasi langsung. Kalau kita lihat datanya investasi langsung kita kurang dari 1 persen. Bahkan besarnya kurang lebih sekitar 600 miliar *something*. Sehingga kalau mungkin ditengarai atau dikhawatirkan yang rugi-rugi dititipkan di anak perusahaan saya kira tidak mungkin, karena sekarang asetnya pun hanya 600/kurang lebih 600 miliar. Nanti pastinya akan kami sampaikan secara tertulis.

Kemudian data aset-asetnya ada dimana? Asetnya ada Pak berupa tanah, tanah kosong. Bahkan nanti Bapak/Ibu Komisi IX kalau ke daerah kebetulan ada tanah kita silakan dilihat, kami senang sekali untuk di tengok. Tanahnya masih menjadi tanah kosong, bahkan tidak terawat. Ini kita pusing juga untuk memikirkan bagaimana ini tanah-tanah ini mau diapakan ini. Satu yang sudah kita manfaatkan, yang sudah kita garap, adalah tanah yang di depan KPK di Kuninggan. Karena tanahnya strategis, harganya mahal, tidak terlalu besar, sehingga jajaran manajemen memutuskan untuk memanfaatkan tanah tersebut dalam bentuk bangunan investasi, yaitu ada gedung baru yang nanti itu adalah untuk investasi.

Disewakan. Kita/BPJS Ketenagakerjaan kalau sebagian pindah atau menempati ruangan itu nanti membayar. Kita membayar kepada siapa? Kepada PT SIP. PT SIP ini nanti juga akan diberikan kepada peserta. Jadi sebetulnya kita akan membayar kepada peserta juga. Ini yang baru bisa kita manfaatkan.

Yang lain kita masih kebingungan ini untuk memanfaatkan tanahnya mau diapakan ini. Digarap oleh siapa, bagaimana mekanismenya, kami butuh masukan dari Bapak-bapak Komisi IX mungkin memberikan *inside* kepada kita bagaimana bisa memanfaatkan lahan-lahan kosong ini untuk pemanfaatan kepada peserta.

Mungkin ini *summary* yang kami sampaikan.

F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Ibu Kurniasih.

F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si):

Tentang tadi tanah. Artinya berarti kan memang betul BPK ketika menyampaikan di ikhtisar hasil pemeriksaan semester II 2018 mengatakan bahwa ada pelaksanaan kebijakan yang mengakibatkan hilangnya potensi penurunan itukan.

Maksud saya begini, artinya ada kendala. Ini yang kita harapkan, keterbukaan ini. Saya apresiasilah ini bisa terbuka seperti ini, sehingga kita tahu masih ada aset yang belum teroptimalkan. Mari kita duduk bareng dan kita selesaikan.

Saya berharap dalam hal pengelolaan investasi yang lainnya juga, seperti tadi disampaikan oleh Ibu Dewi, Pak Abidin, itu ditransparansikan ke Komisi IX.

Begitu, Pimpinan, terima kasih penjelasannya.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Kurniash.

Mengingatkan sekali lagi, Pak Agus dan Direksi semua jajaran BPJS Tenaga Kerja. Prinsipnya, karena kita bermitra, jadi tentu kita ingin agar semuanya *clear* di gedung ini, sehingga yang namanya tadi berbagai isu itu bisa *clear* dan kita kerja dengan tenang.

Silakan Pak Rahmad.

F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI., MM):

Terima kasih Pimpinan.

Saya menyoal bukan sebatas pada beasiswa, Pak Dirut. Saya justru mengusulkan untuk vokasi itu diperluas kepada keluarga. Kalau sebatas peserta yang PHK, itu kan terbatas sekali. Jadi mohon barangkali vokasi itu yang bisa dimanfaatkan untuk keluarganya. Suaminya yang kerja, istrinya menganggur bisa jadi di pendidikan khusus. Anaknya juga barangkali. *Wong* beasiswa kan juga begitu. Beasiswa kan tidak langsung kepada ke pesertanya, tapi justru anaknya.

Yang kedua, Pimpinan, saya mengusulkan untuk rapat kemudian, saya mengusulkan dalam forum yang baik ini kita ingin mendengarkan program kerja keseluruhan direksi secara kelembagaan. Kepesertaannya itu bagaimana untuk merekrut yang lebih banyak lagi. Kemudian dari SDM nya itu seperti apa. Walaupun acara hari ini kita secara komprehensif sudah cukup ada gambaran bagaimana investasi yang transparan, saya *appreciate*. Tetapi untuk yang lain barangkali divisi-divisi/bidang-bidang yang lain saya kira untuk kedepan kita coba ingin mendengarkan secara keseluruhan, biar kami juga ikut memberikan urun rembuk dikemudian hari dalam rangka untuk sama-sama fungsi pengawasan dan untuk memajukan bersama-sama sebagai fungsi tanggungjawab.

Begitu, Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Dari Pak Dirut sudah?

Mau ke direktur yang lain ya?

Pertama-tama dari direktur yang lain terkait investasi, vokasi, atau kepesertaan?

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (AGUS SUSANTO):

Cukup Pak.

Tadi ingin menambahkan yang terkait sama rekomendasi panja. Rekomendasi panja sudah sebagian kita tindaklanjuti. Ada beberapa yang belum ini, terutama yang terkait dengan regulasi dan pihak eksternal yang di luar jangkauan dari BPJS Ketenagakerjaan. Namun demikian nanti akan kami lengkapi lagi di jawaban tertulis kami.

KETUA RAPAT:

Baik, kalau cukup dari BPJS, kita sudah bisa masuk kesimpulan.

Dari Bapak/Ibu sekalian cukup? Kita masuk ke kesimpulan ya.

Silakan Pak Harun.

F-KB (H. HARUNA, M.A., M.B.A):

Tadi Pak yang saran itu yang tidak punya resiko yang 1.700 BPR di Indonesia, sekaligus menyelamatkan. Karena itu tidak ada resikonya Pak, 200 persen tidak punya resiko, karena masuk dalam daftar LPS. Jadi kapan bank nya macet, Pemerintah bayar. Jadi Bapak tidak punya resiko Pak. Sekaligus menghidupkan, menantang, mengantisipasi Bank Indonesia yang mewajibkan menambah modal setor 12 miliar. Kemungkinan BPR di Indonesia itu akan tutup 80 persen. Banyak BPR belum tentu Pak, apalagi kalau habis. Itu yang kayaknya BPR menyentuh rakyat. Tidak sama bank plat merah, bank swasta besar, itu minta neraca ini-neraca itu, aset, kemudian pasifa, aktifa, SITU, NPWP, dia minta 14 macam Pak. BPR cuma dua macam, surat keterangan lurah/camat, dan bukti usaha, kasih. Apa tidak menguntungkan rakyat terbanyak Pak. Saya kira itu yang Bapak harus jelaskan.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak di respon.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (AGUS SUSANTO):

Terima kasih Pak.

Konsern Bapak sangat bagus. Namun demikian kami/BPJS Ketenagakerjaan dalam mengelola investasi terikat dengan regulasi. Jadi regulasinya belum mengakomodasi.

Untuk investasi di BPR, tadi juga dari Pak Nabil untuk investasi di koperasi, untuk saat ini belum diperbolehkan, artinya tidak ada regulasi yang bisa memayungi kami untuk investasi di koperasi atau BPR. Ini mungkin yang perlu kita sama-sama lakukan kajian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Sebentar, tunggu, ini kayaknya Pak Amran ada mau. Silakan Pak.

BPJS KETENAGAKERJAAN:

Pimpinan dan Anggota Komisi IX yang saya hormati.

Jadi memang di dalam regulasi itu kita hanya bisa menempatkan kepada bank buku III dan buku IV. Bank buku III dan buku IV itu dengan tingkat kesehatan tertentu. Bank buku II saja kita tidak bisa tempatkan.

Misalnya ada bank swasta yang mempunyai buku itu bank dengan kegiatan usaha. Jadi bank buku IV itu yang tertinggi. Kalau buku II saja kita tidak bisa, sedangkan BPR itu ada dibawahnya, di regulasi kita tidak ada.

Kecuali kita bisa menempatkan kepada bank buku II dan I apabila dia adalah bank pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah. Kayak Bank NTT itu bank buku II, dan bahkan bank yang lain ada yang bank buku I, itu kita bisa menempatkan, karena bank tersebut adalah bank pemerintah, walaupun daerah.

Jadi bukannya kita tidak mau. Semangatnya baik untuk masuk ke dalam BPR, karena itu mendorong UMKM. Tapi memang regulasi itu kita tidak bisa, karena ada regulasi yang membatasi.

Demikian Pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.
Dari Pak Fadholi.

F-NASDEM (DRS. FADHOLI):

Tadi ada yang menanyakan, termasuk saya juga menanyakan belum di jawab, sedikit saja itu mungkin, terkait dengan program sosial yang diberikan oleh BPJS, termasuk CSR itu berapa jumlahnya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan.
Ini Pak Fadholi sudah masuk kesimpulan ini.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (AGUS SUSANTO):

Mungkin Ibu Direktur Keuangan dipersilakan.

DIREKTUR KEUANGAN BPJS KETENAGAKERJAAN:

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.
Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.

Terima kasih Pimpinan dan para Anggota Komisi IX semuanya.

Memang untuk yang CSR ini saat ini kita dibatasi oleh PMK, dimana CSR ini hanya maksimum sebesar 1 persen dari profit atau labanya BPJS Ketenagakerjaan. Saat inikan karena kita semua tahu bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu memang lembaga nirlaba, sehingga laba BPJS Ketenagakerjaan sebagai institusi itu memang tidak akan pernah besar. Oleh karena itu CSR kita itu memang sangat terbatas sekali. mengapa sangat terbatas, mungkin pertimbangannya dulu Kementerian Keuangan menganggap bahwa justru kita itu nirlaba sehingga kita tidak diharapkan untuk melakukan itu. Karena secara *nature* sebetulnya BPJS Ketenagakerjaan itu sudah merupakan institusi jaminan sosial dimana didalamnya terkandung sebetulnya istilahnya 'memberdayakan' masyarakat dari sisi resiko-resiko sosial para pekerja.

Barangkali itu Pak. Jadi memang saat ini kami sedang berupaya untuk supaya itu bisa diperbaiki, karena memang banyak sekali aspirasi dari masyarakat tetap mengharapkan BPJS Ketenagakerjaan untuk ikut berkontribusi dari sisi CSR. Sama seperti waktu jaman PT Jamsostek dulu. Tetapi karena ada keterbatasan regulasi. Memang regulasinya ini yang harus diperbaiki terlebih dahulu

Barangkali itu jawabannya, Pak Dirut.

KETUA RAPAT:

Saya perpanjang dulu setengah jam ke depan ya sampai 17.30.

(RAPAT: SETUJU)

Pak Fadholi cukup?

F-PG (DRS. H. DARUL SISKA):

Pak Ketua sedikit saja.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Darul.

F-PG (DRS. H. DARUL SISKA):

Soal BPJS Tenaga Kerja dan BP Jamsostek tadi Pak.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (AGUS SUSANTO):

Mungkin Direktur Renstra kita yang akan menjawab, silakan.

DIREKTUR RENSTRA:

Terima kasih Pak Dirut.

Yang kami hormati Pimpinan; dan
Anggota Komisi IX yang kami hormati.

Sebenarnya kami tidak ganti nama. Yang sering salah adalah kami ganti nama. Sejujurnya bahwa sesuai dengan undang-undang nama kami tetap 'BPJS Ketenagakerjaan'. Namun kita sadari pada saat kita bertemu dengan masyarakat, BPJS sudah terlanjur terkenal untuk saudara kembar kami, yaitu 'BPJS Kesehatan'. Tadi juga saya mendengar dari Ibu Krisdayanti menyebutnya BPJS Kesehatan. Untuk itulah kami melakukan survei bagaimana kalau kemudian orang kemudian tidak salah antara dua BPJS tersebut. Dari survei itu kami mendapatkan kata-kata 'Jamsostek', karena dulu sudah pernah populer.

Tetapi tentunya juga harus ada yang baru, karena kita adalah badan penyelenggara, bukan PT lagi. Sehingga dengan demikian harapan kami adalah kami tidak tertukar/bukan yang tertukar, sehingga orang mengenal kami sebagai BP Jamsostek, yaitu betul-betul yang menjalankan empat program, yaitu jaminan kecelakaan kerja, kematian, JHT, dan juga jaminan pensiun. Harapannya seperti itu Pak.

Dan kami juga melakukan *review* terus, ternyata ini jauh lebih efektif daripada kami mengenalkan 'BPJS Ketenagakerjaan' yang dilafalkannya juga cukup sulit.

Mungkin demikian jawaban dari kami Pak, terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Sumarjono.
Pak Darul, ada lagi yang perlu didalami Pak?
Sudah jempol dua.
Yang lain, Pak Yahya? Cukup ya.
Pak Alifuddin?
Baik, kita masuk kesimpulan.
Kami minta teman-teman TA.

Draft Kesimpulan
RDP Komisi IX DPR RI dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan

Dengan 'Direksi' saja saya kira ya.

1. Komisi IX DPR RI memberikan apresiasi atas kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dengan BP2MI, kementerian dan lembaga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, guna memberikan perlindungan jaminan sosial kepada PMI, termasuk pelaut, awak kapal, dan pelaut perikanan;

Bapak/Ibu Anggota Komisi IX apakah disetujui atau ada catatan?
Silakan Pak Yahya.

F-PG (M. YAHYA ZAINI, S.H):

Saya kira apresiasi patut diberikan. Tapi karena kinerjanya belum 50 persen barangkali perlu terus di dorong, supaya ada terobosan-terobosan yang lebih nyata. Kan baru 30 persen dari data yang ada itu, saya kira ditambah saja disitu.

KETUA RAPAT:

Usulan Pak Yahya berarti 'di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk melakukan terobosan-terobosan', begitu Pak Yahya ya?, 'termasuk terus melakukan terobosan-terobosan guna memberikan perlindungan' dan seterusnya sama.

Coba Pak Yahya usulan.

F-PG (M. YAHYA ZAINI, S.H):

Saya kira jangan 'termasuk'. Barangkali 'dan perlu terus dilakukan terobosan', kira-kira begitu ya. Karena itu beda dengan satu 'apresiasi', yang kedua 'mendorong'. Saya kira itu mungkin.

KETUA RAPAT:

'dan perlu terus melakukan.

F-PG (M. YAHYA ZAINI, S.H):

Iya 'melakukan terobosan' dan seterusnya itu.

KETUA RAPAT:

Bapak/Ibu sekalian,

Silakan catatannya.

Nanti dari mitra sekaligus. Setelah kami selesaikan baru nanti catatan dari direski.

Kami ulangi lagi:

'Komisi IX DPR RI memberikan apresiasi atas kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dengan BP2MI, kementerian dan lembaga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan

perlu terus melakukan terobosan guna memberikan perlindungan jaminan sosial kepada PMI, termasuk pelaut, awak kapal, dan pelaut perikanan’

F-NASDEM (RATU NGADU BONU WULLA, S.T):

Sedikit tambahan. Mungkin redaksinya saya bisa tambahkan:

“Komisi IX DPR RI memberikan apresiasi atas kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dengan BP2MI, kementerian dan lembaga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri guna memberikan perlindungan jaminan sosial kepada PMI, termasuk pelaut, awak kapal, dan pelaut perikanan, dan terus melakukan terobosan guna perlindungan jaminan sosial bagi PMI.”

Karena yang di apresiasi itu kan terobosan yang dibuat terhadap pelaut dan awak kapal, tetapi perlu terobosan-terobosan lain lagi selain perlindungan terhadap awak kapal. Mungkin ada terobosan lain lagi yang dibuat, itu mungkin yang diinginkan. Jadi ini sekarang sudah ada apresiasi terhadap terobosan yang dibuat, perlindungan terhadap awak kapal. Mungkin nanti yang lain lagi, mungkin masih banyak pekerja-pekerja yang perlu mendapatkan perlindungan. Contohnya Ojek *online*, mungkin ini kedepan menjadi terobosan yang diambil oleh BPJS Tenaga Kerja.

KETUA RAPAT:

Ada opsi yang lain, yang tadi dari Pak Yahya seperti itu, dari Ibu Ratu ada opsi yang lain.

F-KB (Hj. NUR NADLIFAH, S.Ag., M.M):

Ijin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Ibu Nadlifah.

F-KB (HJ. NUR NADLIFAH, S.Ag., M.M):

Kalau disitu disebut ‘termasuk pelaut, awak kapal, dan pelaut perikanan’, pertanyaan saya, kalau yang kapal pesir masuk atau tidak? Kalau memang sudah itu disebut ‘awak kapal pelaut perikanan’ apakah tidak awak kapal atau orang yang bekerja di kapal begitu. Jadi biar bisa meluas untuk semua awak kapal, baik itu kapal pesiar, kapal laut, kapal nelayan, atau kapal apalagi mungkin.

Ini pertanyaan saya saja. Kalau memang ternyata tidak, saya rasa kan mereka juga sebagai pelaut juga/orang yang bekerja juga yang harus mendapatkan perlindungan.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Memang ini suatu rangkuman dari urusan pekerja di laut. Dan judulnya memang ‘awak kapal dan pelaut perikanan’, jadi ini untuk mereka semua yang bekerja di laut.

Jadi dari dua ini kita, tadi usulan Pak Yahya tadi dan usulan Ibu Ratu, kita putuskan yang mana ini?

Yang lebih pas yang mana kalau Ibu Kurnia.
Poin 1 ya, oke kita ambil yang poin 1 yang bagian a.

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pelatihan vokasi yang diadakan pada bidang yang menjadi prioritas berdasarkan kebutuhan dan karakteristik setiap daerah, dan memperluas program vokasi kepada keluarga peserta sehingga mampu menciptakan peluang kerja dan angkatan kerja pada masa yang akan datang;

Silakan Ibu Kurniasih.

F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si):

Artinya vokasinya ditujukkannya tidak hanya untuk pekerja dalam negeri, tapi juga di luar negeri juga. Tadi kan sudah punya programnya, sayang kalau tidak dimasukkan. Ada programnya, seperti 'bahasa' tadi itu yang saya baca di *slide*-nya.

KETUA RAPAT:

Ditambahkan dimana biar pas?

Ibu Kurniasih, bisa ditambahkan mungkin dia punya kata-katanya dimana, biar pas seperti yang dimaksudkan. Jangan lagi alternatif, itu cuma tambahan ya.

F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si):

Bisa minta tolong diturunkan, soalnya itu terpotong, tulisannya tidak terbaca.

KETUA RAPAT:

Nomor 2 diturunkan lagi biar tidak terputus.

F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si):

'Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pelatihan vokasi bagi para pekerja, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri'

F-PG (M. YAHYA ZAINI, S.H):

Sebentar, Pak Ketua.

Kalau yang sudah dilaksanakan BPJS itu kan bukan pekerja setelah di luar negeri, tapi pekerja yang akan ke luar negeri, yaitu pelatihan bahasa. Jadi mungkin beda Ibu Kurniasih barangkali.

Intinya semangatnya sudah dilaksanakan untuk persiapan PMI ke luar negeri melalui pelatihan bahasa. Bukan pekerja yang ada di luar negeri. Yang kita fokuskan kan di dalam negeri.

Semangatnya sama saya kira.

F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si):

Semangatnya sama. Tanya dulu Pak buat PMI nya mungkin tidak dilakukan *reskilling* misalnya.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (AGUS SUSANTO):

Mohon ijin, Bapak Pimpinan Rapat.

Ini untuk diketahui bersama ya. Memang kita sekarang memang fokusnya pelaksanaan vokasi kepada yang berada di tanah air. Tetapi saudara kita itu, perbankan, Bank Mandiri, BRI, itu sudah memberikan pelatihan vokasi kepada PMI yang menjelang pulang ke tanah air. Dia merangkul bapak asuh perusahaan platinum, supaya waktu mereka pulang dengan bawa uang mereka sudah bisa beli tanah. Model bisnisnya ada badan usahanya, ada pendampingannya, sampai dia bisa berusaha. Jadi Bank Mandiri itu *output*-nya sudah 1.500 individu pertahun, sudah berjalan 8 tahun. Jadi vokasinya dilakukan di tiap negara Pak

Dan sebetulnya yang sekarang kita perlukan adalah karena banyaknya permintaan PMI di luar negeri. Yang kita perlukan adalah sertifikasi bukan hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari sertifikasi standar internasional. Terus terang kami malu Pak, sampai kemarin saya baru pulang dari Australia, mereka banyak tenaga asing yang bekerja disana lebih banyak tenaga kerja yang datangnya dari negara-negara antah berantah, kayak Butan, Nepal. Karena di tempat negara mereka sudah ada sertifikasi oleh negara-negara *commonwealth*, jadi kalau dia lulus di Nepal atau di Butan ataupun dimanapun bisa kerja di Australia dan dimana-mana. Waktu saya ketemu Ibu Konjen dia tanya, kita mau memperjuangkan ini, supaya sertifikasi internasional yang 3 bulan atau 6 bulan kalau diberdayakan buat PMI itu mereka kalau lulus bisa langsung kerja di negara-negara tersebut. Sekarang kebutuhan PMI di luar negeri sangat besar, di Jepang, di Korea.

LPK-nya kami mohon dukungan Bapak/Ibu kalau ke dapil masing-masing supaya memberdayakan LPK nya bekerjasama dengan kita supaya bergabung dengan program vokasinya kita. Karena rata-rata yang ada vokasi bahasa di tiap daerah minim sekali. Jadi kalau kita bekerjasama di setiap kabupaten ada vokasinya, ada LPK nya, merapat ke kita, kita bantu. Dan kita sertifikasinya bukan hanya BNSP, karena dampak dari *disrupsi* memang tidak ada pekerjaannya. Tapi kita menyiapkan sertifikasi internasional. Kalau mereka kompeten bahasanya, dan ada *skill*-nya, mereka bisa langsung ke luar negeri.

Jadi kelemahannya kita sekarang memang *demand*-nya banyak di tiap negara. Karena kami juga berkoordinasi dengan BNP2TKI, tetapi LPK nya terbatas. Yang belum tahu juga terbatas. Kami memang harus banyak melakukan sosialisasi. Tiap kelas itu rata-rata hanya 20 orang. Yang tadi Bapak lihat ada di puluhan kota, rata-rata perkelasnya levelnya baru 20-an. Jadi memang kalau 2.900 itu prestasi, tapi karena kelasnya memang 20 orang.

Jadi kami mohon dukungan Bapak-bapak di dapil masing-masing supaya memberdayakan LPK merapat ke kita, supaya kita bisa jalan Pebruari ini.

Kurang lebih itu, terima kasih.

F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI., MM):

Pimpinan, ijin.

KETUA RAPAT:

Pak Rahmad silakan.

F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI., MM):

Saya kira ini justru bagus, ini masukan yang baik saya kira. Justru malah kita angkat kesimpulan tersendiri, kesimpulan agar Komisi IX mendorong kepada BPJS Tenaga Kerja untuk melakukan kerjasama dengan BLK-BLK yang ada di daerah-daerah dalam rangka meningkatkan SDM, terutama dalam bahasa. Jadi ada payung hukum kita agar mendorong untuk berkomunikasi dengan BPJS Tenaga Kerja dalam rangka untuk meningkatkan SDM. Tadi justru dapat fasilitas dari mereka.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Cuma saya mau tanya dulu ini. Tadi bicara 'LPK', bukan 'BLK'. Itu salah satu atau dua-dua itu? LPK itu swasta, BLK itu punya Pemerintah.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (AGUS SUSANTO):

Kami berkolaborasi dengan keduanya. Biasanya kalau BLK punya Pemerintah sudah punya programnya. Jadi waktu kami mau ajak bergabung, dia bilang "kami harus selesaikan tugas kami dulu yang datang dari kementerian, harus habiskan anggaran dulu, baru kita bisa bekerjasama dengan anda". Karena dia kapasitasnya terbatas.

Sekarang dari Kemenaker kan ada BLK komunitas, anggarannya luar biasa besar. Kami itu hanya seperempat puluhnya dari Kemenaker. Mereka 10 triliun, kita hanya 260 miliar. Karena mereka adalah bentuknya di BLK komunitas, kami mohon dukungan supaya kita bisa sama-sama. Karena kami memang pasti menyesuaikan dengan program Pemerintah, itu pasti. Tetapi kita memang perlu diajak/dirapatkan supaya koordinasi bagus.

Kurang lebih seperti itu, mohon ijin.

F-NASDEM (RATU NGADU BONU WULLA, S.T):

Ijin Pimpinan mungkin.

Mungkin bisa diberikan kami informasi bagaimana caranya LPK-LPK di daerah bisa bergabung, mungkin caranya seperti apa. Kebetulan juga kalau di daerah saya sebagai Ketua HIPKI (Himpunan Penyelenggara Kursus), ini mungkin bisa diinformasikan ke kami agar informasi ini langsung kami *share* ke LPK-LPK yang ada di daerah. Kebetulan khususnya untuk wilayah NTT daratan Sumba itu tidak ada satupun LPK yang menjadi mitra dari BPJS Tenaga Kerja.

Mungkin itu, terima kasih.

BPJS KETENAGAKERJAAN:

Tadi disampaikan oleh Bapak Dirut memang kami masih dalam tahap *piloting*. Kita jalankan dengan kehati-hatian. Kita sekarang perpanjang *piloting* sampai dengan Maret. Karena ini memang kami dasar hukumnya hanya ada dari PMK. Tidak ada teknis-teknisnya dari Permenaker, semuanya langsung berbentuk perdirinya direksi. Jadi kita waktu mau memperluas program, kita mohon maaf kalimatnya seperti arahan Permenaker karena tidak ada, kita membentuk sendiri. Sekarang kita fokus kepada ter-PHK. Jadi setelah selesainya *piloting*-nya tadi kita merencanakan di April. Kita sudah *full blast* di setiap kabupaten, di setiap cabang itu kita sudah mulai berjalan. Tetapi Pebruari ini sebetulnya sudah berjalan. Hanya masih menggunakan konsep lama.

Kurang lebihnya itu, Bapak.

KETUA RAPAT:

Baik, berarti urusan ini, tadi juga memang kan saya berkali-kali minta biar juga bicara sebelum ambil kesimpulan. Ini kita mau kesimpulan masih bicara soal menyangkut ini lagi ini, soal menyangkut punya Pak Krisna ini. Jadi nanti soal ini tolong kami dikasih tertulis saja ininya. Kaitan juga berbagai kebutuhan urusan hukum juga beritahu ke kami, biar bisa mana yang kami coba bantu kami bantu.

Kayak kemarin BPJS Kesehatan sama Kemenkes waktu disini juga tidak ada titik temu, kita harus buat dua kali FGD, sampai melibatkan Pimpinan DPR, dan kemudian sekarang sudah jalan.

Jadi kalau misalnya kendala di urusan PMK/Menteri Keuangan bisa beritahu kami, nanti kami komunikasi lewat Komisi XI untuk ngomong ke Menkeu juga untuk bisa melonggarkan aturan-aturan.

Jadi kalau ada kendala, tadi seperti kata Ibu Kurniasih, itu ada kendala disampaikan apa adanya. DPR ini kami punya semua jalur untuk membuka hambatan-hambatan terkait dengan program yang itu penting bagi rakyat. Jadi kalau ada hambatan kasih tahu ke kami, nanti kami buka *lock*-nya itu melalui jalur-jalur kami di DPR saya kira.

Langsung ke poin ke 2 ya:

"Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pelatihan vokasi bagi pekerja di dalam dan di luar negeri yang diarahkan pada bidang yang jadi prioritas berdasarkan kebutuhan dan karakteristik setiap daerah, dan memperluas peluang vokasi kepada keluarga peserta sehingga mampu menciptakan peluang kerja dan angkatan kerja pada masa yang akan datang."

Sampai *keluarga* sajarah itu, tidak usah pakai *menciptakan*. Sampai di *keluarga peserta* saja, *sehingga* di bawah buang saja itu. *sehingga* sampai ke bagian bawah dibuang saja, membuat kita bingung itu.

F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si):

Izin menambahkan, Pimpinan.

Daerah/negara, karena ini kan tidak hanya dalam negeri kan. Jadi kalau yang dalam negeri itu sesuai dengan kultur daerahnya, kalau yang luar negeri sesuai dengan kebutuhan negaranya.

KETUA RAPAT:

Daerah/negara ya.

Nomor 2 oke ya?

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi IX DPR RI meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk mengelola dana pekerja yang diinvestasikan, terutama pada surat berharga, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi aspek likuiditas, solfabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai, sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi pekerja;

F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si):

Izin, Pimpinan.

Karena tadi masih ada beberapa kendala juga yang dihadapi dan perlu kita diskusikan bersama saya kira mungkin ada rekomendasi juga dalam kesimpulan poin nomor 3 ini dilanjutkan dalam rapat khusus yang khusus membahas tentang tata kelola investasi. Supaya tadi kayak pemberdayaan tanah, dan mungkin juga investasi yang lainnya. Tata kelolanya itu bisa dibahas khusus masukan-masukan dari Komisi IX seperti apa.

KETUA RAPAT:

Silakan Ibu Kur kalau kira-kira ada rekomendasi kalimatnya, sambungannya.

F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si):

'Komisi IX DPR RI meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk mengelola dana pekerja' ditambahkan dibelakangnya 'dan diagendakan rapat khusus', begitu saja di belakang kalimatnya itu.

'kehati-hatian, keamanan dana' sampai 'bagi pekerja, dan diagendakan dalam rapat khusus dengan Komisi IX', atau 'untuk itu perlu dilakukan agenda rapat khusus tentang tata kelola investasi'

KETUA RAPAT:

Oke poin 3?

Jadi kayak macam kita RDP, tapi dengan poin khusus ya.

F-PG (M. YAHYA ZAINI, S.H):

Saya kira begini, Ketua, kata 'yang memadai' diganti 'yang optimal'. 'hasil yang optimal', bukan 'memadai' itu.

KETUA RAPAT:

'yang memadai' nya dibuang, ganti 'optimal'.
Setuju ya.

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan membuat langkah strategis dan terobosan dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan era digitalisasi terhadap upaya perlindungan bagi pekerja;

BPJS KETENAGAKERJAAN:

Maaf, Ketua, izin ke *rest room* sebentar.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak.

Cocok ya?

(RAPAT: SETUJU)

5. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan publikasi atas kinerja dan capaian untuk meluruskan pemberitaan-pemberitaan di media massa yang tidak benar sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari;

Coba bahasanya dibuat lebih positif ini soal 'pemberitaan-pemberitaan di media massa yang tidak benar', jangan dipakai model begitu. Coba cari bahasa-bahasa yang positif itu.

Untuk meluruskan-nya dibuang saja itu, seolah-olah kan berita-berita bengkok-bengkok itu.

Pemberitaan-pemberitaannya juga dibuang itu.

Jadi saya ulangi lagi:

"Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan publikasi atas kinerja dan capaian di media massa sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari."

Tunggu, kata-kata *permasalahan* ini juga.

F-KB (Hj. NUR NADLIFAH, S.Ag., M.M):

Izin, Pimpinan.

Kalau bahasanya 'atas kinerja dan capaian di media massa', kalau setelah 'capaian' ditambah 'atas kinerja dan capaian prestasi'.

Kalau 'capaian di media massa' itu kesannya apa 'capaian di media massa' itu?

'capaian kinerja' tapi didepannya ada 'kinerja'.

'publikasi atas capaian kinerja'

KETUA RAPAT:

'kinerja' juga cukup, 'capaian' juga oke.

F-KB (Hj. NUR NADLIFAH, S.Ag., M.M):

'kinerja BPJS' mungkin bukan 'kinerja di media massa'.

KETUA RAPAT:

Dibuang sajalah itu. Itukan cuma menjelaskan ada masalah itu.

'sampai di media massa' titik saja sudah.

'sehingga tidak menimbulkan' itu dibuang saja.

F-NASDEM (DRS. FADHOLI):

Ketua, masukan saja.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Fadholi.

F-NASDEM (DRS. FADHOLI):

Saya pikir mungkin ini sudah bagus, jadi 'Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan publikasi melalui media massa atas capaian kinerjanya'

KETUA RAPAT:

Kalau Pak Fahdoli merubah posisi kata ini.

F-NASDEM (DRS. FADHOLI):

Jadi 'Komisi IX mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan publikasi melalui media massa atas capaian kinerja BPJS Ketenagakerjaan', titik.

KETUA RAPAT:

Saya perpanjang dulu, paling lama jam enam (18.00) sudah kita selesai ya. Biar sesudah itu bisa *sholat*. *Sholat* ganti-gantian. Yang mau *sholat* silakan *sholat*, ganti-gantian ya.

Diulangi lagi, ada usulan Pak Fadholi meletakkan kata 'kinerja' di belakang. Tapi mana-mana saja ini *oke*, Pak Fadholi. Jadi ini soal rasa saja.

Poin 5 cukup ya, cocok? Saya rasa Pak Fadholi setuju ini.

(RAPAT: SETUJU)

6. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan memberikan data-data sebagai berikut:
 - a. Aset BPJS dan aset dana jaminan sosial yang dimiliki dan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan secara transparan, termasuk penyertaan kepada instrumen investasi;
 - b. Data PMI yang bekerja di luar negeri;
 - c. *Road map* mengenai pemberian beasiswa yang disediakan BPJS Ketenagakerjaan;
 - d. Skema *Pelatihan Vokasi Indonesia Bekerja*, termasuk kerjasama dengan perusahaan dalam menjawab kebutuhan SDM.

Silakan, Bapak/Ibu sekalian.

F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI., MM):

Nambahin, Ketua.

Kami butuh juga program kerja BPJS 2020, masing-masing strategi Bapak untuk kepesertaan meraih, menggaet, kemudian risetnya seperti apa, program-program kerja deputi-deputi, asdep, dan yang lain. Jadi kalau dengan Pemerintah itu kan program kerja satuan kerjanya seperti apa, kita juga ingin tahu gambarannya ketika kita menilai/mengawasi itu kita tahu apa program kerja 2020 dari BPJS Tenaga Kerja.

Begitu Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik Pak Rahmad.

Silakan teman-teman secara keseluruhan poin per poin.

F-GERINDRA (OBON TABRONI):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Obon.

F-GERINDRA (OBON TABRONI):

Salah satu kepesertaan BPJS dengan kondisi sekarang itu banyak pekerja kontrak yang mereka hanya 6 bulan, kemudian bahkan 1 tahun bekerja, sehingga kalau mereka bekerja di tempat lain persoalan kepesertaannya menjadi menyambung atau tidak terputus? Tapi bagi peserta dengan masa kerja 6 bulan, karena sistem kontrak tidak bekerja lagi, dan saya yakin jumlahnya sangat banyak, kita mohon data yang pertama berkaitan dengan jumlah yang tidak aktif. Kemudian yang kedua bagaimana pengelolaan dana mereka, apakah termasuk dana tak bertuan atau segala macam bila peserta tersebut bekerja 6 bulan kemudian berhenti dan tidak melanjutkan bekerja lagi. Kadang-kadang kan orang malas mengambil uang yang kadang-kadang tidak seberapa itu dengan prosedur yang agak-agak rumit. Saya rasa itu, kita minta data itu Pak peserta-peserta yang masa kepesertaannya pendek kemudian tidak melanjutkan, kemudian bagaimana sistem keuangannya dalam pelaporan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Berarti ini masuk poin baru berarti ya. Itu bisa kita sambungkan tidak itu? Yang di poin b itu kan data PMI yang di luar negeri dan yang disampaikan Pak Obon punya itu.

F-GERINDRA (OBON TABRONI):

Ini dari dalam negeri.

KETUA RAPAT:

Apakah data pekerja dalam negeri dan data PMI luar negeri, jadi biar satu sambungan. Data yang kita minta itu, baik dalam dan luar negeri.

F-GERINDRA (OBON TABRONI):

Kalau yang di poin b itu menyangkut jumlah dari PMI yang bekerja di luar negeri. Tapi ini termasuk dana yang boleh dibidang tak bertuan itu tadi. Bukan hanya jumlah, tapi dananya juga.

KETUA RAPAT:

Pak Obon coba kita rumuskan kata-katanya, biar kita bisa taruh disitu.

F-GERINDRA (OBON TABRONI):

Peserta kalau 'tak bertuan' kita pandangan dari BPJS dulu Pak bagaimana ini.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (AGUS SUSANTO):

Kalau 'dana tidak bertuan' itu tidak ada Pak. Semua ada tuannya, ada pemiliknya. Karena kita catat *by name, by address*. Mungkin yang tepatnya adalah 'dana peserta aktif dan non aktif'

F-GERINDRA (OBON TABRONI):

Dananya Pak. Termasuk kepesertaannya juga, kita ingin tahu postur dari BPJS untuk peserta yang tidak aktif itu bagaimana.

KETUA RAPAT:

Kira-kira bahasanya untuk usulan Pak Obon adalah 'data peserta dan pengelolaan dana peserta aktif dan non aktif di dalam negeri'. Ini maksudnya yang di Indonesia kan, Pak Obon? Bukan PMI dalam negeri ya?

KETUA RAPAT:

Coba Pak Yahya, Pak Yahya bisa merumuskan itu.
'data peserta dan pengelolaan dana peserta aktif dan tidak aktif di dalam negeri'
Karena tidak ada dana tidak bertuan ya, Pak Dirut. Semuanya bertuan.
Kira-kira itu, setuju ya, poin ke 7, Ibu Kur, Pak Alifuddin?

(RAPAT: SETUJU)

Karena itu dapil kan. Ini pertanggungjawaban masing-masing ini.

7. Komisi IX DPR RI meminta BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi-
Semua 'perlindungan' jadi 'pelindungan', kita ikut pakai Undang-Undang PMI 'perlindungan' menjadi 'pelindungan'
'pelindungan PMI, baik di dalam dan di luar negeri, dan program pemberdayaan PMI dalam hal pengembangan desa kantong-kantong PMI, literasi keuangan, danvokasi bekerjasama dengan Anggota Komisi IX DPR RI di daerah pemilihannya masing-masing;

Cocok ya?

(RAPAT: SETUJU)

8. Komisi IX DPR RI meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi IX DPR RI pada RDP hari ini, disampaikan paling lambat hari Senin tanggal 24 Februari 2020;

Cocok?

Ini yang ke-9 jangan lupa ini, kita punya komitmen bersama kan 'Komisi IX mendesak'
Jangan *meminta*. Itu *mendesak* semua itu. Kata nomor 8 menjadi 'mendesak'. Jangan, jangan *sangat mendesak*. Ini saya berharap kita taruh di nomor 1 bila perlu ini, karena ini yang lagi PMI juga menunggu ini.

Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan memberikan bantuan kepada PMI di luar negeri, di daerah, atau negara yang kena atau terpapar virus corona itu masker.

Karena itu kita kasih pesan kepada publik ini bahwa Komisi IX dan BPJS Ketenagakerjaan itu komitmen juga melindungi mereka pada saat mereka susah ini. Karena ini banyak permintaan ini, minta masker. Itu poin 1 bila perlu ya? Atau terakhir ya. Karena ini orang juga tanya ini kita ini bantu PMI bagaimana ini. Kalau dengan model begini teman-teman BPJS Ketenagakerjaan juga mulai bisa berjalan. Kalau soal menyangkut cara cari masker ada Ibu Kurniasih. Anaknya apoteker, jadi tahu tempatnya dimana. Kalau saya kan anak. Nanti kalau soal itu kita cari, jadi biar bisa bantu PMI.

Mau ditaruh di nomor 1 atau nomor terakhir ini? Nomor 1 ya, karena ini yang lagi mendesak. Jadi nomor 1, karena kita tahu bahwa PMI di luar negeri juga banyak menunggu masker ini, jadi kita nomor 1 adalah:

“Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk membantu PMI di luar negeri yang terkena.”

F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si):

Izin.

KETUA RAPAT:

Silakan Ibu Kur, ini yang punya dapil ini.

F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si):

“Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk membantu PMI di negara-negara yang terdampak positif virus corona.”

Karena harus ada kata-kata ‘positif’. Ada sudah 27 negara WHO mengumumkan. Di negara-negara, luar-nya tidak usah, di negara-negara langsung saja.

“PMI di negara-negara yang terdampak positif virus corona dengan memberikan atau membagikan masker.”

KETUA RAPAT:

Jumlahnya kita tidak sebutkan Pak, tapi ini lebih kepada soal *political will* kita lah. Jumlah kita tidak usah sebutkan.

F-PG (M. YAHYA ZAINI, S.H):

Dikoreksi bahasanya barangkali.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Yahya.

F-PG (M. YAHYA ZAINI, S.H):

“Komisi IX mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan bantuan masker kepada PMI di negara-negara yang terdampak positif virus corona.”

Sudah jelas itu, jadi bantuannya langsung disebutkan 'masker'.

KETUA RAPAT:

Ini perpaduanlah ini.

Ini kita taruh pertama, karena ini komitmen kita, biar teman-teman PMI di luar negeri juga melihat kita memperhatikan mereka.

F-... (.....):

Tambah sedikit Pak di situ *termasuk negara yang terindikasi*.

KETUA RAPAT:

Sudah itu *terdampak positif virus corona*.

Tadi Ibu Kur mengatakan banyak negara itu kan terindikasi tapi belum positif. Dan ini juga tentu kan pasti kita punya negara paling yang dekat-dekat lah, Singapura, Malaysia, Hongkong.

F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI., MM):

Pimpinan, kalau soal barangnya di Indonesia tidak ada, Bapak bisa impor dari negara yang lain lah, terserah. Yang penting melindungi PMI kita di negara lain.

F-PG (M. YAHYA ZAINI, S.H):

Informasi, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Yahya.

F-PG (M. YAHYA ZAINI, S.H):

Sebenarnya bukan tidak ada Pak, tapi harganya berlipat-lipat Pak.

Ada satu perusahaan di Kerawang yang menjual sekarang per boks itu 150 ribu. Biasanya cuma 50 ribu. Dan memang permintaan sangat tinggi, termasuk dari negara tetangga kita Pak. Jadi memang saya kira bisa ini dilakukan, tetapi konsekuensinya harganya berlipat-lipat. Sesuai hukum pasar itu.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak.

BPJS KETENAGAKERJAAN:

Saya mau *sharing* saja.

Tampo hari kami bersama Ibu Menaker turut hadir, ada video *conference* dengan seluruh Atnaker wilayah Asia Pasifik yang terkena dampak virus corona. Itu video *conference* ada dari Jepang, Korea, Taiwan, Hongkong, Singapura, Malaysia, hampir semuanya Atnaker

dan PMI nya minta masker. Kenyataan di lapangan yang kita temui rata-rata mintanya kenaikannya adalah tiga kali lipat.

Lalu Ibu Menaker di dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa kami akan fokus. Karena kita tidak bisa memberikan semuanya, hanya dibidang Hongkong, Taiwan, dan Malaysia. Dan memang Ibu Menaker mengarahkan kalau bisa BPJS TK bantu. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dirkeu, memang kalau anggaran (**kalimat tidak jelas**) tidak memungkinkan.

Mungkin untuk sekedar informasi, dikemudian hari kita sebetulnya bisa menggunakan namanya anggaran, di kita itu ada namanya *promotif preventif*. Tetapi sekarang ketentuannya belum memadai untuk kami bisa membantu untuk seperti masker seperti itu. Kalau peraturan itu dimodifikasi di kemudian hari ini mungkin bisa digunakan untuk hal-hal seperti ini. Karena tujuan daripada *promotif preventif* sesuai ketentuan adalah bagian daripada pencegahan dan lain sebagainya. Misalnya dalam bentuk *medical check up* dan lain-lain. Di Kesehatan ada BPJS Kesehatan, di kami pun ada. Tetapi peraturannya memang belum memadai.

Jadi dalam hal ini/saat ini memang kami belum bisa. Tetapi kalau besok peraturannya disempurnakan kembali yang sifatnya *class programe* ini mungkin kita bisa lakukan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Intinya maksud baik sudah kita sampaikan. Teknisnya kita cari cara lah. Jangan sampai maksud baik itu kalah karena aturan. Aturan yang kita buat untuk bantu masyarakat/bantu PMI masa kita lagi (**kalimat tidak jelas**).

Kita ikut pola Pak JK lah urusan beginian ya, urusan sosial kemanusiaan itu aturan harus kita tabrak, daripada membuat banyak warga kita jadi susah. Jadi punya pekerja tadi mana aturan yang mau disiasati kita siasati cepat-cepat.

Saya kira itu, dari kami sudah ya, ketok dari kami.

(RAPAT: SETUJU)

Sekarang kami ingin mendengarkan catatan dari Pak Dirut, disetujui semua atau ada satu/dua catatan, kita sempurnakan, lalu kita tutup.

Silakan Pak Dirut.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (AGUS SUSANTO):

Terima kasih Pimpinan.

Dari nomor 1 ini sudah oke, nomor 2 oke.

Jadi nomor 3 karena ada tambahan vokasi kepada keluarga peserta, ini di internal kita vokasi ini kepada peserta. Mungkin ini yang mohon dikoreksi.

F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI., MM):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Rahmad.

F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI., MM):

Paham saya. Makanya tadi saya di awal *prolog* 'beasiswa' kepada anak. Beasiswa kan juga tidak langsung kepada peserta, tetapi keluarganya, anak-anaknya. Cobalah kita ini kenapa tidak untuk ini. Itu satu tahun cuma 2 ribu yang dilatih. Sebuah lembaga besar kok cuma 2 ribu. Ini memang saya merunut apa yang disampaikan oleh teman-teman itu sendiri.

Kenapa saya mengusulkan begitu? Karena beasiswa kan juga keluarganya, anak-anaknya. Bukan pesertanya. Yang meninggal terus ditanggung itukan juga anaknya, dua orang atau berapa tadi itu. Itu jadi alasan kami untuk menyampaikan seperti itu.

KETUA RAPAT:

Kembali ke Pak Dirut mungkin, apakah nanti disebutkan spesifik programnya itu vokasi, atau program saja tanpa kata 'vokasi', yang bisa kita asumsikan bahwa banyak program yang lain lagi, termasuk beasiswa, bisa kita bantu kalau ruangnya memungkinkan.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (AGUS SUSANTO):

Mungkin bahasanya bukan 'memperluas', tapi 'mengkaji'. Jadi karena kami butuh kajian itu untuk melakukan usulan tersebut.

F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI., MM):

Ini ingin jawaban saja Pak, kenapa anak juga tidak peserta untuk beasiswa?

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (AGUS SUSANTO):

Jadi beasiswa ini sudah ada programnya, yaitu dengan peningkatan manfaat. Sudah disahkan oleh Bapak Presiden PP Nomor 82 Tahun 2019. Namun demikian manfaat beasiswa ini diberikan kepada peserta yang meninggal dunia atau yang kecelakaan dan menyebabkan meninggal dunia, atau kecelakaan yang menyebabkan cacat tetap.

KETUA RAPAT:

Kalau pekerja tanpa ada kejadian tadi tidak bisa dapat?

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (AGUS SUSANTO):

Tidak Pak.

Jadi yang sekarang adalah dalam bentuk beasiswa, karena manfaat program jaminan kematian. Dan itu yang diberikan dua anak, mulai dari pendidikan TK sampai lulus sarjana, ini yang sudah ada programnya.

F-NASDEM (DRS. FADHOLI):

Ijin, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Fadholi.

F-NASDEM (DRS. FADHOLI):

Inikan kita lagi mau mencari solusi bersama, dan ini golnya kan kita meminta untuk bisa melakukan vokasi itu. Dan perlu diketahui bahwa ini akan ada satu lembaga yang nirlaba. Jadi kalau tadi yang disebut dengan CSR itu dengan tidak melebihi 1 persen, itukan dari sisi keuntungan. Sekarang bagaimana caranya bahwa kalau mengalokasikan anggaran juga untuk kegiatan yang bermanfaat untuk peserta dan keluarga. Kalau pedomannya itu saja berarti tidak akan keluar, itu hanya sedikit sekali. Yang meninggal dunia kan sedikit. Kan kita juga tidak berdo'a semuanya meninggal. Maka bagaimana caranya ada satu solusi, seperti yang disampaikan termasuk didalamnya adalah beasiswa tersebut. Persoalan alokasinya berapa ini nanti silakan untuk bisa dilakukan.

Jangan berpedoman dari laba. Kalau itu pedomannya dari laba tidak ketemu. Kan ini lembaga kesejahteraan yang akan menjamin nanti bangsa kita akan lebih sejahtera. Kalau ini dikembalikan lagi kepada keluarga saya pikir ini tidak masalah. Jadi analoginya dan juga alasannya ini bagaimana kita akan bisa membantu peserta dan keluarga. Jadi harus berani mengambil. Kalau untuk investasi saja berani, kenapa tidak berani untuk bisa mengalokasikan ini. Jadi kalau alokasi untuk investasi yang beresiko rugi saja berani, tetapi kalau mengalokasikan yang sudah jelas bermanfaat kenapa tidak berani.

Saya pikir begitu, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Yahya.

F-PG (M. YAHYA ZAINI, S.H):

Saya kira saya bisa membantu ini.

Jadi semua program BPJS TK itukan ada dasar hukumnya, ada landasannya. Sepanjang aturannya tidak ada mereka tidak berani membuat terobosan-terobosan. Kira-kira begitu yang saya pahami.

Kenapa misalnya investasi besar boleh, karena ada aturannya jelas Pak. Jadi kalau aturannya belum jelas maka sifatnya saya setuju mungkin melakukan pengkajian, sehingga nanti sembari dikaji sembari diperjuangkan payung hukumnya. Kira-kira begitu. Saya kira Pak Rahmad saya kira paham. Jadi tujuannya tercapai tapi mungkin tidak hari ini, karena perlu payung hukum. Sebab kalau mereka melanggar hukum juga kita mendapatkan justifikasi kesalahan, karena kita yang merekomendasikan.

Menurut saya begitu, Pak Ketua.

F-NASDEM (DRS. FADHOLI):

Ijin, Pak Ketua.

Saya pikir apa yang disampaikan Pak Ketua itu berani dengan menganalogikan Pak JK itu. Kalau persoalan langkah pertama (kalimat tidak jelas) itu silakan. Tetapi kalau kita meminta untuk mengkaji, itu pelaksanaannya masih panjang. Jadi kalau Bapak nanti dalam proses ini kita masih perlu pengkajian dan sebagainya, kita bisa terima, sehingga ini merupakan satu kesimpulan yang golnya itu kita lakukan dulu, tahapannya silakan Bapak. Kalau kita hanya sekedar minta mengkaji, itu mengkaji berapa lama kan kita juga masih lama sekali.

KETUA RAPAT:

Baik, saya kira kita cari titik temunya antara regulasi dan lapangan, kalau setuju ini ya, dan mempersiapkan perluasan program kepada keluarga peserta. Jadi kita tidak bicara vokasi saja, atau beasiswa, tapi berbagai program yang tentu harus kita minta agar BPJS Tenaga Kerja disiapkan. Jadi mereka mempersiapkan program-program. Termasuk misalnya aturan main dan seterusnya itu nanti kita siapkan disitu.

Silakan Pak Obon.

F-GERINDRA (OBON TABRONI):

Tambahan saja Pak.

Waktu itu jaman Jamsostek dulu, bahkan sampai uang buka perumahan pun dibantu dulu. Termasuk juga kalau saya tidak salah ada juga program beasiswa bukan bagi peserta yang mengalami kecelakaan atau yang lain-lain. Saat itu tentu keuangan BPJS jauh lebih kecil dari hari ini.

Dan tambahan saja, dulu itu kenaikan *benefit* 2 tahun sekali. Sekarang kan PP 44 kemudian berubah menjadi PP 82 itu 4 tahun. Dulu setiap 2 tahun naik-2 tahun naik dengan kondisi keuangan, yang saya sampaikan tadi, lebih sedikit kemudian dari yang hari ini.

Ininya kan sama Jamsostek dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jangan ketika berubah kemudian *benefit* yang di dapat oleh peserta malah turun. Harusnya kan lebih meningkat. 2 tahun menjadi 4 tahun, harusnya tiap tahun.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya kira ini catatan Pak Obon.

Sekali lagi saya katakan tadi, Pak Obon ini dapilnya itu buruh semua. Jadi ini suara dapil ini. Jadi saya kira kita pahami bahwa poin ini mempersiapkan perluasan program-program terhadap keluarga peserta itu dalam berbagai program tadi disiapkan berbagai hal ya, hukumnya dan seterusnya, untuk bisa dilaksanakan di lapangan.

Setuju ya untuk yang poin 3 ya?

Oke, silakan poin ke 4 Pak.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (AGUS SUSANTO):

Poin 4 *rapat khusus*. Ini kalau *rapat khusus* jadi multi konotasi.

KETUA RAPAT:

Jadi *rapat untuk* saja, *khusus*-nya dibuang ya.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (AGUS SUSANTO):

Mungkin *rapat lanjutan*.

KETUA RAPAT:

Khusus-nya dibuang. *Rapat untuk membahas* oke. *Rapat lanjutan* oke ya. *Rapat* saja sudah. Kita kan rapat cuma satu saja, RDP saja begini. Oke ya?

Nomor 5?

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (AGUS SUSANTO):

Nomor 5 oke Pak.

KETUA RAPAT:

Nomor 6?

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (AGUS SUSANTO):

6 oke.

KETUA RAPAT:

Nomor 7?

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (AGUS SUSANTO):

Nomor 7 yang c 'data PMI yang bekerja di luar negeri'. Kami tidak punya data PMI.

KETUA RAPAT:

Ini data dari mana Pak?

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (AGUS SUSANTO):

Yang kita punya adalah *data peserta PMI*.

KETUA RAPAT:

Data peserta ini itu basisnya yang legal atau ilegal atau gabungan keduanya?

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (AGUS SUSANTO):

Kalau data yang peserta itu yang legal.
Jadi kalau *data PMI* kan luas sekali, tapi *data peserta PMI*.

KETUA RAPAT:

Oke, *data peserta PMI* ya.
Selebihnya oke?
Nomor 8?

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (AGUS SUSANTO):

8 oke.

KETUA RAPAT:

Nomor 9?

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (AGUS SUSANTO):

9 oke.

KETUA RAPAT:

Dengan demikian sudah disepakati oleh kita semua para Anggota DPR RI yang terhormat dan mitra, dengan demikian kesimpulannya ada 9, dengan demikian kita setuju kesimpulan ini?

(RAPAT: SETUJU)

Untuk itu kami persilakan Dirut BPJS Ketenagakerjaan untuk menyampaikan kata penutup mewakili mitra pada sore hari ini.

Silakan Pak.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (AGUS SUSANTO):

Terima kasih Pimpinan.

Bapak/Ibu para Anggota Komisi IX DPR RI yang kami muliakan; dan
Juga rekan-rekan Direksi seluruh tim dari BPJS Ketenagakerjaan;
Rekan-rekan Media,

Terima kasih atas pertemuan yang sangat bermanfaat ini, dan terima kasih atas saran, nasehat, masukan dari Komisi IX kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Bapak/Ibu sekalian,

BPJS Ketenagakerjaan ini nanti makin lama akan makin besar. Secara struktural jumlah penduduk akan bertambah, pekerja akan bertambah, gaji juga akan naik, jumlah pesertanya akan bertambah, dana yang dikelola juga akan semakin besar, oleh karena itu perlu penguatan berbagai pihak di BPJS Ketenagakerjaan ini, terutama untuk infrastruktur pendukung operasional BPJS Ketenagakerjaan, proses, regulasi, dan juga *people/SDM*. Dan yang paling penting adalah pengawasan. Oleh karena itu kami sangat terbuka, kami sangat senang, kami butuh kerjasama sinergitas dengan berbagai pihak, terutama dengan DPR RI Komisi IX, untuk sama-sama kita bisa melaksanakan amanah undang-undang untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja Indonesia dengan sebaik-baiknya.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalaam.

Sebelum rapat ini kami tutup, kami persilakan kita berdo'a menurut keyakinan kita masing-masing.

Berdo'a mulai.

(BERDOA BERSAMA)

Berdoa selesai.

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah*, syukur kepada Tuhan, rapat sore hari ini kami nyatakan ditutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.55 WIB)

Jakarta, 10 Februari 2020
a.n. KETUA RAPAT
Sekretaris Rapat

Yanto Supriyanto, S.H.
NIP. 196305241992031001